

**POTENSI KERJASAMA REGIONAL RIAU BAGIAN SELATAN
SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN WILAYAH
(KABUPATEN INDRAGIRI HULU-KABUPATEN INDRAGIRI HILIR-
KABUPATEN PELALAWAN-KABUPATEN KUANSINGINGI)**

T E S I S

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

AGUS SUMIARTA
L4D 002 113



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2 0 0 4**

UPT-PUSTAK-UNDIP

**POTENSI KERJASAMA REGIONAL RIAU BAGIAN SELATAN SEBAGAI
UPAYA PEMBANGUNAN WILAYAH
[KABUPATEN INDRAGIRI HULU-KABUPATEN INDRAGIRI HILIR-
KABUPATEN PELALAWAN-KABUPATEN KUANTAN SINGINGI]**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

AGUS SUMIARTA
L4D002113

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 28 Mei 2004

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 28 Mei 2004

Pembimbing Pendamping



Dipl.Ing. Benjamin Abdurahman

Pembimbing Utama



Ir. Ragil Haryanto, MSP

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

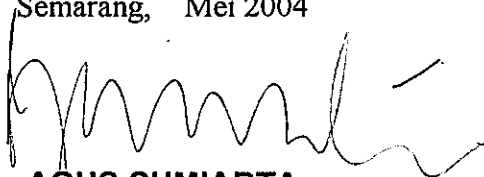


Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan diterbitkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, Mei 2004



AGUS SUMIARTA
NIM L4D002113

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu datang kemudahan * Apabila telah selesai suatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain * Dan hanya kepada Allah tempat kembali.

(Al-Insyirah : 6-8)

Alam diciptakan Allah untuk kepentingan manusia agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan telitilah hukum-hukum yang ada didalamnya agar kita mengetahui yang tersembunyi didalamnya.

Tesis ini kupersesembahkan untuk :

Seluruh keluargaku, sahabatku tercinta yang telah memberikan semangat dan restu
Serta istriku tercinta Fitri Yeny, Ssi yang selalu setia mendampingiku beserta anak-anakku
Tari, Indah dan si bungsu Icha

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam tercurah hanya untuk Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan izin-Nyalah tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis yang berjudul “**Potensi Kerjasama Regional Riau Bagian Selatan Sebagai Upaya Pembangunan Wilayah**” dipilih berdasarkan Era Globalisasi dan paradigma otonomi daerah dewasa ini membawa perubahan yang cukup mendasar terutama di tingkat Pemerintahan lokal. Dengan bergulirnya gelombang reformasi, berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah administrasi di Propinsi Riau, maka Wilayah Riau Bagian Selatan dimekarkan menjadi 4 (empat) Kabupaten. Konsekuensi dari pemekaran wilayah di Riau Bagian Selatan yaitu, terpisahnya wilayah tersebut secara administratif, namun pada kenyataannya, secara fungsional wilayah tersebut merupakan satu kesatuan, sehingga jika pengelolaan potensi daerah dilakukan secara sendiri-sendiri, maka dapat memicu timbulnya konflik antar daerah.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis mencoba mengembangkan suatu konsep regionalisasi sebagai *platform* atau wadah komunikasi, kerjasama dan koordinasi antar daerah berdasarkan kesamaan kepentingan, budaya dan ekonomi yang saling menunjang. Hal ini dapat diimplementasikan dalam kerjasama 4 (empat) kabupaten, yaitu **Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi dan Pelalawan.**

Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Indragiri Hulu yang telah memberi izin dan bantuan pembiayaan untuk mengikuti Program Magister ini,
2. Bapak Ir. Ragil Haryanto, MSP selaku Mentor dan Bapak Dipl. Ing. Benjamin Abdurahman selaku Co-Mentor yang senantiasa memberi bimbingan dan masukan dalam proses penulisan tesis ini,
3. Bapak PM. Broto Soenaryo, SE, MSP dan Ir. Jawoto Sih Setiono, MDP selaku penguji dan pembahas dalam sidang pembahasan dan ujian tesis yang juga banyak memberi masukan dalam penyelesaian tesis ini,
4. Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Keahlian Teknik (PUSDIKTEK) yang telah memberi izin untuk mengikuti Program Magister ini sampai selesai,
5. Ayahanda (almarhum) H. Ishak Sunaryo, BA dan Ibunda Hj. Yuniar dengan segala kasih sayang dan do'a sampai penulis menyelesaikan studi ini,
6. Istriku tercinta Fitri Yeny, Ssi yang selalu setia mendampingiku beserta anak-anakku Tari, Indah dan sibungsu Icha, serta saudara-saudaraku tercinta atas segala dukungan dan do'anya,
7. Rekan-rekan MPPWK 2002 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberi keceriaan disaat-saat sulit dan membantu, berdiskusi dalam membahas materi tesis ini,

Penulis berdo'a semoga semua jerih payah yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dengan balasan yang setimpal, Amin ...

Terakhir, tiada gading yang tidak retak, tesis ini tentunya jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri terhadap saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan di kemudian hari, sehingga dapat memberi manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, Mei 2004

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan	iii
Lembar Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Abstrak	xiii
Abstract.....	xiv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Sasaran Penelitian	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	10
1.5.1 Ruang Lingkup Spasial.....	10
1.5.2 Ruang Lingkup Substansial	11
1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian	12
1.7 Metodologi Penelitian.....	15
1.7.1 Tahapan Penelitian.....	15
1.7.2 Metode Analisis	16
1.8 Sistematika Penulisan.....	29
Bab II Kajian Kerjasama Antardaerah Sebagai Perwujudan Konsep Regionalisasi.....	32
2.1 Tinjauan Pengembangan Wilayah.....	32
2.2 Konsep Perwilayahan.....	33
2.3 Konsep Regionalisasi dalam Pengembangan Wilayah	36
2.4 Interaksi Antar Wilayah	43
2.5 Daya Saing Wilayah.....	48
2.6 Kerjasama Antardaerah Sebagai Perwujudan Konsep Regionalisasi.....	51
2.6.1 Bidang-bidang Kerjasama.....	57
2.6.2 Permasalahan Kerjasama Antar Daerah.....	57
2.6.3 Kelembagaan Daerah.....	60
2.7 Kesimpulan	62
Bab III Gambaran Umum Potensi Kerjasama antar Kabupaten di Wilayah Riau Bagian Selatan	67
3.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Riau Bagian Selatan	67
3.2 Karakteristik Kabupaten Indragiri Hulu.....	72

3.2.1	Kondisi Fisik Dasar	72
3.2.2	Pemanfaatan Lahan	72
3.2.3	Penduduk dan Tenaga Kerja	73
3.2.4	Tinjauan Sektor Ekonomi	75
3.2.5	Tinjauan Sektor Pertanian dan Perkebunan	77
3.2.6	Tinjauan Sektor Sarana dan Prasarana Transportasi	78
3.3	Karakteristik Kabupaten Indragiri Hilir	79
3.3.1	Kondisi Fisik Dasar	79
3.3.2	Pemanfaatan Lahan	80
3.3.3	Penduduk dan Tenaga Kerja	80
3.3.4	Tinjauan Sektor Ekonomi	82
3.3.5	Tinjauan Sektor Pertanian dan Perkebunan	84
3.3.6	Tinjauan Sektor Sarana dan Prasarana Transportasi	85
3.4	Karakteristik Kabupaten Pelalawan	86
3.4.1	Kondisi Fisik Dasar	86
3.4.2	Pemanfaatan Lahan	86
3.4.3	Penduduk dan Tenaga Kerja	87
3.4.4	Tinjauan Sektor Ekonomi	88
3.4.5	Tinjauan Sektor Pertanian dan Perkebunan	91
3.4.6	Tinjauan Sektor Sarana dan Prasarana Transportasi	91
3.5	Karakteristik Kabupaten Kuantan Singingi	92
3.5.1	Kondisi Fisik Dasar	92
3.5.2	Pemanfaatan Lahan	93
3.5.3	Penduduk dan Tenaga Kerja	94
3.5.4	Tinjauan Sektor Ekonomi	95
3.5.5	Tinjauan Sektor Pertanian dan Perkebunan	97
3.5.6	Tinjauan Sektor Sarana dan Prasarana Transportasi	97
3.6	Variabel Perekat Regionalisasi	98

Bab IV	Analisis dan Potensi Kerjasama Antardaerah Sebagai Perwujudan Konsep Regionalisasi di Wilayah Riau Bagian Selatan	104
4.1	Analisis Penentuan Sektor-sektor Ekonomi Unggulan di Wilayah Riau Bagian Selatan	104
4.2	Analisis Sektor-sektor yang Strategis untuk Dikerjasamakan	110
4.3	Analisis Penentuan Sektor Paling Strategis untuk Dikerjasamakan ..	122
4.3.1	Analisis Kriteria dan Alternatif Sektor yang Strategis Untuk Dikerjasamakan	122
4.3.2	Penentuan Sektor Strategis untuk Dikerjasamakan Dengan Metode AHP	124
4.4	Analisis Bentuk Kerjasama Antar Kabupaten di Wilayah Riau Bagian Selatan	130
4.5	Analisis Implikasi Bentuk Kerjasama yang Diusulkan	136
4.6	Potensi Kerjasama Antar Daerah sebagai Perwujudan Konsep Regionalisasi di Wilayah Riau Bagian Selatan	140
4.6.1	Sektor Strategis untuk Dikerjasamakan di Wilayah Riau Bagian Selatan	141
4.6.2	Bentuk Kerjasama Regional di Wilayah Riau Bagian Selatan	142

Bab V Penutup	148
5.1 Temuan Studi.....	148
5.2 Kesimpulan.....	149
5.3 Rekomendasi.....	151
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN	159

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Pembobotan Nilai dalam Metode AHP.....	25
Tabel II.1	Variabel Kerjasama Antar Wilayah	66
Tabel III.1	Banyaknya Penduduk Kabupaten Inhu Priode 2000-2002.....	73
Tabel III.2	Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Indragiri Hulu dan Propinsi Riau Tahun 2000	74
Tabel III.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Inhu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2002	75
Tabel III.4	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Inhu Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2002	76
Tabel III.5	Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Inhu Tahun 2000-2002 ...	77
Tabel III.6	Banyaknya Penduduk Kabupaten Inhil Priode Tahun 2000-2002	81
Tabel III.7	Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Inhil dan Propinsi Riau Tahun 2000	81
Tabel III.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Inhil Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2002	82
Tabel III.9	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Inhil Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2002	83
Tabel III.10	Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Inhil Tahun 2000-2002 ...	84
Tabel III.11	Penggunaan Lahan di Kabupaten Pelalawan tahun 2000.....	87
Tabel III.12	Banyaknya Penduduk Kabupaten Pelalawan Priode Tahun 2000-2002	87
Tabel III.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2002	88
Tabel III.14	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2002	89
Tabel III.15	Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kuansing dan Propinsi Riau Tahun 2000	94

		x
Tabel III.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuansing Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2002	95
Tabel III.17	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kuansing Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2002	96
Tabel III.18	Faktor-faktor Pendorong Kerjasama di wilayah Riau Bagian Selatan	98
Tabel IV.1	Nilai LQ Berdasarkan Pendekatan PDRB di Wilayah Riau Bagian Selatan Tahun 2000	104
Tabel IV.2	Arahan Sektor Strategis Sebagai Pendorong Kegiatan Ekonomi Wilayah Riau Bagian Selatan	105
Tabel IV.3	Posisi Kompetitif Relatif Sektor	114
Tabel IV.4	Faktor Strategi Internal	114
Tabel IV.5	Faktor Strategi Eksternal	116
Tabel IV.6	Penentuan Strategi	119
Tabel IV.7	Kriteria Penentuan Sektor Strategis Untuk di Kerjasamakan di Wilayah Riau Bagian Selata	127
Tabel IV.8	Alternatif Sektor Strategis Untuk di Kerjasamakan Berdasarkan Kriteria I	129
Tabel IV.9	Alternatif Sektor Strategis Untuk di Kerjasamakan Berdasarkan Kriteria II	129
Tabel IV.10	Usulan Kerjasama Antar Kabupaten di Wilayah Riau Bagian Selatan	134
Tabel V.1	Usulan Kerjasama Antar Kabupaten di Wilayah Riau Bagian Selatan	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran	14
Gambar 1.2	Kerangka Analisis Penelitian	17
Gambar 1.3	Tahapan AHP dengan Menggunakan Expert Choise	28
Gambar 2.1	Proses Interaksi Antar Wilayah.....	45
Gambar 2.2	Faktor Yang Mempengaruhi Daya Saing.....	48
Gambar 2.3	Rumusan Konsep Regionalisasi dalam Kerjasama Antar Wilayah	65
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Inhu dan Propinsi Riau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2002.....	76
Gambar 3.2	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Inhu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002.....	77
Gambar 3.3	Peningkatan Produksi Karet dan Kalapa Sawit di kabupaten Inhu Tahun 2001-2002	78
Gambar 3.4	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Inhil Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002	83
Gambar 3.5	Peningkatan Produksi Karet dan Kelapa Sawit di Kabupaten Inhil Tahun 2001-2002	85
Gambar 3.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan dan Propinsi Riau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2002	89
Gambar 3.7	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Tahun 2002	90
Gambar 3.8	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kuansing Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Tabel Rekapitulasi Wawancara Instansional	155
Lampiran B	Tabel PDRB Kabupaten di Wilayah Riau Bagian Selatan dan Propinsi Riau atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2002	159
Lampiran C'	Kuesioner Swot	160
Lampiran D	Kuesioner AHP	169

ABSTRAK

Pemberlakuan otonomi daerah telah membuka kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Daerah diberi peluang untuk lebih proaktif, kreatif, dan inovatif dalam mengelola dan mengekspresikan potensi daerah dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Namun di sisi lain, pelaksanaan otonomi daerah menghadapi kendala sehubungan dengan kemampuan daerah yang terbatas dan adanya perbedaan potensi dan transformasi budaya perencanaan. Hal itu dapat menyebabkan daerah terjebak dalam egoisme lokal karena masing-masing daerah hanya memikirkan ruang lingkup daerahnya sendiri. Selanjutnya hal itu akan memicu timbulnya konflik antar daerah.

Salah satu bentuk perwujudan dari otonomi daerah adalah pemekaran wilayah di Riau Bagian Selatan. Konsekuensi pemekaran yaitu terpisahnya wilayah tersebut secara administratif menjadi empat kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Namun pada kenyataannya, masih terdapat keterkaitan yang erat antar kabupaten tersebut, baik keterkaitan fungsional sebagai bagian dari koridor Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok maupun keterkaitan budaya dan historis karena dulunya merupakan satu kesatuan wilayah administratif (kecuali Kabupaten Pelalawan) dan kedekatan geografis. Kondisi tersebut di atas menciptakan suatu interaksi yang kuat antara keempat kabupaten, yang selanjutnya diperkuat dengan adanya Kesepakatan Bersama keempat kabupaten tersebut dalam mengatur pembangunan lintas kabupaten pada tanggal 14 Desember 2002.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka dikembangkan suatu konsep regionalisasi sebagai *platform* atau wadah komunikasi, kerjasama dan koordinasi antar daerah berdasarkan kesamaan kepentingan, budaya dan ekonomi yang saling menunjang. Hal ini dapat diimplementasikan dalam kerjasama 4 (empat) kabupaten. Esensi kerjasama sebagai salah satu proses regionalisasi adalah bagaimana daerah berusaha untuk mensinergikan potensi yang dimiliki. Adanya kerjasama antar daerah ini diharapkan dapat mensinergikan berbagai potensi daerah secara bersama dan menghilangkan persaingan antar daerah, guna memperkuat ekonomi wilayah Riau Bagian Selatan.

Dalam rangka mewujudkan kerjasama tersebut, maka dilakukan kajian tentang potensi kerjasama antar daerah di Riau Bagian Selatan sebagai perwujudan konsep regionalisasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan menentukan sektor yang strategis untuk dikerjasamakan sekaligus alternatif bentuk kerjasama pada sektor tersebut, dalam kerangka konsep regionalisasi.

Dalam penelitian ini dihasilkan sektor yang paling strategis untuk dikerjasamakan di wilayah Riau Bagian Selatan adalah sektor transportasi. Hal tersebut didasari pertimbangan bahwa dalam aksesibilitas antar kabupaten masih relatif rendah, menunjang keterkaitan aktivitas industri dengan pemanfaatan sumber daya lokal berupa komoditi pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa, dan karet, yang telah terjalin kuat, serta membuka daerah-daerah yang masih terisolasi. Adapun bentuk kerjasama yang diusulkan adalah berupa pembentukan lembaga bersama yang merupakan kolaborasi dari *stakeholders* terkait.

ABSTRACT

The establishment of regional autonomy has given a chance to the regency to held their own governance. Regency is given oppurtunities to be more pro active, creative and innovative in managing and expressing the region's potency to fit its own needs. In the other side, the implementation of regional autonomy faces obstacles in accordance with the limited of regional capability and the differences of potency and planning culture transformation. It may cause the region trapped into local egoism due to each regency only thinks of its circumstance. Subsequently, it will put trigger interregional conflict.

One of the regional autonomy's form is the split of the region in Southern Riau. The consequences are the administratively separation of that region into four regencies, namely Indragiri Hulu Regency, Indragiri Hilir Regency, Pelalawan Regency and Kuantan Singingi Regency. But in fact, there is still closed relation between those regencies, either a functional relationship as a part of corridor of Rengat Area – Kuala Enok potential area or a culture and historical relationship because previously it is a unity of administrative area (except Pelalawan Regency) and geographical relationship. Above condition creates a strong interaction among those four regencies, and then strengthened by Agreement among them in arranging inter regency development in December 14th 2002.

Based on these idea, a regionalization concept as a platform or communication means, cooperation and coordination inter region is fostering based on the equality of interest, cultural and economy supporting each other. This can be implemented into four regencies's cooperation. The essential of cooperation as one of regionalization processes is how the region try to integrate its potencies. This regional cooperation is expected to be able to integrate any region's potency and diminish rivalry of the regions, in order to strengthen the economy of Southern Riau.

In order to create that cooperation, the study about the potency of inter region's stakeholders.cooperation in Southern Riau as manifestation of regionalization concept is conducted. The approach used in this research is determining the strategical sector to be incooperated with as well as an alternative of cooperation form in that sector, in the frame of regionalization concept.

This research found the most strategical sector to be incooperated with in Southern Riau is the transportation sector. This is based on deliberation that accesibility inter region is still low, support the relationship between industry activity and the use of local resources, namely agricultural and plantation commodities such as oil palm, coconut, rubber which has been strong binded and open the isolated areas. Meanwhile the form of cooperation that recommended the establishment of joint committee which is the collaboration of related

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Era otonomi dan globalisasi dewasa ini membawa perubahan yang cukup mendasar terutama di tingkat pemerintahan lokal, yaitu kabupaten dan kota. Tingkat persaingan yang semakin besar serta keterbukaan untuk mengakses informasi di segala bidang, merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemerintah lokal dalam era ini. Di sisi lain, dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kewenangan pemerintah lokal menjadi semakin besar, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya. Wewenang ini memberikan peluang kepada daerah untuk lebih proaktif, kreatif dan inovatif dalam mengelola serta mengekspresikan potensi daerah untuk pemenuhan kebutuhannya. Wewenang tersebut meliputi kegiatan penggalian potensi dan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya serta peningkatan kinerja institusi yang ada, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakatnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Kreativitas, inovasi, dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat (Riyadi, 2003:331 – 332).

Setiap wilayah pada umumnya mempunyai potensi ekonomi yang beraneka ragam untuk dikembangkan, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan wilayah. Namun di sisi lain, pelaksanaan otonomi daerah menghadapi kendala sehubungan dengan kemampuan daerah yang terbatas serta adanya perbedaan potensi dan transformasi budaya perencanaan. Kedua hal itu dapat menyebabkan daerah

UPT-PUSTAK-UNDIP

terjebak dalam egoisme lokal karena masing-masing daerah hanya memikirkan ruang lingkup daerahnya saja. Sementara kemampuan daerah yang terbatas dalam hal dana dan sumber daya menyebabkan pengembangan potensi daerah belum optimal.

Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Indragiri yang meliputi wilayah Rengat dan Tembilahan dalam wilayah administratif Propinsi Riau. Melihat perkembangan daerah yang semakin maju dan didukung oleh sumber daya alamnya, didahului dengan keluarnya surat keputusan Gubernur Riau No. 052/5/1965 tanggal 27 April 1965 dan berdasarkan UU No. 6/1965 tanggal 14 juni 1965 serta lembaran negara RI 1965 No.49 pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan bergulirnya gelombang reformasi, berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah administrasi di Propinsi Riau maka Kabupaten Indragiri Hulu salah satu kabupaten yang mengalami restrukturisasi sehingga Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Wilayah tersebut mengalami pemekaran menjadi tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan Kabupaten Pelalawan merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kampar. Konsekuensi dari pemekaran wilayah tersebut yaitu terpisahnya wilayah tersebut secara administratif. Namun pada kenyataannya, secara fungsional wilayah tersebut merupakan satu kesatuan, sehingga jika pengelolaan potensi daerah dilakukan secara sendiri-sendiri, maka dapat memicu timbulnya konflik antar daerah.

Kondisi pada saat ini adalah setiap kabupaten dalam melaksanakan pembangunan masih berjalan dengan orientasi lokal masing-masing. Disamping itu kurangnya koordinasi

antar kabupaten dalam perencanaan pembangunan daerah akan memicu timbulnya konflik antar daerah tersebut. Hal ini terlihat sejak kabupaten membuka akses sendiri-sendiri untuk mengembangkan daerahnya, sehingga menimbulkan persaingan antar kabupaten dalam mengembangkan daerahnya. Padahal dalam membangun suatu wilayah hendaknya memperhatikan juga keterkaitan fungsional dalam wilayah maupun dengan wilayah lain yang mana keterkaitan tersebut ditunjukkan dengan adanya hubungan transportasi antar wilayah, seperti dikemukakan oleh Rondinelli bahwa sebuah distrik tidak hanya merupakan sebuah sistem permukiman yang secara fungsional berbeda, tetapi juga merupakan suatu jaringan interaksi sosial, ekonomi, dan fisik. Proses interaksi dibentuk oleh jalan-jalan yang menghubungkan antara permukiman-permukiman dan desa di dalam dan di luar distrik (Riyadi, 2003:125).

Dengan kondisi di atas, maka akan sulit bagi pemerintah lokal untuk menghadapi tantangan globalisasi tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka tiap daerah perlu menumbuh-kembangkan proses regionalisasi. Hal tersebut penting, mengingat tiap daerah tidak dapat berdiri sendiri karena dalam kenyataannya tidak setiap pemerintah lokal memiliki sumber daya yang lengkap dan memadai, baik sumber daya alam, finansial, maupun sumber daya manusia.

Seiring dengan tekanan globalisasi dan implikasi negatif yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah memerlukan antisipasi dengan menumbuh-kembangkan proses regionalisasi. Pengertian regionalisasi yang dimaksud adalah pengelompokan beberapa daerah menjadi satu wilayah pembangunan berdasarkan keterkaitan antar daerah tersebut (Winarso, 2002 : 12). Undang-undang No. 22 Tahun 1999 pasal 87 ayat 1 secara eksplisit menyatakan peluang ini : “Beberapa daerah dapat mengadakan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.”

Berdasarkan pemikiran tersebut maka dikembangkan suatu konsep regionalisasi sebagai *platform* atau wadah komunikasi, kerjasama dan koordinasi antar daerah berdasarkan kesamaan kepentingan, budaya dan ekonomi yang saling menunjang. Manfaat dari regionalisasi ini adalah untuk :

- Membangun kekuatan lokal dengan memanfaatkan interaksi regional ;
- Menciptakan kemandirian ;
- Menciptakan sustainibilitas pembangunan ;
- Menciptakan kesatuan nasional ;
- Mengembangkan perekonomian lokal dan regional.

Konsep regionalisasi merupakan wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran dan kemauan daerah dalam mensinergikan berbagai potensi daerah secara bersama. Proses regionalisasi dapat berjalan baik bila didukung oleh berbagai faktor internal, antara lain adalah kedekatan budaya, geografis, karakteristik wilayah dan faktor historis serta keberagaman dan kesamaan potensi yang ada. Hal ini dapat diimplementasikan dalam kerjasama 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan.

Esensi kerjasama sebagai salah satu proses regionalisasi adalah bagaimana daerah berusaha untuk mensinergikan potensinya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari potensi ekonomi yang ada. Dalam konteks ekonomi daerah, ini bisa menyangkut sumber daya alam baik potensi-potensi yang berasal dari materi yang dikandung tanah bersangkutan (kandungan bahan tambang, kesuburan tanah, dan sebagainya) maupun potensi-potensi yang berasal dari letak / posisi tempat terhadap elemen-elemen wilayah lainnya.

Kerjasama antar daerah pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan dua wilayah atau lebih yang saling berdekatan secara mandiri oleh pihak yang berkepentingan. Kerjasama ini perlu dilakukan apabila terdapat dua daerah atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama dan atau saling mempengaruhi, sehingga berinteraksi untuk mewujudkan tujuan bersama. Kunci utama kerjasama ini adalah kemauan untuk bekerjasama, seperti dikemukakan oleh Davidson yaitu keinginan untuk bekerja sama adalah kunci untuk sukses, di luar hal lainnya seperti motivasi yang baik, pemahaman, hubungan personal, dan kepercayaan (Davidson et al dalam Riyadi, 2003 : 7). Adanya kerjasama antar daerah ini diharapkan dapat mensinergikan berbagai potensi daerah secara bersama dan menghilangkan persaingan antar daerah, guna memperkuat ekonomi daerah.

Upaya kerjasama antar daerah dapat menjadi alternatif untuk mensinergikan berbagai potensi daerah secara bersama dan menghilangkan persaingan antar daerah, guna memperkuat ekonomi daerah. Dalam mencari potensi kerjasama tersebut, diperlukan analisis potensi-potensi daerah yang bisa dikembangkan secara regional. Fenomena yang mungkin timbul dalam kerjasama tersebut memerlukan analisis potensi kerjasama sebagai langkah awal untuk mensinergikan keuntungan komparatif setiap daerah agar mencapai tujuan regionalisasi secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerjasama antar kabupaten yang bersangkutan dapat diterapkan sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang mampu mengakomodasi kepentingan masing-masing kabupaten. Dalam studi ini akan dikaji sektor strategis sebagai potensi kerjasama yang efektif antar kabupaten di Riau Bagian Selatan dalam rangka proses regionalisasi. Namun sebelumnya perlu dilakukan identifikasi terhadap sektor

ekonomi unggulan masing-masing kabupaten untuk mendapatkan sektor yang strategis untuk dikerjasamakan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Mendasarkan pada fenomena yang terjadi, maka kerjasama Riau Bagian Selatan merupakan langkah awal yang dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan dengan mensinergikan keberagaman maupun kesamaan potensi wilayah dalam rangka melaksanakan pembangunan wilayah dalam kerangka regionalisasi. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam regionalisasi di wilayah tersebut adalah :

Pertama, wilayah Riau Bagian Selatan sebenarnya merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun dalam kenyataannya wilayah tersebut lamban berkembang. Hal itu disebabkan karena sumber daya yang ada belum dikelola secara optimal akibat keterbatasan dana dan sarana serta prasarana pendukung. Dengan adanya pemekaran wilayah menjadi empat kabupaten dan dibukanya jalur transportasi baru diharapkan mampu memacu pembangunan wilayah tersebut.

Kedua, data dan informasi potensi wilayah yang ada pada saat ini masih belum terpadu. Setiap kabupaten mempunyai data keunggulan komparatif wilayahnya sendiri-sendiri, seperti yang umumnya terjadi. Untuk itu diperlukan telaahan yang mengkaji potensi masing-masing kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan, meliputi sektor unggulan maupun yang tidak unggulan dalam kaitannya dengan kerjasama regional Riau Bagian Selatan.

Ketiga, sektor unggulan keempat kabupaten tersebut adalah perkebunan kelapa sawit, yang hasil produksinya masih dipasarkan secara sendiri-sendiri. Komoditi kelapa

yang sama-sama dihasilkan oleh empat kabupaten ternyata merupakan 81,55 % (586.935 Ha) dari luas lahan Propinsi Riau serta 426.165 ton dari 489.763 ton total produksi Propinsi Riau. Untuk menarik investor masuk ke dalam kerjasama diperlukan kejelasan mengenai keterkaitan pola sistem produksi yang telah berjalan selama ini, sehingga perlu dikaji *linkage* yang menghubungkan aktivitas produksi di empat kabupaten tersebut berdasar potensi setiap daerah. Sebenarnya terdapat pola keterkaitan produksi yang dapat dikembangkan dalam industri pertanian (agroindustri). Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan-Singingi merupakan satu kesatuan wilayah yang memiliki kesamaan produk unggulan, latar belakang sejarah sosial budaya, dan letak yang strategis untuk hubungan ke luar, seperti ke Johor, Singapura, Jambi, dan Sumatera Barat. Sedangkan Kabupaten Pelalawan letaknya berbatasan dengan ketiga kabupaten lainnya dan memiliki peranan sebagai lokasi industri pengolah hasil pertanian dan perkebunan. Namun hingga saat ini potensi *linkage* tersebut belum dapat dijalankan karena belum adanya jaringan yang dapat menghubungkannya, yaitu jaringan transportasi darat. Belum tersedianya jaringan transportasi yang memadai, menyebabkan keunggulan kompetitif pada masing-masing daerah belum terintegrasi dalam *linkage* yang baik,

Keempat, sejak diberlakukannya otonomi daerah dengan kewenangan penuh pada kabupaten / kota tersebut, masing-masing daerah cenderung berkonsentrasi untuk mengembangkan daerahnya sendiri, serta kurang memperhitungkan peluang-peluang kerjasama regional yang ada. Dengan demikian diperlukan telaahan untuk mengkaji peluang-peluang kerjasama di masing-masing kabupaten tersebut. Sebenarnya keempat kabupaten tersebut mempunyai potensi yang saling mempengaruhi, sehingga apabila hal itu disinergikan, maka akan lebih memacu pembangunannya.

Keinginan untuk melakukan kerjasama tersebut sebenarnya sudah muncul, yang ditandai dengan dilakukannya Kesepakatan Bersama Lintas Pembangunan empat kabupaten pada tanggal 14 Desember 2002. Dalam kesepakatan tersebut ditetapkan visi dan misi bersama untuk membangun Riau Bagian Selatan secara mandiri, sinergis, dan berkelanjutan. Misi tersebut antara lain dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Riau Bagian Selatan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan. Tindak lanjut yang dilakukan untuk menerjemahkan visi dan misi bersama tersebut adalah pembentukan Forum Komunikasi/Sekretariat Bersama empat kabupaten. Namun hingga saat ini Kesepakatan Bersama tersebut belum dapat diwujudkan menjadi kerjasama. Hal itu disebabkan karena koordinasi forum tersebut belum berjalan efektif, mengingat adanya keterbatasan dana dan keterbatasan sumberdaya manusia pada instansi-instansi pemerintah kabupaten terkait. Dengan demikian, kerjasama di wilayah Riau Bagian Selatan belum dapat diwujudkan.

Untuk mewujudkan kerjasama antar daerah ini perlu dikenali potensi yang menjadi keunggulan dan keterbatasan masing-masing daerah melalui suatu proses analisis untuk mendapatkan sektor-sektor yang akan dikerjasamakan. Sektor tersebut nantinya harus dapat menjadi stimulan bagi perkembangan wilayah. Setelah sektor yang akan dikerjasamakan sudah dapat ditentukan, maka perlu disusun bentuk kerjasama yang merupakan representasi dari keinginan masing-masing daerah.

Untuk itu, perlu dilakukan studi untuk mengkaji potensi kerjasama antar daerah di Riau Bagian Selatan dalam rangka mewujudkan konsep regionalisasi. Potensi tersebut tentunya terkait dengan sektor-sektor pembangunan yang strategis bagi masing-masing daerah serta bentuk kerjasama yang diinginkan oleh masing-masing daerah di Riau Bagian Selatan.

Untuk menjawab permasalahan utama yang telah diidentifikasi, dilakukan pendekatan melalui *research question*, yaitu : **Bagaimakah kondisi sektor strategis sebagai potensi kerjasama antardaerah di wilayah Riau Bagian Selatan dalam rangka mewujudkan konsep regionalisasi? Kerjasama menjadi salah satu strategi dalam menciptakan daya saing wilayah dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin tinggi di era otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka studi ini dilakukan untuk mengkaji peluang kerjasama antar daerah di wilayah Riau Bagian Selatan, sehingga pembangunan wilayah tersebut selanjutnya dapat lebih maju lagi dengan mengembangkan potensi regionalisasi pada wilayah tersebut.**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Mengkaji sektor strategis dan bentuk kerjasama sebagai potensi kerjasama antar daerah di wilayah Riau Bagian Selatan dalam rangka mewujudkan konsep regionalisasi.

1.4 Sasaran Penelitian

Sasaran yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi karakteristik wilayah Riau Bagian Selatan beserta strategi pengembangannya (sebagai bagian dari Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok)
2. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada di masing-masing kabupaten
3. Menganalisis sektor-sektor ekonomi unggulan di wilayah Riau Bagian Selatan

4. Menganalisis sektor-sektor strategis untuk dikerjasamakan.
5. Menentukan sektor paling strategis untuk dikerjasamakan oleh keempat kabupaten di Riau Bagian Selatan dalam rangka regionalisasi.
6. Menganalisis potensi kerjasama antar daerah di wilayah Riau Bagian Selatan
7. Menganalisis implikasi bentuk kerjasama di wilayah Riau Bagian Selatan

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Kajian potensi kerjasama sebagai potensi terbentuknya regionalisasi ini dibatasi berdasarkan ruang lingkup spasial dan ruang lingkup substansial.

1.5.1 Ruang Lingkup Spasial

Penentuan wilayah penelitian ini didasarkan pada banyak aspek, diantaranya adalah letak geografis antar kabupaten yang saling berdekatan di Riau Bagian Selatan, yang mana dalam RTRW Propinsi Riau, wilayah Riau Bagian Selatan juga terkait dengan pengembangan Kawasan Koridor Andalan Rengat-Kuala Enok sebagai pusat pelayanan regional.

Di samping itu, secara historis wilayah penelitian ini dahulunya berada dalam satu wilayah administratif (kecuali Kabupaten Pelalawan yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar), yang kemudian dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan-Sisingi. Dengan demikian keempat kabupaten tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang mana aktivitas yang ada di masing-masing kabupaten tersebut memiliki kaitan yang erat, sehingga dalam pelaksanaan penelitian ini, keempatnya perlu dibahas secara komprehensif.

Kondisi tersebut di atas menciptakan suatu interaksi yang kuat antara keempat kabupaten (Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan-Singingi, dan Kabupaten Pelalawan), yang selanjutnya diperkuat dengan adanya Kesepakatan Bersama keempat kabupaten tersebut dalam mengatur pembangunan lintas kabupaten pada tanggal 14 Desember 2002.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Riau Bagian Selatan yang terdiri dari empat kabupaten, yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hulu
2. Kabupaten Indragiri Hilir
3. Kabupaten Kuantan Singingi
4. Kabupaten Pelalawan

1.5.2 Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansi dalam mengkaji potensi kerjasama kabupaten sebagai perwujudan konsep regionalisasi Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan, dibatasi pada lingkup substansial sebagai berikut :

1. Fenomena perkembangan wilayah, potensi, dan permasalahan di wilayah Riau Bagian Selatan
2. Konsep regionalisasi sebagai pendekatan dalam pembangunan wilayah Riau Bagian Selatan
3. Sektor-sektor strategis yang dimiliki masing-masing kabupaten yang mempunyai peluang untuk dikerjasamakan di wilayah Riau Bagian Selatan
4. Bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan di wilayah Riau Bagian Selatan

1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

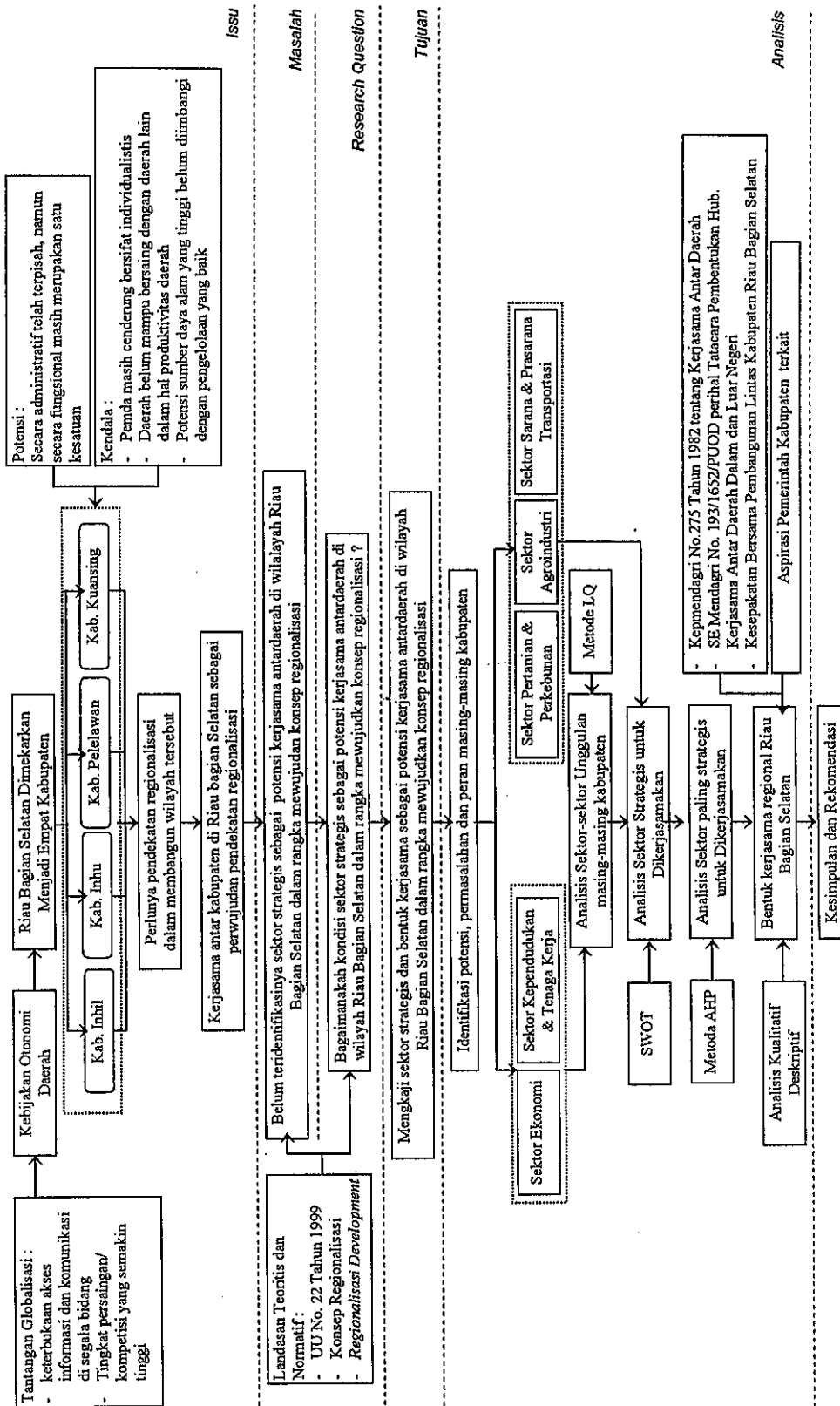
Paradigma otonomi daerah membawa konsekuensi bahwa setiap pemerintah lokal harus mempunyai sumber daya yang mantap untuk menghadapi tantangan tersebut. Salah satu upaya untuk mempersiapkan daerah adalah dengan melakukan pemekaran wilayah. Hal itu pula yang terjadi di wilayah Riau Bagian Selatan, yang dimekarkan menjadi empat kabupaten.

Meskipun secara administratif keempat kabupaten tersebut telah terpisah, tetapi secara fungsional masih merupakan satu kesatuan, yang mana masing-masing kegiatan perekonomian maupun pembangunan yang dilaksanakan masih memiliki ketergantungan dan saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian apabila pembangunan dilaksanakan secara sendiri-sendiri, maka tidak akan berjalan optimal, bahkan dimungkinkan akan terjadi “kepincangan” yang selanjutnya akan memungkinkan munculnya konflik antar daerah. Selain itu, terdapat kendala yang menghambat pembangunan daerah setelah dimekarkan. Diantaranya adalah Pemerintah Daerah yang masih cenderung bersifat individualistis, daerah belum mampu bersaing dengan daerah lain dalam hal produktivitas daerah, dan potensi sumber daya alam yang tinggi belum diimbangi dengan pengelolaan yang baik.

Dalam konteks pembangunan wilayah Riau Bagian Selatan, konsep regionalisasi dapat digunakan sebagai pendekatan pembangunan. Hal itu didasarkan pada kondisi dimana masing-masing kabupaten mempunyai potensi dan keterbatasan yang satu dengan yang lain tidak sama. Dengan adanya perbedaan tersebut selanjutnya memunculkan sifat komplementaritas yang akan menyebabkan terjadinya interaksi. Interaksi ini dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam membentuk regionalisasi. Adapun regionalisasi itu sendiri dapat diwujudkan dalam suatu kerjasama antar kabupaten yang bersangkutan.

Namun terdapat permasalahan dalam mewujudkan kerjasama antar kabupaten tersebut, yang mana sektor yang paling strategis untuk dikerjasamakan serta bentuk kerjasama yang disepakati bersama belum diketahui. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut yang bertujuan untuk menentukan sektor pembangunan yang paling strategis untuk dikerjasamakan serta bentuk kerjasama yang disepakati dengan pendekatan regionalisasi dalam kerangka otonomi daerah.

Sebagai langkah pertama, dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi, permasalahan, dan peran masing-masing kabupaten dalam lingkup intern kabupaten maupun dalam lingkup regional. Dari indentifikasi tersebut dapat diketahui sektor-sektor yang menjadi penggerak perekonomian kabupaten. Sektor-sektor tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan sektor-sektor yang merupakan sektor unggulan/sektor basis pada masing-masing kabupaten dengan bantuan metode LQ. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mencari sektor-sektor yang strategis yang nantinya dapat dikerjasamakan dengan menggunakan analisa SWOT serta mempertimbangkan kebijakan yang berlaku di masing-masing kabupaten. Setelah itu, dilakukan analisis untuk menentukan sektor yang paling strategis untuk dikerjasamakan dengan menggunakan metode AHP. Pada bagian akhir adalah merekomendasikan bentuk kerjasama antar kabupaten pada sektor yang telah dipilih dengan analisis deskriptif kualitatif yang mempertimbangkan aspirasi masing-masing kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran studi berikut ini:



GAMBAR 1.1. KERANGKA PEMIKIRAN STUDI POTENSI KERJASAMA REGIONAL RIAU BAGIAN SELATAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN WILAYAH

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tahapan Penelitian

Untuk melaksanakan studi ini, maka terdapat beberapa tahapan kegiatan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kajian terhadap hubungan antar wilayah dan regionalisasi dalam pembangunan wilayah berdasarkan kajian literatur.
2. Identifikasi aktivitas wilayah, yang meliputi aktivitas transportasi, industri, perdagangan, dan ekonomi masyarakat untuk mengetahui besarnya kontribusi yang disumbangkan oleh adanya aktivitas tersebut terhadap pembangunan wilayah.
3. Mengenal permasalahan-permasalahan dan konflik antar kepentingan kabupaten maupun antar sektor yang terjadi, sebagai akibat adanya aktivitas seperti tersebut di atas.
4. Identifikasi karakteristik kondisi fisik dan non-fisik wilayah penelitian dikaitkan dengan potensi dan permasalahan yang terjadi, yang selanjutnya akan digunakan sebagai input dalam penentuan sektor-sektor yang menjadi unggulan masing-masing kabupaten.
5. Identifikasi sektor-sektor strategis untuk dikembangkan menjadi bidang kerjasama antar kabupaten dengan metode analisis SWOT dan AHP serta mempertimbangkan kepentingan tiap kabupaten dan peran/kedudukan kabupaten terhadap kabupaten lainnya maupun terhadap propinsi.
6. Mengkaji bentuk kerjasama antar kabupaten berdasarkan sektor strategis yang terpilih dan kepentingan wilayah yang bersangkutan, dalam rangka mendukung pembangunan wilayah.

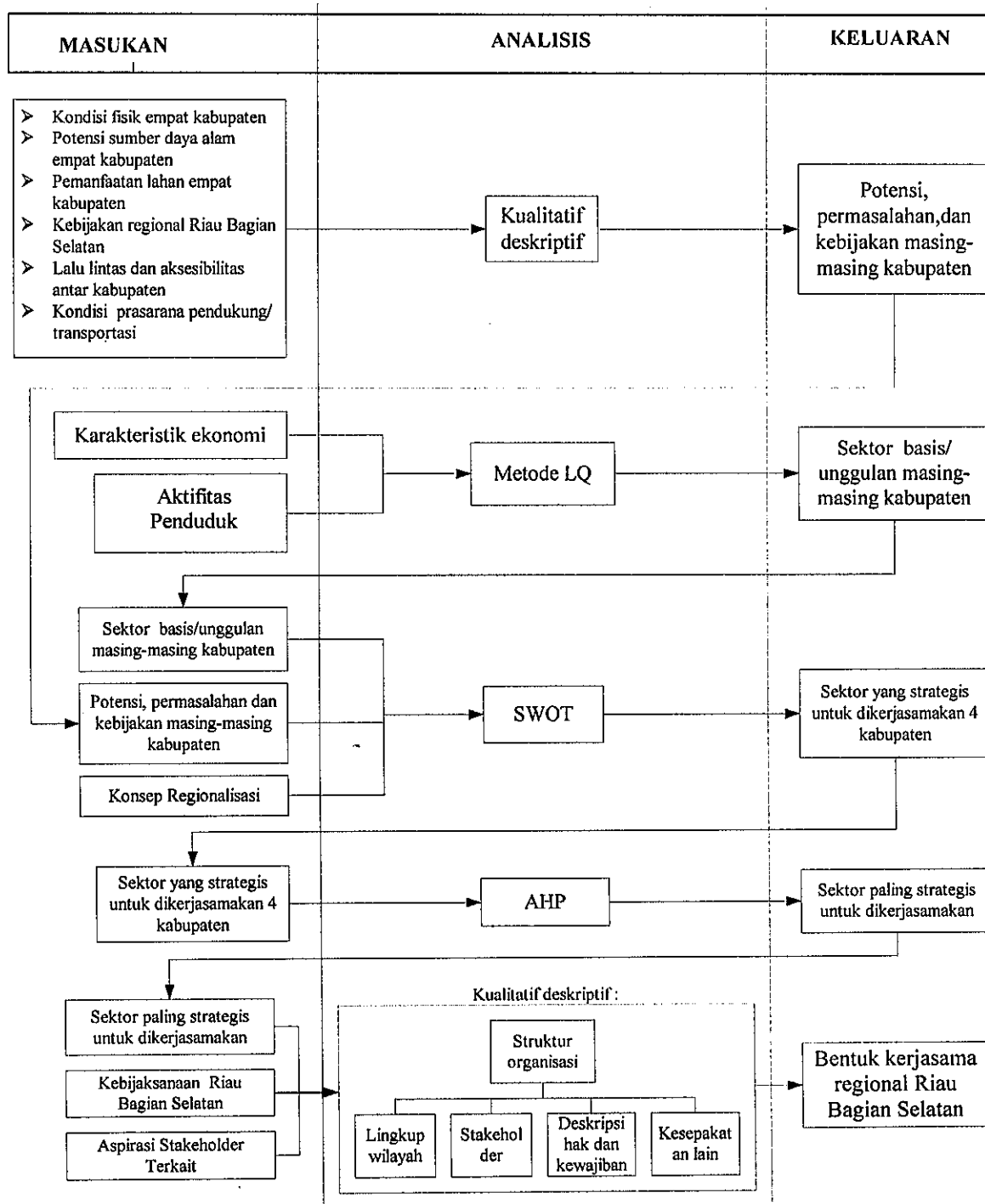
Pelaksanaan tahap demi tahap dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang aktivitas wilayah pada sektor-sektor tertentu serta hubungan antar wilayah, yang kemudian akan ditunjang dengan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis yang telah ditentukan.

1.7.2 Metode Analisis

Metode analisis digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah, termasuk masalah di bidang perencanaan. Dalam studi kali ini, metode analisis yang digunakan adalah berikut ini :

a. Tahapan Analisis

Proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR 1.2
KERANGKA ANALISIS PENELITIAN
POTENSI KERJASAMA REGIONAL RIAU BAGIAN SELATAN SEBAGAI
UPAYA PEMBANGUNAN WILAYAH
Sumber : Hasil Analisis, 2004

b. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam melakukan proses analisis merupakan metode kuantitatif, yaitu sebagai berikut :

1. Metode LQ

Model analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi yang menjadi sektor basis pada tiap kabupaten yang menjadi obyek penelitian. Selain itu , dengan model ini dapat diketahui perkembangan yang dialami masing-masing sektor dalam kurun waktu tertentu.

Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu wilayah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:

- a. Kegiatan industri yang melayani pasar di wilayah itu sendiri maupun di luar wilayah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan industri basis.
- b. Kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di wilayah tersebut, jenis ini dinamakan industri non basis atau industri lokal.

Dasar pemikiran teknik ini adalah adalah teori basis ekonomi yang intinya adalah karena industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di wilayah maupun luar wilayah yang bersangkutan, maka penjualan keluar wilayah akan menghasilkan pendapatan bagi wilayah tersebut.

Kriteria penggolongan dapat bermacam-macam sesuai dengan keperluan. Misalnya dapat dilihat dari aspek kesempatan kerja, maka ukuran dasar yang dipakai adalah jumlah tenaga kerja yang diserap. Jika dilihat dari usaha menaikkan pendapatan daerah, maka ukuran dasar yang dipakai adalah kenaikan yang diciptakan di daerah.

Rumus yang digunakan adalah :

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt}$$

vi : pendapatan/tenaga kerja sektor i pada tingkat kabupaten

vt : pendapatan/tenaga kerja total pada tingkat kabupaten

Vi : pendapatan/tenaga kerja sektor i pada tingkat regional

Vt : pendapatan/tenaga kerja total pada tingkat regional

Keterangan :

- a. LQ suatu sektor > 1 , maka sektor tersebut merupakan sektor basis
- b. LQ suatu sektor < 1 , maka sektor tersebut merupakan sektor non basis
- c. LQ suatu sektor $= 1$, maka sektor tersebut telah mencukupi dalam kegiatan tertentu (seimbang)

Asumsi pada metode ini adalah :

1. Semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat regional (pola pengeluaran secara geografis sama), serta produktivitas tenaga kerja sama
2. Permintaan wilayah kabupaten akan suatu barang akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah, sedangkan kekurangannya diimpor dari wilayah lain.

Disamping itu, metode LQ dapat memberikan manfaat lain, yaitu :

- a. *Income*, merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui keterkaitan antar lokasi industri dan pasaran umum hasil produksi. Jarak antara lokasi industri dan pasar akan mempengaruhi harga produk, sehingga secara

langsung maupun tidak akan mempengaruhi income (pendapatan) masyarakat.

- b. *Value Added*, biasa digunakan dalam PDRB untuk membandingkan kemampuan suatu sektor di daerah tertentu (kabupaten) dengan produksi keseluruhan dalam sektor tersebut pada tingkat yang lebih luas (misalnya propinsi).
- c. Wilayah Daerah (Ha), dapat pula digunakan untuk mengukur kemampuan dari adanya alih fungsi lahan. Seberapa besar kemampuan suatu lahan dalam mendukung perkembangan dalam sektor pembangunan tertentu, atau seberapa besar lahan yang ada dapat dialihfungsikan tanpa harus meninggalkan/mengurangi daya dukungnya terhadap proses pembangunan secara keseluruhan.
- d. Penduduk, dalam menilai tingkat kesejahteraan dan keseimbangan pendapatan per kapita. Dengan demikian akan diketahui apakah tingkat kesejahteraan dan pendapatan per kapita penduduk di suatu daerah (kabupaten) berbanding secara seimbang dengan kemampuan per kapita penduduk di lingkungan yang lebih luas lagi (propinsi atau nasional) (Riyadi, 2002 : 188).

2. Analisis SWOT

Metode ini digunakan untuk menganalisis potensi dan permasalahan yang ada di wilayah studi. Analisis ini diharapkan dapat menunjukkan identifikasi sektor-sektor strategis yang dapat dikerjasamakan pada wilayah penelitian. Dasar yang digunakan dalam analisis ini adalah berbagai potensi dan kendala

yang penting menjadi suatu strategi untuk menentukan sektor-sektor yang potensial untuk dikerjasamakan. Alat analisis yang digunakan meliputi *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*.

Potensi merupakan keunggulan sumber daya, ketrampilan, kemampuan, atau aspek internal lainnya yang dimiliki. Permasalahan lainnya adalah kelemahan atau keterbatasan atau ketidakefisienan dalam sumber daya, ketrampilan, kemampuan, atau aspek internal lainnya yang menghalangi daya guna efektif. Peluang merupakan situasi paling diinginkan. Sebaliknya tantangan/ancaman merupakan situasi yang paling tidak diinginkan dalam suatu kawasan atau wilayah.

Analisis SWOT digunakan agar mempermudah dalam :

- Memberikan gambaran tentang permasalahan yang perlu diindikasikan untuk keperluan tertentu.
- Menganalisis hubungan antar permasalahan.
- Memberikan skenario keadaan sekarang dan masa yang akan datang, yang mana penjelasan tiap-tiap potensi dan permasalahan dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif (*strength, weakness, opportunity, threat*).

Metode ini bersifat relatif kualitatif, sehingga bersifat kurang obyektif. Agar analisis yang dilakukan menjadi lebih obyektif, maka sebelum menyusun matriks untuk menghasilkan strategi, dilakukan penilaian/pembobotan. Penilaian/pembobotan ini digunakan untuk menentukan faktor strategis, baik internal (*strength* dan *weakness*) maupun eksternal (*opportunities* dan *threat*). Penilaian/pembobotan dimulai dari skala 1 – 6, yang mana skala

tersebut menunjukkan bahwa faktor tersebut bernilai tidak penting – sangat penting.

Setelah faktor strategi internal dan eksternal dapat ditentukan, maka masing-masing faktor yang sebelumnya dilihat secara terpisah, kemudian digabungkan dalam matriks (2 x 2) .

Dari proses analisis SWOT akan menghasilkan beberapa strategi, antara lain :

1. Strategi SO, yang digunakan untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal.
2. Strategi WO, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan eksternal.
3. Strategi ST, bertujuan untuk untuk memperkecil dampak yang akan terjadi dari lingkungan eksternal.
4. Strategi WT, bertujuan untuk memperkuat diri dalam usaha untuk memperkecil kelemahan internal dan mengurangi tantangan eksternal.

3. Analisis Metode AHP

AHP (*Analytical Hierarchy Process*) merupakan salah satu metode analisis yang dipergunakan untuk membuat keputusan dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan melalui cara yang sederhana, kreatif, fleksibel namun tetap menjamin konsistensi keputusan yang dihasilkan.

Pada dasarnya metode AHP ini berupaya untuk memecah-mecah suatu situasi yang kompleks, tak terstruktur ke dalam bagian-bagian komponennya, menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hierarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subyektif tentang relatif pentingnya setiap variabel dan

mensistesis berbagai pertimbangan ini, untuk kemudian menetapkan variabel yang menjadi prioritas tertinggi dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan menggunakan metode ini, penentuan pengambilan keputusan mengacu kepada seperangkat kriteria/alternatif yang didasarkan kepada perhitungan perbandingan (matriks perbandingan). Terdapat tiga prinsip dasar yang dipergunakan dalam metode AHP ini, yaitu sebagai berikut :

- Menyusun hierarki, proses untuk menyusun realitas yang kompleks ke dalam bagian yang menjadi elemen pokoknya, yang mana bagian ini dimasukkan ke dalam bagian lainnya, sehingga pada akhirnya tersusun pola yang hierarkis.
- Menentukan prioritas, dalam konteks ini elemen pada tingkat yang lebih tinggi berfungsi sebagai suatu kriteria yang disebut sifat (*property*). Hasil dari proses pembedaan ini adalah suatu vektor prioritas.
- Konsistensi logis, yang mana dalam mempergunakan prinsip metode AHP ini memasukkan aspek kualitatif maupun kuantitatif. Aspek kualitatif berfungsi untuk mendefinisikan persoalan dan hierarkinya, sedangkan aspek kuantitatif berfungsi untuk mengekspresikan penilaian dan preferensi secara ringkas dan padat.

Dasar perhitungan yang dilakukan dalam metode AHP ini dimulai dari penyusunan hierarki, penentuan prioritas, dan pemberian bobot. Ketiga hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun hierarki, yaitu dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman akan suatu masalah. Dengan memecahkan realitas bagian ini menjadi beberapa gugusan homogen dan membagi ke bagian yang lebih kecil,

maka dapat memadukan informasi yang didapat ke dalam struktur masalah yang membentuk gambaran lengkap dari keseluruhan sistem.

2. Menentukan prioritas, yaitu dilakukan setelah menyusun hierarki berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Penentuan prioritas merupakan dilakukan dengan menetapkan hubungan elemen dari tingkatan hierarki yang ada dengan membandingkan elemen terhadap pasangannya. Hubungan dari setiap hierarki digambarkan melalui keterkaitan antara pengaruh relatif elemen tingkat hierarki tertentu terhadap setiap elemen pada tingkat tinggi. Pada elemen tingkat tinggi berfungsi sebagai suatu kriteria yang disebut sebagai sifat (*property*). Hasil dari proses tersebut adalah suatu vektor prioritas yang relatif penting.
3. Pemberian bobot, pemberian bobot dalam metode AHP dimaksudkan untuk melihat prioritas dalam pengambilan keputusan dengan sederetan kriteria atau alternatif yang ditentukan melalui perbandingan masing-masing kriteria yang diberi bobot dari skala terendah hingga tertinggi (1 – 9), yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

TABEL I.1
PEMBOBOTAN NILAI DALAM METODE AHP

Intensitas Bobot	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Kedua elemen menyumbangkan sama besar pada sifat tersebut
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dibandingkan yang lain	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya
5	Elemen yang satu sangat penting dibandingkan yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas yang lain
7	Satu elemen jelas lebih dari elemen yang lainnya	Satu elemen disokong dengan kuat, dan dominannya telah terlihat dalam praktek
9	Satu elemen mutlak lebih penting dibandingkan lainnya	Bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai antara diantara 2 pertimbangan yang berdekatan	Kompromi diperlukan antara 2 pertimbangan

Sumber : Saaty, 1993

Secara singkat, langkah-langkah dasar dalam menyelesaikan permasalahan metode AHP antara lain :

- a. Mendefinisikan persoalan dan rumusan permasalahan yang akan diangkat.
- b. Menyusun hierarki dari sudut pandang manajerial menyeluruh.
- c. Membuat matriks perbandingan untuk kontribusi atau elemen yang relevan atas kriteria berpengaruh dan berada setingkat di atasnya.
- d. Mendapatkan semua pertimbangan untuk mengembangkan perangkat matriks pada langkah c.
- e. Mencari prioritas dan menguji konsistensi setelah mengumpulkan semua data dan memasukkan nilai kebalikannya beserta entri bilangan 1 sepanjang diagonal utama.
- f. Melaksanakan langkah c, d, dan e untuk semua tingkat dan gugusan dalam hierarki itu.

- g. Menggunakan komposisi secara hierarki sintesis untuk membobotkan vector-vektor prioritas dengan bobot kriteria-kriteria dan menjumlahkan semua entries prioritas dari tingkat lawan berikutnya sehingga hasilnya adalah vektor prioritas menyeluruh untuk tingkat hierarki yang paling bawah.
- h. Mengevaluasi konsistensi seluruh hierarki dengan mengalikan prioritas kriteria yang bersangkutan dan menjumlahkan hasil kalinya kemudian dibagi dengan pernyataan sejenis yang menggunakan indeks konsistensi acak yang sesuai dengan dimensi masing-masing matriks.

Dalam metode AHP ini hierarki yang dibuat dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Hierarki struktural

Hierarki ini diperoleh dari pokok sifat struktural

- b. Hierarki fungsional

Hierarki ini menguraikan sistem yang kompleks menurut hubungan esensial

Dalam analisis metode AHP ini, penetapan variabel penelitian dilakukan setelah analisis SWOT, karena input untuk analisis ini adalah output analisis SWOT. Adapun keluaran yang dihasilkan oleh analisis metode AHP adalah berupa sektor yang dianggap paling strategis untuk dikerjasamakan, sehingga menjadi sektor yang diutamakan dalam menjalin kerjasama antar kabupaten di Riau Bagian Selatan.

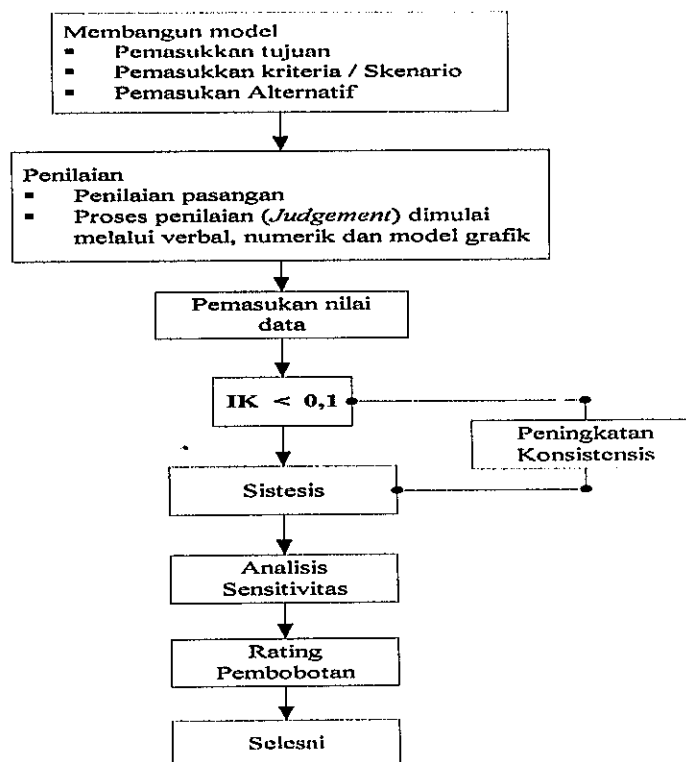
Program Expert Choise

Expert Choise merupakan software pendukung yang berfungsi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan multikriteria yang mendasarkan kepada prinsip metode AHP yakni menyusun hirarki, menentukan prioritas, dan konsistensi logis. Dengan penggunaan *expert choise* akan sangat memudahkan dalam melakukan analisa yang dimulai dari penyusunan hirarki berdasarkan tujuan, kriteria maupun alternatif yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya hirarki model tersebut akan memudahkan dalam melakukan penilaian perbandingan berpasangan dari tingkat kepentingan suatu kriteria serta preferensi-preferensi untuk setiap alternatif. Disamping itu, *Expert Choise* akan membantu dalam penilaian dengan melakukan perbandingan berpasangan yang memungkinkan untuk menentukan nilai kuantitatif dari kriteria dan alternatif-alternatif.

Adapun langkah-langkah dalam menggunakan *Expert Choise*, yaitu :

1. Membangun model, yaitu dengan menyusun tujuan, kriteria maupun alternatif yang telah diidentifikasi kedalam sebuah hirarki tabel
2. Melakukan perbandingan berpasangan yang merupakan langkah untuk membandingkan kepentingan relatif untuk preferensi atau kemungkinan antar elemen pada tingkat di atasnya.
3. Melakukan penilaian terhadap setiap perbandingan berpasangan untuk mengetahui tingkat kepentingan antar dua kriteria yang pada tahap selanjutnya dilakukan pengujian terhadap besarnya nilai IK (Indeks Konsistensi). Semakin kecil IK ($IK < 0,1$) maka tingkat konsistensi semakin tinggi sedangkan semakin besar IK ($IK \geq 0,1$) mencerminkan tidak konsistennya penilaian yang diberikan oleh responden sehingga diperlukan upaya peningkatan nilai IK yang ada.

4. Melakukan sintesis yaitu suatu proses untuk *generate* bobot keseluruhan dari node-node dalam hirarki dengan menggunakan prioritas-prioritas.
5. Analisis sensitivitas, digunakan untuk mengetahui seberapa besar sensitivitas dari alternatif terhadap perubahan dari kepentingan kriteria.
6. Rating, yaitu langkah yang digunakan dengan pendekatan-pendekatan skala tingkatan sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas.



GAMBAR 1.3
TAHAPAN AHP DENGAN MENGGUNAKAN EXPERT CHOISE

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dalam studi kali ini, responden yang dipilih adalah responden yang mempunyai status sebagai pejabat utama pemerintah pada instansi yang terkait langsung dengan perencanaan dan pengembangan di kabupaten-kabupaten wilayah Riau Bagian Selatan, sehingga benar-benar mengerti permasalahan yang dihadapi. Adapun responden yang dipilih terdiri dari orang yang mewakili unsur instansi, sebagai berikut :

- Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi
- Dinas Pertanian Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi
- Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Tentang “Kajian Potensi Kerjasama Antar daerah di Riau Bagian Selatan sebagai Upaya Potensi Regionalisasi” disusun berdasarkan pembahasan yang dibagi dalam lima bab, yang masing-masing secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Bab ini untuk menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian untuk membatasi pembahasan materi maupun wilayah, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan potensi kerjasama regional sebagai upaya pembangunan wilayah berupa pengertian maupun teori.

BAB III : Bab ini menyajikan mengenai : gambaran umum wilayah studi, gambaran umum wilayah studi meliputi karakteristik masyarakat, potensi dan sumber

daya yang dimiliki, serta kebijaksanaan yang ada; merumuskan pendekatan-pendekatan yang dibutuhkan dalam mengkaji sektor-sektor apa yang berpotensi untuk dikerjasamakan sebagai masukan dalam menentukan bentuk kerjasamanya guna mendukung terbentuknya regionalisasi.

BAB IV : Pada bab ini membahas proses analisis yang dilakukan dan hasil yang dicapai sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan, yaitu potensi kerjasama regional di wilayah Riau Bagian Selatan

BAB V : Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang dicapai berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta rekomendasi yang diberikan terhadap kesimpulan yang dibuat



MAGISTER PERENCANAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PETA

ORIENTASI WILAYAH STUDI

POTENSI KERJASAMA REGIONAL RIAU
BAGIAN SELATAN SEBAGAI UPAYA
PEMBANGUNAN WILAYAH

Legenda :

- Batas Propinsi
- Propinsi Riau
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Ibukota Propinsi
- Ibukota Kabupaten
- Wilayah Studi

Utara



SKALA

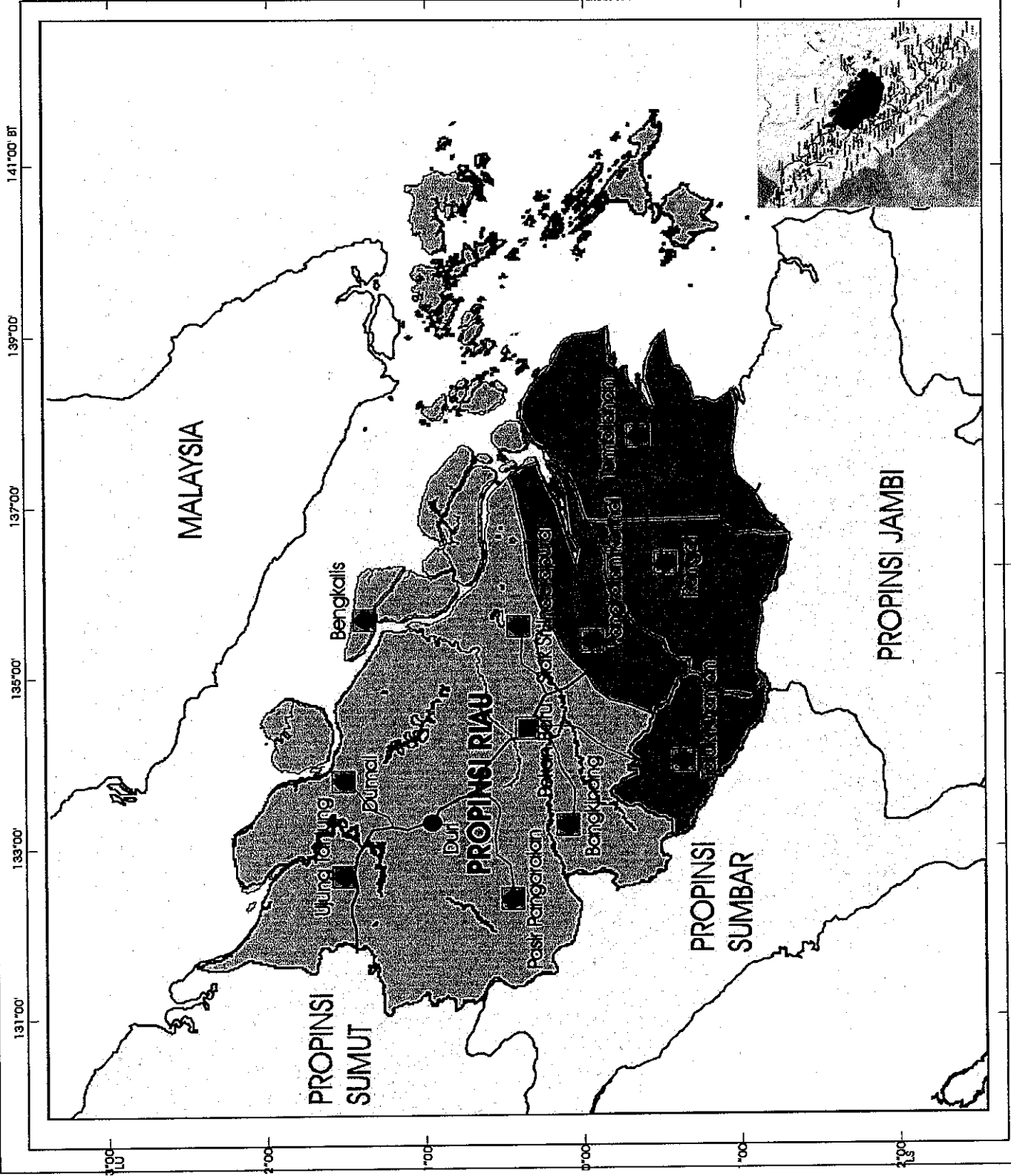


No. Peta

1.1 hal. 31

Sumber :

DINAS KIMPRASWIL PROPINSI RIAU



BAB II

KAJIAN KERJASAMA ANTARDAERAH SEBAGAI PERWUJUDAN KONSEP REGIONALISASI

2.1 Tinjauan Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah tertentu. Tujuan pengembangan wilayah mengandung dua sisi yang saling berkaitan. Di sisi sosial ekonomis, pengembangan wilayah adalah upaya memberikan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik, dan sebagainya. Di sisi lain, secara ekologis pengembangan wilayah juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sebagai akibat dari campur tangan manusia terhadap lingkungan (Triutomo, 1999).

Telah banyak definisi tentang pengembangan wilayah, seperti salah satu yang didefinisikan oleh Prod'homme (1985), bahwa pengembangan wilayah merupakan program menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah. Dari definisi di atas tersirat beberapa kata kunci yang harus terdapat dalam pengembangan wilayah, yaitu :

- Program yang menyeluruh dan terpadu
- Sumber daya yang tersedia dan kontribusinya terhadap wilayah
- Suatu wilayah tertentu (Triutomo, 1999)

Pengembangan wilayah merupakan kondisi dinamis yang terjadi akibat adanya pemanfaatan potensi sumber daya yang berbeda yang dimiliki oleh suatu wilayah. Dalam perkembangannya, perbedaan potensi antarwilayah membawa konsekuensi terhadap perkembangan aktifitas ekonomi didalamnya sebagai penggerak perkembangan wilayah.

Pada awalnya, dengan sumber daya yang beragam wilayah lebih potensial untuk berkembang, sebaliknya wilayah yang kurang memiliki sumber daya cenderung kurang berkembang dan mengalami pertumbuhan yang lambat. Dalam tahap selanjutnya, kondisi dan potensi fisik ini mulai bergeser peranannya digantikan oleh faktor sosial dan ekonomi.

2.2 Konsep Perwilayahan

Dalam melakukan studi mengenai bidang perencanaan wilayah, hal yang perlu dijelaskan adalah beberapa konsep tentang wilayah (*region*). John Glasson (1977) mengemukakan konsep tentang wilayah sebagai metode klasifikasi yang muncul melalui dua fase yang berbeda, yaitu yang mencerminkan kemajuan ekonomi dari perekonomian sederhana ke sistem industri yang kompleks. Pada fase pertama memperlihatkan “wilayah formal” yaitu berkenaan dengan keseragaman dan didefinisikan menurut homogenitas. Fase kedua memperlihatkan perkembangan “wilayah fungsional” yaitu berkenaan dengan interdependensi, saling hubungan antara bagian-bagian dan didefinisikan menurut koherensi fungsional.

Wilayah formal adalah wilayah geografik yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu. Pada awalnya kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan daerah formal, terutama adalah bersifat fisik seperti topografi, iklim dan vegetasi dikaitkan dengan konsep determinasi geografik. Tetapi berikutnya terjadi peralihan kepada penggunaan kriteria ekonomi, seperti tipe industri atau tipe pertanian. Wilayah alamiah adalah wilayah formal fisik. Perhatian kepada bentuk klasifikasi wilayah ini sebagian timbul karena adanya kenyataan bahwa faktor-faktor fisik lebih stabil dari pada faktor ekonomi dinamik dan dengan demikian lebih mudah untuk dipelajari. Sedang wilayah formal ekonomi pada umumnya didasarkan pada tipe-tipe industri atau pertanian, walaupun latar belakang sifat fisik sudah barang tentu tidak dapat diabaikan. Usaha-usaha yang dilakukan pada waktu-

waktu berikutnya untuk menentukan batas daerah-daerah formal ekonomi telah didasarkan pada kriteria seperti tingkat pendapatan, tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan ekonomi.

Wilayah fungsional adalah wilayah geografik yang memperlihatkan suatu koherensi fungsional tertentu, suatu interdependensi dari bagian-bagian, bila didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu. Wilayah fungsional ini kadang-kadang disebut sebagai Wilayah nodal atau *polarised region* dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan.

Wilayah formal atau wilayah fungsional ataupun gabungan keduanya memberikan suatu kerangka bagi klasifikasi tipe wilayah yang ketiga yaitu wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan merupakan wilayah geografik yang cocok untuk perencanaan dan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan untuk memecahkan persoalan-persoalan wilayah.

Klasifikasi tentang wilayah diatas tidak jauh berbeda dengan klasifikasi yang dikemukakan oleh Richardson (1979) yang membagi wilayah atas tiga tipe yaitu :

- Wilayah Homogen

Wilayah dilihat dari segi kesamaan karakteristik serta dimana perbedaan internal dan interaksi intraregional dianggap bukan sesuatu yang penting. Wilayah homogen menunjukkan bahwa beberapa daerah berkumpul membentuk sebuah wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Dalam konsep wilayah homogen, hubungan regional yang didasari oleh ekonomi lebih penting dari pada perbedaan intraregional.

- Wilayah Nodal (*Polarized*)

Pada wilayah ini keseragaman hanya sedikit diperhatikan. Keterpaduan merupakan hasil dari aliran-aliran internal, hubungan dan saling ketergantungan biasanya

terpolarisasi menuju ke sebuah pusat (*node*) yang dominan. Dalam konsep ini dipahami bahwa ruang ekonomi sangatlah heterogen. Penduduk dan industri tidak tersebar di seluruh lokasi tetapi berkumpul pada lokasi-lokasi yang spesifik. Pada tingkat regional, wilayah disusun oleh titik-titik yang heterogen dengan ukuran berbeda-beda (kota besar, kota kecil, desa) yang berkaitan secara fungsional.

- Wilayah Perencanaan

Dalam konsep ini kesatuan diperoleh dari kontrol politik atau *administrative*. Wilayah perencanaan lebih mudah dipahami sebagai sebuah daerah dimana kebijaksanaan ekonomi diterapkan, dan hal ini merupakan satu-satunya kekuatan yang menyatukan. Ukuran wilayah perencanaan yang optimal dibedakan dengan panjang waktu perencanaan.

Pengertian wilayah lainnya, ditinjau dari aspek ekonomi juga mempunyai tiga pengertian, yaitu :

- Suatu wilayah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Wilayah dalam pengertian seperti ini disebut wilayah homogen.
- Suatu wilayah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Wilayah dalam pengertian ini disebut wilayah nodal.
- Suatu wilayah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Jadi wilayah di sini didasarkan pada pembagian administratif suatu negara. Wilayah dalam pengertian seperti ini dinamakan wilayah perencanaan atau wilayah administrasi (Arsyad, 1999 :107-108).

Definisi wilayah yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya hampir sama. Definisi wilayah secara garis besar diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah perencanaan. Berkaitan dengan konteks studi kali ini, maka wilayah studi termasuk dalam wilayah perencanaan. Pada wilayah studi telah diterapkan rencana pembangunan, baik yang sifatnya terbatas pada batas administratif maupun rencana fungsional yang melibatkan interaksi antarwilayah kabupaten.

2.3 Konsep Regionalisasi dalam Pengembangan Wilayah

Pembangunan wilayah saat ini sangat dipengaruhi paradigma otonomi daerah yang muncul seiring dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999. Implikasinya adalah dalam hal mekanisme pembangunan, yang sebelumnya bersifat sentralistis berubah menjadi desentralistis. Agar penerapan otonomi daerah di Indonesia dapat berhasil, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Adanya pemahaman bahwa otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan secara utuh. Artinya, seluas apapun otonomi daerah diterapkan, pada prakteknya tetap tidak akan terlepas dari kerangka sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Adanya pemahaman bahwa untuk dapat melaksanakan otonomi daerah secara baik dan benar diperlukan adanya *political will* (kemauan politik) dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemerintah daerah.
- Adanya komitmen bersama untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan aturan yang berlaku, guna mencapai suatu tujuan yang diharapkan (Riyadi, 2003 : 339-341).

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak suatu daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *outonomos*, yang berarti pengaturan sendiri/keputusan sendiri (*self ruling*). Otonomi pada dasarnya tidak hanya merupakan hak, melainkan juga kewajiban yang harus dijalankan, seperti dituangkan dalam penjelasan UU No. 5 tahun 1974 (Riyadi, 2003 : 345). Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kondisi masing-masing daerah, mengingat tiap daerah mempunyai potensi dan permasalahan yang tidak sama.

Implementasi otonomi daerah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kondisi dan permasalahan tiap wilayah yang beragam, kemampuan dan kinerja institusi penyelenggara pembangunan yang masih kurang siap dalam menjalankan mekanisme baru tersebut, serta pemahaman mengenai esensi otonomi daerah itu sendiri yang kurang baik. Akibatnya, terdapat kecenderungan pembangunan yang dilaksanakan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, timbul sifat egosentris pada daerah karena adanya persaingan antardaerah dalam menarik investasi untuk memajukan daerahnya.

Setiap daerah secara individu mempunyai sistem pengolahan sumber daya alam, tenaga kerja, dan produksi yang merupakan kegiatan pengembangan potensi daerah (Warpani, 1984:67). Namun pada dasarnya tidak ada daerah yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Mengingat setiap daerah mempunyai keunggulan dan keterbatasan yang berbeda satu sama lain, sehingga terdapat hubungan saling ketergantungan antara daerah satu dengan yang lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Losch, bahwa antara wilayah satu dengan yang lainnya akan terjadi saling ketergantungan (*interdependency*) melalui mekanisme pasar (hubungan *supply-demand*) (Winarso, 2002 : 12).

Dengan mencermati dinamika pembangunan yang terjadi di wilayah Riau Bagian Selatan dikaitkan dengan konsekuensi dari bergulirnya otonomi daerah, maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perwilayahan (regionalisasi). Regionalisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah pengelompokan beberapa daerah menjadi satu wilayah pembangunan. Hal itu didasarkan pada adanya keterkaitan antardaerah tersebut, antara lain dalam hal kegiatan produksi, perdagangan, jasa, keuangan, hubungan sosial, sistem prasarana wilayah, dan sebagainya. Regionalisasi ini dipandang perlu sebagai suatu pendekatan untuk menjamin tercapainya pembangunan yang serasi, selaras, dan seimbang baik antar sektor di dalam suatu wilayah pembangunan maupun antarwilayah pembangunan (Winarso, 2002 : 12). Mengingat bahwa kemampuan dan potensi tiap daerah tidak sama, maka dalam otonomi daerah pendekatan ini akan sangat membantu dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.

Dalam konteks regionalisasi, sudut pandang ekonomi relatif dominan digunakan, diantaranya konsep kutub pertumbuhan (pusat pertumbuhan) yang dipakai sebagai acuan dalam pembangunan wilayah. Dalam konsep ini, terdapat sektor tertentu yang menjadi *leading sector*, yaitu sektor yang dapat merangsang perkembangan sektor-sektor lainnya. Keberadaan *leading sector* sebagai sektor basis pada suatu wilayah dianggap mampu memberikan manfaat secara ekonomis, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan wilayah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan adalah konsep pusat pertumbuhan wilayah (*growth pole*) dari Perroux. Teori ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori Tempat Pusat yang dikemukakan oleh Christaller. Teori Perroux menyarankan perlunya untuk memusatkan investasi dalam sejumlah sektor kecil sebagai sektor kunci di beberapa tempat tertentu. Dalam memusatkan usaha pada

sejumlah sektor dan tempat yang kecil diharapkan pembangunan akan menjalar ke sektor-sektor lain pada seluruh wilayah. Dengan demikian sumber daya material dan manusiawi yang digunakan dapat dimanfaatkan lebih baik dan lebih efisien. Adapun sektor kunci yang dimaksud di sini adalah sektor dengan kaitan ke depan atau ke belakang (*backward and forward linkages*). Sektor ini sering juga dinamakan "*leading unit*" yang mempengaruhi perkembangan unit-unit lain dengan stimulasi ataupun hambatan (Daldjoeni, 1992 : 142-143).

Dalam teori pusat pertumbuhan terdapat beberapa aspek yang mengarah kepada berkembangnya hubungan antarwilayah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Keberadaan *leading industries* atau perusahaan propulsif

Aspek ini mampu menimbulkan dorongan pertumbuhan yang nyata terhadap lingkungan sekitarnya. Karakteristik *leading industries* atau perusahaan propulsif umumnya mempunyai kemampuan inovasi yang tinggi dan teknologi yang maju sehingga relatif cepat berkembang. Pada gilirannya, industri ini akan mendominasi unit-unit kegiatan ekonomi lainnya. Dengan kondisi yang demikian, dimungkinkan sektor ekonomi yang lain dapat terpacu perkembangannya karena terbentuknya *forward linkages* ataupun *backwash linkages*.

- Konsep polarisasi

Konsep ini menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari *leading industries* (*propulsive growth*) akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke dalam kutub pertumbuhan. Dengan demikian akan semakin banyak unit ekonomi yang berpeluang untuk berkembang. Hal itu disebabkan karena adanya keuntungan aglomerasi yang memungkinkan kegiatan ekonomi dilakukan secara lebih efisien.

- Konsep *spread effects/trickling down*

Konsep ini menyatakan bahwa pada waktunya, kualitas propulsif dinamik dari kutub pertumbuhan akan memancar keluar dan memasuki ruang di sekitarnya.

Konsep dasar teori pusat pertumbuhan di atas tidak terbentuk begitu saja. Secara implisit, teori tersebut terkait dengan aspek lain, diantaranya aspek lokasi, dan keberadaan sektor ekonomi unggulan, yang selanjutnya memunculkan adanya unsur interaksi spasial dalam suatu ruang yaitu wilayah.

Dibawah ini adalah teori-teori yang mendukung teori pusat pertumbuhan, adalah sebagai berikut :

1. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa terhadap suatu produk lokal dari luar wilayah. pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan wilayah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*).

Strategi pembangunan wilayah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di wilayah tersebut.

Kelemahan teori ini adalah bahwa teori ini didasarkan pada permintaan eksternal.

Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap

kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, teori ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi (Arsyad, 1999:115-118).

Sektor ekonomi basis merupakan motor penggerak pembangunan suatu daerah karena menghasilkan komoditi-komoditi yang dinilai bisa menjadi unggulan, baik tingkat domestik maupun internasional. Ada beberapa kriteria mengenai komoditi unggulan, diantaranya (U. M. Ambardi, 2002 : 104-105) :

- Komoditi unggulan harus mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian. Maksudnya komoditi unggulan tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran.
- Komoditi unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward linkages*) yang kuat, baik sesama komoditi unggulan maupun komoditi-komoditi lainnya.
- Komoditi unggulan mampu bersaing (*competitiveness*) dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya.
- Komoditi unggulan suatu wilayah memiliki keterkaitan dengan wilayah lain (*complementarity*), baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pasokan bahan baku.
- Komoditi unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.

- Komoditi unggulan mampu menyerap tenaga kerja secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
- Komoditi unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran (*increasing*), pertumbuhan (*growth*), puncak (*maturity*), hingga penurunan (*decreasing*).
- Komoditi unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.
- Pengembangan komoditi unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, misalnya dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain.
- Pengembangan komoditi unggulan berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Pendekatan regionalisasi ini menggunakan teori pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan sebagai dasar pembentukan konsepnya.

2. Teori Lokasi

Para ekonom regional sering mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah adalah lokasi. Pernyataan tersebut menjadi relevan jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar. Beberapa variabel yang mempengaruhi kualitas atau suitability suatu lokasi adalah upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan (diklat), kualitas pemerintah daerah dan tanggung jawabnya, dan sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berbeda membutuhkan kombinasi-kombinasi yang berbeda pula atas faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, seringkali masyarakat berusaha untuk menarik

perusahaan-perusahaan industri. Keterbatasan dari lokasi ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang (Arsyad, 1999:115-118).

3. Aspek Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena adanya interaksi sosial (Rapoport, 1982). Menurut Koentjaraningrat (1985), dalam suatu masyarakat terbentuk pola kebudayaan dengan unsur-unsur universal, meliputi sistem religi, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, serta sistem teknologi. Kebudayaan masyarakat tersebut umumnya tercermin dari pola aktivitas pada kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut, berupa ritus-ritus keagamaan, ritus lingkaran hidup, perdagangan, industri, dan interaksi masyarakat.

Konsep dasar teori kutub pertumbuhan secara implisit juga memunculkan unsur interaksi spasial dalam suatu wilayah. Interaksi tersebut selanjutnya merupakan upaya suatu wilayah untuk menciptakan sumber-sumber keunggulan daya saing wilayah tersebut terhadap wilayah lain.

2.4 Interaksi Antarwilayah

Interaksi ini terjadi karena adanya sifat komplementaritas, transferabilitas, dan absennya *intervening opportunities*. Komplementaritas maksudnya adalah perbedaan karakteristik antarwilayah yang saling melengkapi yang selanjutnya melahirkan permintaan dan penawaran. Transferabilitas yang dimaksud disini adalah semakin kecilnya hambatan dalam hal biaya dan waktu, sehingga interaksi antarwilayah relatif lebih mudah. Adapun yang dimaksud dengan absennya *intervening opportunities* adalah tidak adanya

alternatif/pilihan lain dalam hal pemenuhan kebutuhan, sehingga perlu berinteraksi dengan wilayah lain (Daldjoeni, 1992:191).

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Edward Ullman, yang menyatakan bahwa ada tiga faktor yang menjadi dasar terjadinya interaksi keruangan yaitu :

- Komplementaritas regional (wilayah saling melengkapi)

Yaitu adanya wilayah yang berbeda kemampuan sumber dayanya (satu pihak kelebihan, pihak lain kekurangan), sehingga terjadinya aliran yang sangat besar dan membangkitkan interaksi keruangan yang sangat tinggi.

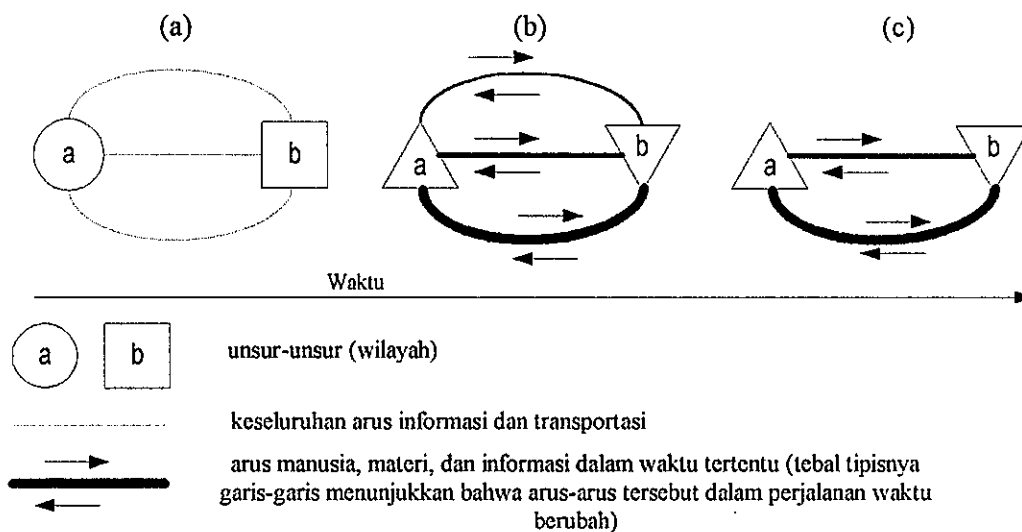
- Kesempatan berinteraksi

Yaitu adanya kemungkinan perantara yang dapat menghambat terjadinya interaksi. Hal ini dapat terjadi karena adanya daerah yang menghambat proses interaksi atau adanya sumber daya yang dapat menghambat arus komoditi keruangan antar dua daerah yang dapat berinteraksi.

- Kemudahan transfer dalam ruang

Yaitu adanya fungsi jarak yang diukur dalam biaya dan waktu yang nyata, juga termasuk karakteristik khusus dari komoditi yang ditransfer. Komoditi yang dihasilkan oleh suatu daerah tertentu dan dibutuhkan oleh daerah lain memiliki nilai transfer yang cukup tinggi. Jarak yang ditempuh, biaya angkut yang memadai dan transformasi yang lancar merupakan kemudahan transfer dalam ruang yang menjamin lancarnya interaksi.

Secara umum, interaksi spasial terdiri dari migrasi, komunikasi, dan transportasi, yang dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



GAMBAR 2.1
PROSES INTERAKSI ANTARWILAYAH

Sumber : Daldjoeni, 1997

Pada gambar (a) menunjukkan adanya gejala saling keterlibatan dua unsur/wilayah karena sifat-sifat masing-masing unsur yang komplementaris. Selanjutnya pada gambar (b) menjelaskan bahwa saling keterlibatan tersebut menciptakan arus yang berupa migrasi, komunikasi, dan transportasi (jika terpenuhi transferabilitas dan absennya alternatif). Seiring dengan berjalannya waktu, maka pada gambar (c) terjadi perubahan dalam hal lokasi, dan sifat-sifat wilayah yang saling terlibat dan juga dalam arus itu sendiri.

Dalam pengembangan wilayah, interaksi spasial terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut (Rondinelli, 1978) :

1. Keterkaitan fisik, berbentuk integrasi, manusia, melalui jaringan transportasi baik alami (seperti sungai) maupun rekayasa.
2. Keterkaitan ekonomi, berkaitan erat dengan pemasaran sehingga terjadi aliran komoditas berbagai jenis bahan dan barang manufaktur, modal dan keterkaitan produksi ke depan (*forward linkages*) dan ke belakang (*backward linkages*) diantara berbagai kegiatan ekonomi.

3. Keterkaitan pergerakan penduduk, pola migrasi baik permanen maupun temporer. Keterkaitan ini merupakan gambaran dari keterkaitan wilayah pedesaan dan perkotaan.
4. Keterkaitan teknologi, terutama peralatan, cara dan metode produksi harus terintegrasi secara spasial dan fungsional karena inovasi teknologi saja tidak akan memacu transformasi sosial dan ekonomi pada suatu wilayah jika tidak disesuaikan dengan dan kebutuhan wilayah tersebut.
5. Keterkaitan sosial, merupakan dampak dari keterkaitan ekonomi terhadap pola hubungan sosial penduduk.
6. Keterkaitan pelayanan sosial, seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan sebagainya.
7. Keterkaitan administratif, politik, dan kelembagaan, misalnya pada struktur pemerintahan, batas administratif maupun sistem anggaran dan biaya pembangunan.

Interaksi spasial sangat terkait dengan teori pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan, yang mana turunan dari interaksi spasial ini akan membentuk pola ruang sebagai berikut (Harris & Ullman dalam Daljoeni Nathaniel, 1978) :

1. *Uniform*, pola ini menggambarkan bahwa tempat-tempat pusat didistribusikan ke dalam suatu pola yang seragam, yang berfungsi menyediakan barang dan jasa secara tetap ke wilayah sekitarnya.
2. *Specialization function*, pola tersebut cenderung memperlihatkan pengelompokan karakteristik tapak, misalnya tambang, atau aktivitas lain yang saling melengkapi, misalnya pabrik.

3. *Transport center*, pola ini dihasilkan dari besarnya aktivitas fisik, komersil, atau politik yang terjadi dalam aktivitas transportasi secara terus menerus.
4. *Combines*, merupakan pola gabungan dari beberapa pola diatas.

Terjadinya interaksi adalah akibat dari aktivitas dalam suatu wilayah, yang mana aktivitas yang terjadi di satu wilayah tidak akan terlepas dari aktivitas di wilayah lainnya. Dalam interaksi tersebut kemudian tercipta hubungan antarwilayah. Sementara itu, umumnya dalam hubungan antarwilayah terfokus pada aktivitas ekonomi. Hubungan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi ini meliputi hubungan mulai dari proses produksi sampai dengan proses pemanfaatan hasil produksi/konsumsi. Pada hubungan tersebut dapat ditemukan adanya proses distribusi dan aliran yang meliputi beberapa elemen komoditi baik komoditi barang maupun jasa, serta aliran uang.

Aspek aliran barang dan jasa umumnya mempunyai pengaruh yang relatif besar dalam hubungan antarwilayah. Proses aliran barang ini sangat tergantung dari ketersediaan prasarana pendukung yang berupa prasarana transportasi. Dengan pembukaan/pengadaan prasarana transportasi yang memadai, maka daerah tidak hanya akan mampu memanfaatkan potensi yang tersedia, namun juga dapat membuka perspektif baru yang tadinya belum diketahui (Warpani, 1977). Sementara itu, aliran uang memiliki peran yang tidak kalah penting dengan aliran barang dalam hubungan antarwilayah. pengiriman hasil produksi dan tenaga kerja dari daerah pertama ke daerah kedua berarti menuntut imbalan dari daerah kedua ke daerah pertama yang dapat berbentuk aliran uang (Isard, 1969). Proses interaksi yang konsisten tersebut dalam kurun waktu tertentu akan menciptakan saling ketergantungan antarwilayah yang terlibat. Untuk mengarahkan interaksi tersebut agar sejalan dengan kebijakan pembangunan pada wilayah yang bersangkutan maka

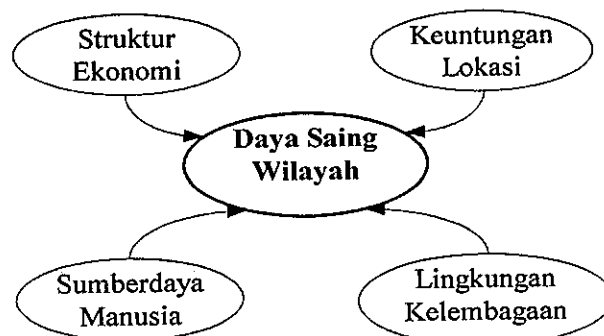
dilakukan pendekatan regionalisasi yang diwujudkan dalam suatu kerangka kerjasama antarwilayah.

2.5 Daya Saing Wilayah

Dalam era globalisasi terjadi persaingan yang semakin tinggi antarwilayah dalam mendapatkan pangsa pasar, tenaga kerja, dan modal. Dalam menghadapi persaingan tersebut, maka tiap wilayah perlu menyusun suatu strategi untuk menciptakan daya saingnya. Pada gilirannya, daya saing tersebut akan mengantarkannya pada pertumbuhan wilayah yang signifikan.

Daya saing wilayah dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk memproduksi dan memasarkan seperangkat produk (barang dan jasa) yang menggambarkan harga yang baik dibandingkan dengan produk wilayah lain (tidak perlu harga yang terendah) (Webster & Muller, 2000). Pengertian daya saing yang lain adalah kemampuan wilayah untuk menciptakan berbagai faktor produksi yang dapat mendatangkan prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain yang berkompetisi dengannya (Alkadri, 1999).

Menurut Webster dan Muller, dalam menilai daya saing wilayah terdapat empat faktor pengaruh yang saling terkait, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



GAMBAR 2.2
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAYA SAING
Sumber : Webster & Muller, 2000

Pada gambar tersebut terlihat bahwa daya saing suatu wilayah dipengaruhi oleh empat hal :

- Struktur ekonomi, yang meliputi komposisi ekonomi, produktivitas, output dan nilai tambah, serta investasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri.
- Keuntungan lokasi, yang berupa ketersediaan infrastruktur, sumberdaya alam, kenyamanan bertempat tinggal dan bekerja, serta *image* wilayah yang mendukung.
- Sumberdaya manusia, yang meliputi ketrampilan/keahlian, ketersediaan dan harga tenaga kerja.
- Lingkungan kelembagaan pemerintah, yang mencakup budaya kerja dan kerangka kebijakan pemerintah.

Pada dasarnya, proses terciptanya daya saing pada tiap wilayah relatif tidak sama. Wilayah yang diuntungkan karena adanya *basic factor*, seperti sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja murah, serta lokasi geografis yang menguntungkan, secara otomatis memiliki daya saing yang lebih tinggi. Namun hal itu tidaklah cukup sebagai modal dalam menghadapi persaingan global. Keuntungan tersebut perlu ditunjang dengan kemampuan menciptakan *create factor*, seperti penguasaan terhadap teknologi yang tinggi, infrastruktur, tenaga kerja terampil, dan akses terhadap jaringan pemasaran global (Alkadri, 1999).

Dalam konteks penelitian ini, kondisi eksisting wilayah Riau Bagian Selatan relatif diuntungkan dengan keberadaan *basic factor* yang cukup besar. Namun wilayah tersebut hingga saat ini belum optimal dalam menciptakan *create factor* yang mampu memacu perkembangan wilayah tersebut hingga dapat bersaing dengan wilayah lain. Terlebih lagi dengan munculnya otonomi daerah yang berakibat pada dimekarkannya wilayah tersebut menjadi empat kabupaten, maka daya saing wilayah tersebut dikhawatirkan akan menurun. Dengan adanya kecenderungan egoisme pada tiap kabupaten, maka wilayah tersebut akan

sulit dalam bersaing dengan wilayah lain. Apalagi jika hanya mengandalkan *basic factor* yang hanya merupakan keunggulan yang bersifat komparatif.

Dalam menghadapi otonomi daerah tersebut, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan daya saing wilayah Riau Bagian Selatan. Upaya ini perlu melibatkan berbagai aspek, baik *stakeholder* maupun aktivitas. Daya saing wilayah dapat dibentuk dengan pendekatan sistem nilai, yang mana dalam sistem tersebut penciptaan dan penggunaan produk/sector yang menjadi unggulan perlu diperkuat dengan jaringan terhadap suplier maupun pembeli. Daya saing yang terkuat umumnya muncul karena adanya pengelompokan, terutama wilayah yang terletak pada geografis yang berdekatan (Alkadri, 1999).

Kerjasama yang akan dikembangkan di wilayah Riau Bagian Selatan pada sektor yang menjadi unggulan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saingnya. Mengingat karakteristik wilayah tersebut, yang mana kabupaten satu dengan lainnya mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tidak sama, tetapi relatif saling melengkapi, sehingga perlu adanya koordinasi dalam bentuk regionalisasi. Selanjutnya regionalisasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama di wilayah Riau Bagian Selatan.

Studi Kasus : Regionalisasi Pulau Batam – Singapura

Dahulu sebagian Pulau Batam merupakan daerah rawa-rawa yang tidak subur, kosong, dan merupakan pangkalan penyelundupan di perairan perbatasan dengan Singapura. Untuk mengatasi hal tersebut tidak hanya diperlukan tindakan hukum, namun juga tindakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah itu. Diuntungkan oleh kedekatannya dengan Singapura sebagai pusat pertumbuhan dunia, maka pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah Pulau Batam menjalin kerjasama dengan Singapura. Kerjasama yang dijalin dalam hal penggunaan infrastruktur

transportasi maupun keuangan yang ada di Singapura. Sebagai imbalan ditawarkan ke Singapura untuk *industrial estate* yang pada waktu itu Singapura sedang merencanakan untuk membangunnya di Jurong.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuk Badan Otorita Batam untuk lebih memfokuskan pengembangan Pulau Batam dan kerjasama yang dijalin dengan Singapura. Hingga saat ini Pulau Batam telah berkembang pusat kegiatan ekonomi dengan mobilitas tinggi dan primadona bagi pencari kerja. Untuk lebih mengembangkan Pulau Batam, maka Pulau Batam difungsikan sebagai *transshipment, industrial development centre, dan tourism gateway*. Namun perlu ditekankan bahwa Pulau Batam tidak ingin menjadi pesaing bagi Singapura, tetapi menjadi penyeimbang bagi perkembangan Singapura yang berpotensi *overload* (Maharadja, 2003)

Berkaitan dengan regionalisasi, maka kedekatan geografis dua wilayah tersebut ditindaklanjuti dengan menjalin kerjasama antar dua wilayah. Kerjasama tersebut mengandalkan pengaruh Singapura sebagai pusat pertumbuhan dunia yang memberikan multiplier effects bagi Pulau Batam, sehingga pulau tersebut dapat berkembang dengan pesat. Dengan demikian regionalisasi yang diterjemahkan dalam kerjasama dua wilayah tersebut terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan Pulau Batam di satu sisi, dan di sisi lain menjadi penyeimbang perkembangan di Singapura yang cenderung melebihi kapasitas negara yang bersangkutan. Selain itu kerjasama tersebut dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah yang dapat memunculkan potensi konflik.

2.6 Kerjasama Antardaerah sebagai Perwujudan Konsep Regionalisasi

Kerangka otonomi daerah telah menyatakan peluang adanya kerjasama antardaerah seperti dijelaskan pada Undang-Undang No 22 tahun 1999 pada Bab IX, yaitu bahwa beberapa daerah dapat mengadakan kerjasama antardaerah yang diatur dengan keputusan

bersama. Selain itu daerah juga dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri. Kerjasama antardaerah selanjutnya juga disinggung dalam Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000, pada pasal 4 butir a yaitu Kabupaten/Kota yang tidak/belum mampu melaksanakan salah satu/beberapa kewenangan dapat melaksanakan kewenangan tersebut melalui kerjasama antar Kabupaten/Kota, kerjasama antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, atau menyerahkan kewenangan tersebut pada Propinsi.

Berdasarkan kedua dasar hukum ini dapat diketahui bahwa sebenarnya upaya kerjasama memang dianjurkan sebagai penyelesaian konflik/permasalahan. Kerjasama merupakan suatu pendekatan guna mencegah konflik, yang ditekankan pada pembinaan kelompok untuk membantu mengubah kemungkinan sumber konflik menjadi daya positif. Tekanan tersebut dapat berupa identifikasi tujuan-tujuan bersama, mengenali kekuatan masing-masing dan melakukan perencanaan strategis untuk mencapai tujuan melalui kerjasama (Ramadhan dan Pramudiatmoko dalam Urbanus M. Ambardi, 2000 : 21).

Dalam kerangka kerjasama terdapat tiga unsur pokok yang selalu melekat padanya, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi, dan unsur tujuan bersama. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak termuat pada suatu objek yang dikaji, maka dapat dianggap bahwa objek tersebut tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak atau lebih biasanya menggambarkan suatu himpunan dari kepentingan-kepentingan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga berinteraksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (Pamudji, 1985). Latar belakang yang lebih spesifik menurut Pamudji yakni kerjasama antardaerah secara lebih jelas memiliki dua motivasi utama yaitu (Pamudji, 1985 : 9) :

1. Sebagai usaha untuk mengurangi kemungkinan adanya kemajuan pembangunan yang pesat di suatu daerah dengan membawa akibat distruktif terhadap daerah-

daerah sekitarnya, langsung maupun tidak langsung. Dalam hubungan ini titik berat perhatian ditujukan pada usaha untuk mewujudkan keserasian perkembangan wilayah dari daerah-daerah yang berdekatan.

2. Sebagai usaha untuk memecahkan masalah bersama dan atau untuk mewujudkan tujuan bersama terhadap bidang-bidang tertentu. Dalam hubungan ini titik berat perhatian terletak pada usaha untuk mewujudkan tujuan bersama, terlepas dari kenyataan apakah daerah-daerah itu secara geografis berdekatan atau tidak.

Sementara menurut Lee Shaw Yuan, terdapat beberapa faktor yang dapat melahirkan kerjasama regional, yaitu :

1. Adanya keberadaan yang saling mengisi dalam bidang ekonomi.
2. Adanya komitmen politik dari negara-negara anggota untuk memberikan jaminan kepada investor dengan mengurangi resiko politik. Selain itu dijamin adanya kerjasama antar perbatasan di dalam perdagangan, mobilitas penduduk, arus investasi, dan pengembangan infrastruktur (transportasi dan komunikasi).
3. Adanya integrasi yang didorong oleh investasi swasta yang merupakan kekuatan paling besar dalam terbentuknya kerjasama regional

Adapun menurut Lee Shaw Yuan, faktor pendorong kerjasama adalah sebagai berikut :

- Adanya sistem ekonomi wilayah yang saling menguntungkan
- Adanya kedekatan sub-sub wilayah secara geografis
- Adanya komitmen bersama yang tegas di antara pemerintah daerah terkait
- Adanya koordinasi kebijakan yang efektif di antara pemerintah dari daerah terkait
- Ketersediaan prasarana fisik dan komersial yang memadai

- Kemampuan sektor swasta dalam mengidentifikasi peluang-peluang pasar yang ada

- Adanya realisasi ekspor yang menguntungkan ke luar wilayah pengembangan

Secara teoritis, sebelum melakukan kerjasama, seharusnya setiap pemerintah lokal menunjukkan kematangannya dalam mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kerjasama, seperti menyiapkan institusi, menyiapkan konsep dokumen kontrak kerjasama, melakukan kajian peraturan perundangan, menyiapkan konsep pembagian hak dan kewajiban dan sebagainya (Satiawan dalam Alkadri, 2002 : 62). Hal ini diwujudkan dalam suatu Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah. Namun ketentuan secara spesifik yang mengatur tentang pedoman kerjasama antardaerah yang sesuai dengan UU Otonomi Daerah sampai saat ini belum ditetapkan dan masih mengacu pada Permendagri No.6 tahun 1975 tentang kerjasama antardaerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 275 tahun 1982 tentang pedoman kerjasama pembangunan antardaerah.

Secara lebih spesifik seperti disebutkan oleh Norton (1994 : 47) menyebutkan juga aspek perlunya keberadaan pedoman pelaksanaan kerjasama. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya kerjasama antar pemerintah lokal, antara lain adalah (Satiawan dalam Alkadri, 2002) :

1. Ukuran dan kompetensi tiap pelaku.
2. Tekanan dari pemerintah (atasan).
3. Kebutuhan implementasi peraturan.
4. Ketersediaan format-format legal kerjasama.
5. Kemauan untuk bekerjasama.
6. Format keterwakilan organisasi kerjasama.

Kedua pendapat Satiawan dan Norton memiliki esensi yang sama yaitu pada tujuan yang ditetapkan bersama namun Norton menyoroti motivasi kerjasama ini secara lebih konkret, untuk terbentuknya kerjasama tidak hanya diperlukan tujuan bersama, namun perangkat kerjasama juga perlu dipikirkan. Dalam hal ini adalah ketersediaan format legal bersama dan ukuran kompetensi tiap pihak yang bekerjasama.

Adapun bentuk-bentuk kerjasama ini dapat dijelaskan sebagai berikut (Pamudji, 1985 : 21) :

1. Kerjasama Bilateral

Kerangka kerjasama yang hanya melibatkan dua daerah otonom, misalnya antara dua kabupaten atau kota atau antara dua wilayah propinsi. Pada dasarnya kerjasama bilateral dapat lebih mudah diwujudkan oleh dua daerah yang bertetangga, walaupun kemungkinan bagi kerjasama yang serupa di antara daerah-daerah yang berjauhan juga dapat diwujudkan. Dua daerah yang bertetangga biasanya dihadapkan pada bidang-bidang permasalahan yang sama, atau pada berbagai bidang permasalahan yang berbeda, tetapi secara prinsipal dapat dipecahkan bersama melalui serangkaian kegiatan terpadu yang melibatkan kedua pemerintah daerah yang bersangkutan. Tuntutan akan pemecahan masalah bersama ini terutama dihadapi oleh syatu kota yang sedang berkembang terhadap daerah tetangganya yang terdekat. Berbagai pertentangan kepentingan dapat saja muncul di dalam mendekati suatu obyek permasalahan jika kerjasama itu tidak dilakukan, atau paling tidak kerjasama akan menjamin efesiensi dalam penanganan masalah yang dihadapi bersama.

2. Kerjasama Multilateral

Kerjasama antardaerah yang dilakukan oleh tiga daerah atau lebih untuk mengatur secara bersama-sama kepentingan daerah-daerah yang bersangkutan. Daerah yang melakukan kerjasama dapat berada satu wilayah propinsi atau terdiri dari beberapa wilayah propinsi. Dalam kerangka kerjasama multilateral ini dapat terlibat beberapa bidang kegiatan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, namun masing-masing membawa fungsi dan peranan yang seimbang untuk mewujudkan tujuan bersama.

Di bawah ini adalah beberapa model kerjasama yang dapat menjadi alternatif pada penelitian ini (Satiawan dalam Alkadri, 2002 : 134-135) :

a. Inter-Jurisdictional Agreement

Dalam model ini beberapa pemerintah lokal berdekatan secara geografis membentuk perjanjian kerjasama untuk mengatasi masalah-masalah bersama seperti masalah lingkungan dan infrastruktur (Nunn, et al, 1997)

b. Inter-Municipal Service Contract

Dalam model ini dibentuk perjanjian kerjasama dimana satu (atau lebih) pemerintah lokal memberikan ijin kepada pemerintah lokal lain untuk menjalankan kewenangan mewakili kepentingan pemerintah lokal tersebut, berdasarkan *fee* (Atkins, 1997)

c. Project-Based Inter-Jurisdictional Co-Operation

Dalam model ini perjanjian kerjasama antara pemerintah lokal yang 'bertetangga' disusun untuk kepentingan aktivitas bersama menangani satu *cross-boundary projects* (Nunn, et al, 1997). Pada model ini jangka waktu

kerjasama tergantung dari usia proyek yang dikelolanya. Berakhirnya proyek umumnya menandai berakhirnya kerjasama.

2.6.1 Bidang-bidang Kerjasama

Menurut ketentuan pasal 3 dari peraturan Menteri Dalam Negeri No.6/1975, kerjasama antardaerah dapat meliputi semua urusan pemerintahan yang termasuk urusan rumah tangga daerah dan urusan tugas pembantuan. Juga telah dikemukakan bahwa penyerahan urusan pemerintahan untuk menjadi urusan rumah tangga, atau untuk menjadi urusan tugas pembantuan bagi suatu daerah tertentu terdapat beberapa variasi. Suatu daerah yang masa pembentukannya telah cukup lama dan tingkat perkembangannya telah mencapai suatu kemampuan tertentu akan berbeda dengan daerah yang baru terbentuk dengan perkembangan yang belum laju. Perbedaan itu akan menyangkut jenis-jenis urusan yang diserahkan, ruang lingkup kewenangan serta jumlah keseluruhan dari urusan-urusan yang diserahkan itu.

2.6.2 Permasalahan Kerjasama Antardaerah

Proses komunikasi antara beberapa pihak berpotensi untuk timbulnya masalah, baik itu berasal dari birokrasi pihak-pihak yang berkerjasama atau berasal dari sumberdaya yang dimiliki oleh pihak tersebut. Selama ini sebenarnya antar masing-masing Daerah Tingkat II telah melaksanakan kerjasama namun terbatas pada hal-hal yang bersifat koordinatif saja dengan cara mengadakan rapat bersama, seminar-seminar, dimana hasilnya belum begitu dirasakan manfaatnya (Pamudji, 1985 : 76).

Permasalahan yang dapat diidentifikasi secara umum dari kerjasama antar pemerintah lokal selama ini adalah belum tumbuhnya kesadaran akan pentingnya melakukan kerjasama oleh sebagian besar pemerintah lokal. Dalam era otonomi daerah

yang pelaksanaannya telah dimulai secara efektif pada tahun 2001, setiap daerah tentunya tidak dapat lagi menggantungkan keberlangsungan kehidupannya dari kucuran dana Pemerintah Atasan atau pihak-pihak lain. Untuk itu sumber-sumber daya yang ada mesti dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan sejak dini untuk menghindari kebocoran sumberdaya pembangunan. Konsep kemitraan mesti mulai dipikirkan pelaksanaannya mengingat setiap wilayah tidak dapat berdiri sendiri selamanya baik kemitraan dengan pelaku usaha swasta, masyarakat, maupun kemitraan dengan sesama pemerintah lokal. Permasalahan selanjutnya adalah bila keinginan untuk melakukan kerjasama antardaerah mulai muncul, maka perlu adanya mekanisme dan prosedur yang jelas, aplikatif, dan tepat sebagai stimulannya. Padahal kenyataan yang ada selama ini justru masalah-masalah yang timbul dirasakan lebih banyak daripada keuntungan yang didapat dari pelaksanaan kerjasama (Alkadri et.al, 1999).

Dalam analisisnya, Satiawan memberikan pernyataan bahwa kerjasama antardaerah tidak selamanya dapat dilakukan dengan mudah, memerlukan suatu kesepakatan dan perumusan tujuan bersama. Pernyataan selanjutnya lebih bersifat pesimis dengan keberhasilan kerjasama yang selama ini ada, karena prosedur untuk kerjasama belum ditetapkan secara jelas oleh pemerintah. Acuan untuk kerjasama selama ini adalah Permendagri No.6 tahun 1975 tentang kerjasama antardaerah dan Kepmendagri No.275 tahun 1982 tentang pedoman kerjasama pembangunan antardaerah dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan ditetapkannya UU otonomi daerah No.22 tahun 1999.

Dengan memperhatikan tingkat kompleksitasnya secara lebih rinci, masalah-masalah dalam hubungan kerjasama antardaerah otonom dapat digolongkan sebagai berikut (Ramadhan dan Pramudiatmoko dalam Urbanus M Ambardi, 2000 : 21):

1. Masalah yang menyangkut posisi geografis.

Dalam hal kerjasama antardaerah otonom dapat terhambat oleh suatu kendala atau keadaan dimana daerah-daerah otonom itu secara fisik geografis saling berjauhan atau terpisahkan oleh suatu unit geografis tertentu.

2. Masalah sarana perhubungan

Kurang atau sulitnya sarana perhubungan secara langsung sering merupakan penghambat bagi lalu lintas barang dan manusia dan sekaligus bagi kerjasama antardaerah otonom.

3. Masalah yang menyangkut batas wilayah administrasi atau hukum teritorial.

Termasuk ke dalam masalah ini adalah masalah pengelolaan bersama daerah perbatasan dan adanya bagian-bagian daerah tertentu yang diperselisihkan.

4. Masalah status kependudukan dan pembinaan wilayah. Terutama bagi daerah-daerah otonom yang saling berbatasan secara langsung dapat ditemukan penduduk atau warga yang berstatus kependudukan tidak jelas karena adanya perbedaan dalam hal tempat tinggal dan tempat bekerja, sehingga menyulitkan dalam pembinaannya.

Permasalahan yang muncul seperti disebutkan diatas merupakan suatu kompilasi dari masalah yang sudah pernah muncul sebelumnya. Dalam kasus daerah perbatasan, yang sering muncul adalah masalah pengelolaan bersama dan kemungkinan masih terdapat daerah tertentu yang diperselisihkan sehingga menghambat kemajuan daerah ini karena muncul konflik kewenangan. Dengan melakukan kerjasama antar pemerintah lokal, ada harapan bahwa masalah-masalah yang melibatkan 2 atau lebih pemerintah lokal akan dapat diselesaikan secara mandiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa melibatkan pihak ketiga. Peluang untuk memperoleh penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan dapat

tercapai daripada mempertahankan prinsip individualisme dan ego kedaerahan yang berlebihan (Satiawan dalam Jurnal ASPI, 2002 : 62).

2.6.3 Kelembagaan Daerah

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999, secara langsung mempengaruhi perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah. Perubahan paradigma ini menurut Widjaja (2002:14) merupakan kesempatan yang penting bagi Pemerintah Daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan pemerintah lokal sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Dan sebagai konsekwensi logis dari lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintahan, yang signifikan adalah dengan berubahnya kedudukan, tugas dan fungsi lembaga pemerintahan di Pusat dan Daerah, dimana akan memunculkan perubahan beban dan karakteristik tugas (Widjadja, 2002:28).

Konstelasi dengan penataan kelembagaan di daerah tentunya harus dan jumlah unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja. Oleh karena itu masing-masing daerah memiliki struktur kelembagaan yang tidak sama namun dengan perangkat daerah yang sesuai dengan Undang Undang 22/99. dalam upaya kerjasama dalam membentuk koordinasi dan lembaga bersama diperlukan suatu pemahaman mengenai fungsi, tugas dan wewenang masing-masing kelembagaan di tiap daerah yang bekerjasama.

Dalam pandangannya Widjaja lebih menyoroti bagaimanakah upaya dari pemerintah daerah dalam menyikapi perubahan kebijakan dan paradigma ini. Salah satu yang akan dibahas disini adalah dalam aspek kelembagaan dan organisasi daerah.

Struktur kelembagaan di daerah tidak terlepas dari bentuk kelembagaan ini sebagai sebuah organisasi. Beberapa karakteristik yang pasti dari suatu organisasi adalah bahwa organisasi (Henry, 1995:73) :

1. Punya maksud tertentu, dan merupakan kumpulan berbagai macam manusia.
2. Punya hubungan sekunder (impersonal).
3. Punya tujuan khusus dan terbatas.
4. Punya kegiatan kerjasama pendukung.
5. Terintegrasi dalam sistem sosial yang lebih luas.
6. Menghasilkan barang dan jasa untuk lingkungannya
7. Sangat terpengaruh atas setiap perubahan lingkungan.

Pemerintahan di daerah jika dibandingkan dengan karakteristik diatas memiliki kesamaan yang signifikan. Dengan perubahan paradigma yang terjadi seiring dengan penetapan UU No. 22 tahun 1999 membuktikan bahwa organisasi juga terpengaruh lingkungan yang semakin berkembang dan menuntut perbaikan kinerja. Evaluasi struktur kelembagaan mulai dilakukan. Upaya penataan kelembagaan yaitu dengan melakukan sejumlah tindakan efisiensi berupa penghematan struktur organisasi (sekaligus penghematan biaya), peningkatan profesionalisme aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (Widjadja, 2002:16).

Pada pasal 4 UU 22/99 dalam penjelasannya disebutkan bahwa Daerah Propinsi tidak membawahi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerjasama dan atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dengan masing-masing kedudukannya sebagai daerah otonom.

Usaha kerjasama antardaerah juga akan melibatkan struktur kelembagaan masing-masing daerah dalam pengelolaan/ manajerial kerjasama yang dilakukan. Widjaja

menyimpulkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan kelembagaan adalah (2002:16) :

1. Penajaman misi organisasi
2. Penghindaran duplikasi tugas
3. Rumusan dan fungsi yang jelas

Khususnya dalam upaya kerjasama, poin-poin diatas menjadi penting disaat kerjasama yang pernah dilakukan tidak memiliki tindak lanjut. Dalam beberapa kasus upaya kerjasama terbentur pada masalah duplikasi tugas dan wewenang.

Upaya kerjasama wilayah Riau Bagian Selatan telah mulai digulirkan dengan diawali oleh disusunnya Kesepakatan Bersama Empat Kabupaten (Indragirihulu, Indragirihilir, Pelalawan, dan Kuantan-Singingi) pada tanggal 14 Desember 2002. Dalam Kesepakatan Bersama tersebut dicantumkan pula agenda pembangunan, termasuk di dalamnya sektor-sektor tertentu yang dianggap sebagai unggulan. Hal itu perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pemantapan dalam suatu format kerjasama yang lebih formal, menyangkut masalah stakeholder yang terlibat, pembagian wewenang dan tugas, koordinasi, serta aspek lain yang dianggap penting.

2.7 Kesimpulan

Empat kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan merupakan bagian dari rencana baik nasional maupun regional, mempunyai hubungan yang sangat erat karena selain letaknya yang saling berbatasan, juga karena tiga diantaranya dahulu merupakan satu wilayah administratif yang kemudian dimekarkan akibat berlakunya otonomi daerah. Dengan kondisi yang demikian, maka dalam pelaksanaan pembangunan tidak bisa dijalankan secara sendiri-sendiri tetapi harus tetap mempertimbangkan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

Keberadaan industri basis di wilayah ini ditunjang oleh faktor lokasi yang strategis, yang mana untuk wilayah studi lokasi strategis tersebut ditunjukkan dengan kedekatannya dengan kutub pertumbuhan *IMS Growth Triangle*. Industri basis tersebut dalam teori pusat/kutub pertumbuhan berfungsi sebagai *leading sector* yang dapat menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan sektor lain (*backward & forward linkages*). Pada gilirannya, industri tersebut makin lama makin berkembang (mengalami polarisasi) hingga terjadi *spread effects*. Hal ini merupakan potensi (daya tarik) yang melahirkan permintaan dan penawaran dari daerah lain.

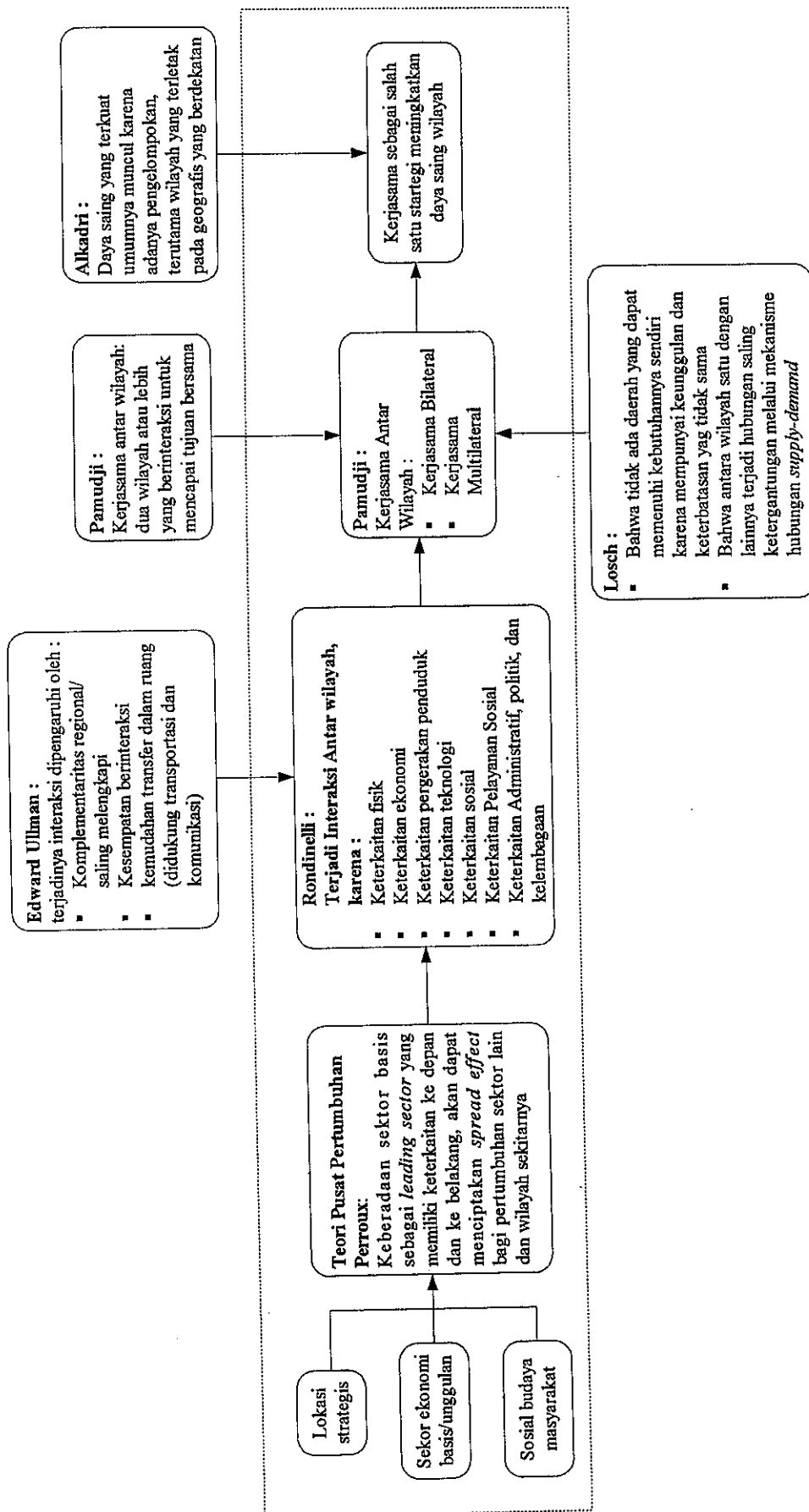
Dalam menghadapi persaingan global, kerjasama menjadi alternatif upaya peningkatan daya saing wilayah Riau Bagian Selatan. Dengan munculnya otonomi daerah yang berakibat pada dimekarkannya wilayah tersebut menjadi empat kabupaten, maka daya saing wilayah tersebut dikhawatirkan akan menurun. Upaya untuk meningkatkan daya saing itu memerlukan koordinasi dari stakeholder yang terkait. Dengan melihat kondisi yang ada di Riau Bagian Selatan, maka kerjasama antardaerah akan memperkuat daya saing wilayah tersebut.

Mengapa kerjasama ini diperlukan ? Karena mengingat karakteristik wilayah Riau Bagian Selatan, maka kerjasama ini sebagai usaha untuk mengurangi kemungkinan adanya kemajuan pembangunan yang pesat di suatu daerah dengan membawa akibat destruktif terhadap daerah-daerah sekitarnya, langsung maupun tidak langsung. Selain itu, juga sebagai usaha untuk memecahkan masalah bersama dan atau untuk mewujudkan tujuan bersama terhadap bidang-bidang tertentu.

Sebelum mengadakan kerjasama, maka perlu ditentukan dahulu bidang kerjasamanya. Umumnya kerjasama dilakukan di bidang ekonomi atau bidang yang mendukung aktivitas ekonomi, mengingat perkembangan wilayah lazimnya dilihat dari

kemajuan sektor perekonomiannya. Sektor yang menjadi bidang kerjasama diupayakan merupakan sektor basis dengan komoditi unggulan yang memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkages*) ataupun keterkaitan ke belakang (*backward linkages*).

Mengingat wilayah penelitian terdiri dari empat kabupaten dan masih berada dalam satu propinsi, maka bentuk kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama multilateral. Dalam kerangka kerjasama multilateral ini dapat terlibat beberapa bidang kegiatan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, namun masing-masing membawa fungsi dan peranan yang seimbang untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam menyikapi kondisi di wilayah Riau Bagian Selatan dikaitkan dengan teori yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan konsep regionalisasi sebagai pendekatan pembangunan. Konsep regionalisasi, dapat dilihat berikut ini :



Sumber : Hasil Analisis, 2004

GAMBAR 2.3
RUMUSAN KONSEP REGIONALISASI DALAM KERJASAMA ANTAR WILAYAH

TABEL II.1
VARIABEL KERJASAMA ANTARWILAYAH

No.	Variabel	Parameter	Sumber
1	Komoditi/sector unggulan	Menjadi penggerak utama (<i>prime mover</i>) pembangunan perekonomian Mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (<i>backward & forward linkages</i>) Mampu bersaing Memiliki koplemetaritas dengan wilayah lain Memiliki teknologi semakin meningkat Mampu menyerap tenaga kerja secara optimal Dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu Tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal Mendapat dukungan dari aspek lain : sosial, budaya, keamanan, pasar, informasi, kelembagaan, dll Berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan	Alkadri dan Hasan Mustafa Djajadiningrat, 2002
2	Faktor penentu lahirnya kerjasama antardaerah	Keberadaan yang saling mengisi dalam bidang ekonomi Komitmen politik dari daerah-daerah anggota sebagai jaminan kepada investor dengan mengurangi resiko politik, perdagangan, mobilitas penduduk, arus investasi, dan pengembangan infrastruktur Integrasi yang didorong oleh investasi swasta	Lee Shaw Yuan dalam Dodi Slamet Riyadi, 2002
3	Faktor Pendorong Kerjasama	Adanya sistem ekonomi wilayah yang saling menguntungkan Adanya kedekatan sub-sub wilayah secara geografis Adanya komitmen bersama yang tegas di antara pemerintah daerah terkait Adanya koordinasi kebijakan yang efektif di antara pemerintah dari daerah terkait Ketersediaan prasarana fisik dan komersial yang memadai Kemampuan sektor swasta dalam mengidentifikasi peluang-peluang pasar yang ada Adanya realisasi ekspor yang menguntungkan ke luar wilayah pengembangan	Lee Shaw Yuan dalam Dodi Slamet Riyadi, 2002
4	Penghambat kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posisi geografis yang kurang menguntungkan/berjauhan ▪ Sarana dan prasarana perhubungan/transportasi yang kurang memadai ▪ Batas administrasi dan hukum teritorial yang masih diperselisihkan ▪ Status kependudukan dan pembinaan wilayah yang kurang jelas 	Ramadhan dan Pramudiatmoko, dalam Urbanus M. Ambardi, 2002
5	Jenis Kerjasama	Kerjasama Bilateral (dua wilayah) Kerjasama Multilateral (lebih dari dua wilayah)	Pamudji, 1985
6	Model kerjasama	<i>Inter-Jurisdictional Agreement</i> <i>Inter-Municipal Service Contract</i> <i>Project-Based Inter-Jurisdictional Co-Operation</i>	Putu Rudy Satiawan, 2002

Sumber : Analisis, 2004

BAB III

GAMBARAN UMUM POTENSI KERJASAMA ANTAR KABUPATEN DI WILAYAH RIAU BAGIAN SELATAN

3.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Riau Bagian Selatan

Wilayah Riau Bagian Selatan terdiri dari empat kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan-Singingi. Wilayah ini memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah Riau secara keseluruhan, mengingat dalam wilayah ini dikembangkan Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok, sebagai alat/sarana untuk pemerataan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah di dalam ruang wilayah nasional (Bappeda, 2001).

Dalam mengkaji peluang kerjasama di wilayah Riau Bagian Selatan, maka perlu dipertimbangkan pula kebijakan yang terkait dengan wilayah itu, salah satunya adalah Kebijakan Pengembangan Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok. Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok mencakup empat wilayah administrasi, yaitu kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan-Singingi. Adapun kebijakan kawasan ini diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok dikembangkan sebagai suatu sistem terpadu dari kawasan inti dan kawasan pendukung. Kawasan inti adalah kawasan industri berbasis pertanian yang difungsikan untuk menjamin agar proses nilai tambah produk sektor unggulan yang berasal dari kawasan pendukung dapat berlangsung secara internal di dalam kawasan andalan sendiri. Sedangkan kawasan pendukung terdiri dari kantong-kantong produksi pertanian, hutan produksi, pertambangan, dan pariwisata.

- Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok secara strategik dikembangkan dengan dukungan lima sektor unggulan yaitu sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, industri berbasis pertanian, serta sektor pariwisata dalam kerangka keterpaduan.
- Dinamika pertumbuhan Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok dipacu oleh interaksi kegiatan ekonomi baik lokal, interregional, maupun internasional.
- Infrastruktur pendukung interaksi kegiatan ekonomi yang diorientasikan ke Kuala Enok difungsikan untuk menjamin mobilitas barang dari wilayah kantong-kantong produksi kawasan inti.
- Usaha peningkatan partisipasi masyarakat dengan didukung kualitas sumberdaya manusia dan akses usaha dengan tetap memperhatikan karakter sosial dasar masyarakat setempat.
- Sebagai salah satu langkah dalam upaya melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, fungsi kawasan lindung eksisting pada beberapa kawasan tetap dipertahankan, sementara dilakukan pendeliniasian beberapa kawasan lindung baru sebagai suatu langkah penyeimbangan terhadap eksploitasi alam yang merupakan konsekuensi pembangunan ekonomi.

Kawasan ini telah disepakati oleh *stakeholders* baik di daerah maupun tingkat pusat untuk dikembangkan menjadi satu kesatuan kawasan pengembangan, dengan program-program sebagai berikut :

- Penetapan kawasan produksi (kantong-kantong produksi)
- Pengembangan sistem jaringan jalan
- Rencana pengembangan Kawasan Industri Kuala Enok
- Pembangunan simpul transportasi Pelabuhan samudera Kuala Enok

Kebijaksanaan tersebut perlu menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan peluang kerjasama di wilayah Riau Bagian Selatan.

Sejak dilakukan pemekaran, masing-masing kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan mulai memacu pembangunan. Namun demikian, meski telah diberi kewenangan yang luas, keberhasilan pembangunan belum dapat maksimal karena kurang adanya saling dukung, keserasian, dan keharmonisan serta sinergi dengan Kabupaten di sekitarnya. Karena bagaimanapun juga, terdapat interkoneksi antar kabupaten yang terlihat dari pola aktivitas ekonomi masyarakat yang dominan pada sektor pertanian dan perkebunan. Dengan demikian, terdapat kepentingan yang sama untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi antar kabupaten untuk mengantisipasi persaingan antar wilayah yang semakin tinggi.

Dalam upaya mencapai keharmonisan, keserasian, dan sinergi pembangunan tersebut, maka keempat kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan secara intensif telah melakukan koordinasi pembangunan yang bersifat lintas kabupaten. Salah satunya adalah disepakatinya bersama pembangunan lintas kabupaten. Adapun kesepakatan bersama tersebut mencakup hal-hal berikut ini :

1. Penetapan Visi Bersama

Visinya adalah terwujudnya pembangunan bersama Riau Bagian Selatan yang maju, mandiri, sinergis, dan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan Riau.

2. Penetapan Misi Bersama

- Fungsionalisasi dan optimalisasi serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan Riau Bagian Selatan.
- Pengurangan kesenjangan antar Kabupaten di Riau Bagian Selatan.

- Perwujudan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Riau Bagian Selatan yang sinergis guna mendukung percepatan pembangunan Propinsi Riau.
- Penataan ruang wilayah Kabupaten yang berkelanjutan dan ramah lingkungan disesuaikan dengan dinamika pembangunan daerah.
- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya daerah 4 (empat) Kabupaten (Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan-Singingi) baik sumberdaya daratan, pesisir pulau-pulau bagi pembangunan Riau dalam kerangka pembangunan nasional.
- Perwujudan *Good Governance* melalui pembangunan nilai-nilai moral dan etika yang berlandaskan agama, adat dan budaya daerah dalam pelaksanaan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

3. Penetapan Agenda Pembangunan Riau Bagian Selatan

Agenda pembangunan Riau Bagian Selatan yang direncanakan untuk jangka waktu 2001-2005 meliputi sektor berikut ini :

- Sektor transportasi

Terdiri dari pembangunan dan peningkatan jalan, khususnya jalan penghubung antar kabupaten maupun jalan untuk mendukung aktivitas ekonomi regional dan akses terhadap daerah pemasaran. Selain itu juga peningkatan fungsionalisasi Pelabuhan samudera Kuala Enok dan peningkatan pelabuhan udara 4 (empat) kabupaten. Adapun dana yang diperlukan merupakan dana *sharing* antar kabupaten maupun dengan propinsi.

- Sektor lingkungan hidup dan tata ruang

Kegiatan yang dapat dilakukan berupa review tata ruang kawasan andalan; pengukuran dan penetapan tapal batas antar kabupaten; pendayagunaan, pelestarian dan pengamanan kawasan lindung dan kawasan perbatasan; pendayagunaan, pelestarian, dan pengamanan potensi sumberdaya pesisir, pulua-pulau kecil dan kelautan, serta pengamanan DAS Indragiri dan DAS Kampar.

- Sektor ekonomi

Mencakup upaya peningkatan daya saing wilayah, dengan meningkatkan sektor industri dan pertanian yang didukung oleh infrastruktur yang handal.

- Sektor pendidikan dan kesehatan

Sektor pendidikan berupa upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sedangkan sektor kesehatan berupa pemberantasan penyakit menular yang dilakukan secara sinergi dan serentak di 4 (empat) kabupaten di Riau Bagian Selatan.

Untuk menindaklanjuti langkah tersebut, maka dibentuk Forum Komunikasi/Sekretariat bersama Lintas Kabupaten dan pertemuan berkala setiap tahunnya bergilir pada setiap kabupaten. Selain itu, keempat kabupaten juga telah mulai menjajaki kemungkinan adanya *sharing* pembiayaan pembangunan dengan didukung oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Kesepakatan bersama tersebut merupakan suatu acuan untuk membuka peluang dilakukannya kerjasama Riau Bagian Selatan. Namun untuk membentuk suatu kerjasama, terlebih dahulu perlu diidentifikasi potensi dan permasalahan pada masing-masing

kabupaten sebagai langkah awal menentukan sektor-sektor yang strategis sebagai bidang kerjasama, sehingga optimalisasi pembangunan wilayah tersebut dapat dicapai.

3.2 Karakteristik Kabupaten Indragiri Hulu

3.2.1 Kondisi Fisik Dasar

Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada 0°15 LU – 1°05 LS dan 101°02 BB – 102°48 BB dengan luas wilayah sekitar 8.198,26 km². Kabupaten ini sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah selatan dengan Propinsi Jambi, sebelah barat dengan Kabupaten Kuantan-Singingi, dan sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Keadaan daerahnya sebagian terdiri dari dataran rendah, rawa-rawa, dan kawasan perbukitan yang ketinggiannya antara 5 – 400 meter di atas permukaan laut dan kemiringan antara 5 – 500. Daerah perbukitan terdiri dari hutan primer dan sekunder yang merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan, memanjang dari utara ke selatan melalui perbatasan Kabupaten Kampar dan Propinsi Jambi.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragirihulu dialiri oleh sungai besar, yaitu Sungai Indragiri. Panjang Daerah Aliran Sungai itu kurang lebih 275 km dengan kedalaman mencapai 12 m pada musim hujan dan 3-5 m pada musim kemarau. Akibat kondisi tersebut, maka wilayah ini rawan terhadap banjir. Namun demikian, wilayah Indragiri Hulu sangat strategis, karena terletak pada persimpangan jalan raya lintas Sumatera bagian timur yang menghubungkan Kabupaten ini dengan Propinsi Jambi, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

3.2.2 Pemanfaatan Lahan

Lahan yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu secara dominan diusahakan untuk pertanian dan perkebunan. Mengingat hingga saat ini sektor pertanian masih merupakan

kontributor terbesar dalam sumber pendapatan daerah. Secara umum lahan di wilayah itu kurang sesuai untuk pengusahaan tanaman padi sawah karena faktor rawan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Tetapi dengan adanya perbaikan dalam irigasi dan drainase, maka pengusahaannya dapat ditingkatkan hingga mencapai luas 91.780 Ha atau 11,2 % dari luas lahan keseluruhan. Sementara untuk tanaman pangan lahan kering pengusahaannya cukup sesuai dengan kondisi lahan, dengan luas 510.275 Ha atau 62,23 % dari luas keseluruhan. Begitu pula untuk pengusahaan tanaman hortikultura yang mencapai luas 170.650 Ha atau 20,57 % dari luas keseluruhan. Untuk usaha perkebunan, lahan di wilayah ini juga cukup potensial dengan pengusahaan yang mencapai luas 466.120 Ha atau 56,8 % dari luas keseluruhan.

3.2.3 Penduduk dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2002 penduduk Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 279.495 jiwa yang terdiri dari laki-laki 139.717 jiwa dan perempuan 139.778 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 34 jiwa per km². Wilayah yang paling jarang penduduknya terdapat di Kecamatan Batang Gansal 7 jiwa per km² dan yang terpadat penduduknya terdapat di Kecamatan Pasir Penyau 82 jiwa per km². Berikut ini akan diuraikan tentang banyaknya penduduk Kabupaten Indragiri Hulu setelah dimekarkan (2000-2002).

TABEL III.1
BANYAKNYA PENDUDUK KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PERIODE TAHUN 2000 – 2002

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2000	124.733	119.325	244.058
2001	128.587	125.974	252.561
2002	139.717	139.778	279.495

Sumber : Indragiri Hulu Dalam Angka, 2000-2002

Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Indragiri Hulu mengalami pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 4,6 % per tahun. Pertumbuhan

penduduk yang relatif besar tersebut ternyata kurang diimbangi dengan kualitas sumberdaya manusianya. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, yang mana menurut Susenas 2000 69,85 % penduduk hanya berpendidikan SD dan D-3 sampai Perguruan Tinggi hanya 1,41 %. Rendahnya pendidikan di wilayah ini disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kurang memenuhi standar pendidikan, serta jumlah guru yang tidak sebanding dengan jumlah murid.

Dari sembilan lapangan usaha utama yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yaitu 59,63 % dan diikuti sektor industri pengolahan 17,65 % (Indragiri Hulu Dalam Angka). Berikut ini adalah uraian banyaknya tenaga kerja yang dapat diserap oleh lapangan usaha yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

TABEL III.2
BANYAKNYA TENAGA KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAN PROPINSI RIAU TAHUN 2000

No.	Lapangan Usaha	Tenaga Kerja	
		Indragiri Hulu	Riau
1	Pertanian	17.648	792.967
2	Pertambangan	287	41.060
3	Industri Pengolahan	1.159	130.914
4	Listrik/Gas	93	1.359
5	Bangunan	790	55.298
6	Perdagangan	425	332.935
7	Angkutan	114	99.638
8	Keuangan	239	14.125
9	Jasa-Jasa	173	180.793
	Jumlah	20.928	1.649.089

Sumber : Indragiri Hulu Dalam Angka dan Riau Dalam Angka, 2000

Dari data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan mata pencaharian utama di Kabupaten Indragiri Hulu. Struktur penduduk menurut mata pencaharian umumnya menggambarkan kondisi perekonomian penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

3.2.4 Tinjauan Sektor Ekonomi

Kondisi perekonomian khususnya sektor ekonomi potensial di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Hal ini penting karena merupakan salah satu indikator dalam melihat keberhasilan pembangunan. Sektor ekonomi yang potensial di suatu wilayah dapat dicermati dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengkomparasikan kondisi perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu dalam selang waktu tertentu serta dengan wilayah regionalnya, yaitu Propinsi Riau. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

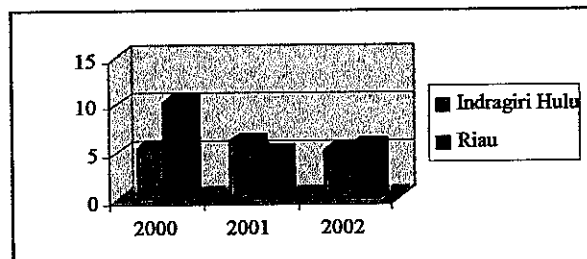
TABEL III.3
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000-2002

No.	Lapangan Usaha	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002
1	Pertanian	8,03	5,83	4,56
2	Pertambangan	3,82	6,93	5,72
3	Industri Pengolahan	3,78	3,93	6,05
4	Listrik dan Air Minum	6,11	5,54	3,43
5	Bangunan	2,20	12,54	4,38
6	Perdagangan	3,55	6,79	6,79
7	Angkutan dan Komunikasi	4,35	7,83	5,48
8	Keuangan	22,33	10,92	2,63
9	Jasa-jasa	1,59	5,16	3,50
	Indragiri Hulu	5,40	6,16	5,17
	Riau	10,24	5,05	5,59

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hulu, 2002

Dari tabel tersebut terlihat bahwa hampir semua sektor mengalami penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2002. Hanya sektor industri pengolahan yang pertumbuhannya mampu tumbuh sebesar 6,05 % lebih tinggi dibanding pada tahun 2001. Namun pertumbuhan sektor tersebut belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu secara signifikan karena sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 17,95 % terhadap ekonomi kabupaten, lebih rendah dari sektor pertanian.

Secara umum perekonomian Propinsi Riau mengalami peningkatan. Namun hal itu tidak berdampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :



GAMBAR 3.1
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAN
PROPINSI RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2000-2002

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hulu, 2002

Selama periode tersebut, sektor yang memberikan kontribusi relatif besar terhadap perekonomian daerah adalah sektor pertanian, sekalipun mengalami penurunan dari 59,26 % menjadi 58,19 %, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

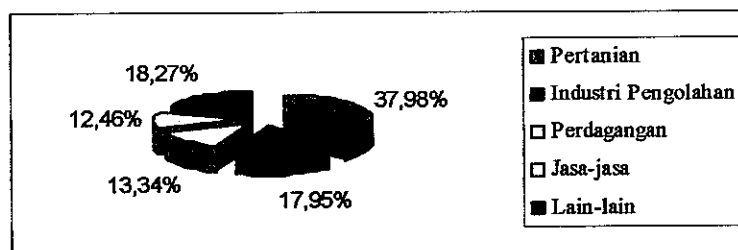
TABEL III.4
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN INDRAGIRI HULU
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000-2002

No.	Lapangan Usaha	2000	2001	2002
1	Pertanian	38,72	39,06	37,98
2	Pertambangan	1,12	1,15	1,19
3	Industri Pengolahan	19,01	17,32	17,95
4	Listrik dan Air Minum	0,52	0,52	0,51
5	Bangunan	7,05	7,67	7,63
6	Perdagangan	12,18	12,50	13,34
7	Angkutan dan Komunikasi	4,65	4,80	4,89
8	Keuangan	3,85	4,11	4,04
9	Jasa-jasa	12,89	12,87	12,46
	Indragiri Hulu	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hulu, 2002

Sementara itu kontribusi terbesar kedua diberikan oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi bervariasi dari tahun 2000 hingga tahun 2002. Untuk mengetahui

dominasi kontribusi yang diberikan oleh sektor utama tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :



GAMBAR 3.2
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN INDRAGIRI HULU
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2002

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hulu, 2002

Kontribusi terbesar masih diberikan oleh sektor pertanian, diikuti oleh industri pengolahan yang semakin mengalami peningkatan. Sementara kontribusi sektor lainnya bervariasi dari 0,51 % – 13,34 %.

3.2.5 Tinjauan Sektor Pertanian dan Perkebunan

Meskipun sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian daerah, tetapi produktivitasnya terus mengalami penurunan hingga tahun 2002. Penurunan tersebut cukup tajam, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL III.5
PERKEMBANGAN PRODUKSI PADI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2000-2002

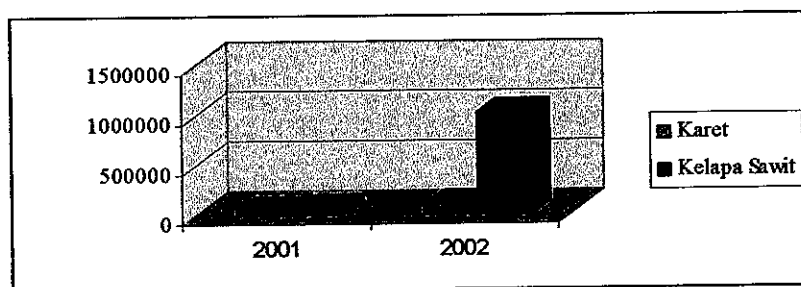
No.	Uraian	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002
1	Luas Tanam (Ha)	4.433	2.956	1.690
2	Luas Panen (Ha)	5.147	3.627	2.092
3	Produktivitas (Kw/Ha)	35,97	36,80	28,64
4	Produksi (Ton)	18.515,76	13.353,01	8.832,25

Sumber : Laporan Tahunan Distan Kab. Indragiri Hulu, 2002

Bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, maka produksi padi di tahun 2002 mengalami penurunan signifikan sebesar -33,86 %. Penurunan harus segera diatasi, mengingat peranan sektor tersebut yang relatif besar bagi perekonomian Kabupaten

Indragiri Hulu. Ditambah lagi, dengan masih cukup tersedianya lahan potensial yang belum dimanfaatkan.

Usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2002 menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik yang dikelola oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya lahan perkebunan dan semakin beragamnya jenis tanaman yang diusahakan juga semakin meningkatnya produksi tanaman. Tanaman perkebunan yang menjadi komoditi utama adalah kelapa sawit, kelapa, dan karet. Peningkatan produksi karet dan kelapa sawit yang menjadi komoditi utama di Kabupaten Indragiri Hulu periode 2001-2002 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



GAMBAR 3.3
PENINGKATAN PRODUKSI KARET DAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2001-2002

Sumber : Indragiri Hulu Dalam Angka, 2001-2002

Dari data tersebut terlihat bahwa peningkatan produksi kelapa sawit sangat pesat. Dengan demikian, kelapa sawit memiliki prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai komoditas unggulan. Hal itu perlu ditunjang dengan penanganan yang optimal dan profesional, sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu.

3.2.6 Tinjauan Sektor Sarana dan Prasarana Transportasi

Dalam tinjauan sektor sarana dan prasarana ini hanya akan dibatasi pada pembahasan tentang sektor transportasi. Hal ini karena sistem prasarana dan sarana

transportasi merupakan elemen penting dalam mendukung pengembangan Riau Bagian Selatan.

Kabupaten Indragiri Hulu dilalui Jalan Lintas Timur Sumatera sebagai jalan arteri primer. Keberadaan jalan ini berperan penting dalam mendorong perkembangan kegiatan ekspor dan impor barang produksi di Kabupaten tersebut. Khususnya pergerakan komoditi karet, kelapa sawit, dan kelapa dari wilayah Indragirihulu bagian utara dan Indragiri Hulu bagian selatan menuju Pelabuhan Kuala Enok sebesar 498.757,8 ton per tahun, serta dari wilayah Kuantan-Singingi dan Pelalawan menuju Pelabuhan Buatun sebesar 77.436,35 ton per tahun. Di samping itu Kabupaten Indragiri Hulu juga mempunyai pelabuhan yang cukup strategis sebagai pelabuhan ekspor yaitu Pelabuhan Rengat. Pelabuhan ini dapat mendukung pemasaran komoditi industri yang menjadi unggulan, terutama komoditi industri pertanian CPO.

3.3 Karakteristik Kabupaten Indragiri Hilir

3.3.1 Kondisi Fisik Dasar

Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah sekitar 11.605,97 km² terkenal dengan sebutan “Negeri Seribu Parit” karena kondisi alamnya yang sebagian berupa perairan dan rawa-rawa. Kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai, dengan panjang garis pantai 339,5 km dan luas perairan laut 6.318 km². Dengan demikian kabupaten ini mempunyai potensi sektor perikanan yang besar.

Kabupaten ini sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, sebelah selatan dengan Propinsi Jambi, sebelah barat dengan Kabupaten Indargiri Hulu, dan sebelah timur dengan Kabupaten Karimun. Keadaan daerahnya sebagian terdiri dari dataran rendah, rawa-rawa, *mangrove*, dan pulau-pulau kecil. Ketinggian wilayahnya relatif rendah yaitu antara 6 – 35 meter.

Prospek pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi, karena berada di pantai timur Sumatera dan berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam dan Karimun, serta berada di wilayah perairan yang mampu mengakses ke berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadikan kabupaten ini sebagai “Pintu Gerbang Pantai Timur Sumatera” dalam berbagai aktivitas pembangunan.

3.3.2 Pemanfaatan Lahan

Lahan yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir secara dominan diusahakan untuk pertanian dan perkebunan. Kabupaten ini merupakan lumbung padi bagi Propinsi Riau. Namun kenyataannya hingga saat ini, fungsi tersebut belum dapat dijalankan secara optimal, yaitu kabupaten tersebut belum mampu menjadi daerah penyuplai beras untuk kebutuhan Riau. Dari luas daratan Kabupaten Indragiri Hilir, maka penggunaan paling luas adalah untuk perkebunan seluas 447.006 Ha, sementara lahan sawah yang diusahakan hanya sekitar 57.642 Ha.

Selain kondisi alamnya yang cukup subur, Kabupaten Indragiri Hilir juga diuntungkan dengan letak geografisnya yang berada di belakang pusat pertumbuhan Pulau Batam dan Pulau Bintan serta kawasan IMS – GT. Dengan kondisi tersebut, maka lahan di wilayah tersebut diarahkan untuk sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan transportasi, baik darat maupun laut.

3.3.3 Penduduk dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2002 penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 615.615 jiwa yang terdiri dari laki-laki 311.830 jiwa dan perempuan 303.785 jiwa dengan tingkat kepadatan

penduduk rata-rata sebesar 53 jiwa per km². Berikut ini akan diuraikan tentang banyaknya penduduk Kabupaten Indragiri Hilir setelah dimekarkan (2000-2002).

TABEL III.6
BANYAKNYA PENDUDUK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERIODE
TAHUN 2000 – 2002

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2000	284.600	271.060	555.666
2001	308.319	299.337	607.656
2002	311.830	303.785	615.615

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2000-2002

Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Indragiri Hilir mengalami pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 3,47 % per tahun. Penduduk Indragiri Hilir merupakan suku Melayu yang lebih dikenal dengan “Melayu Riau”. Namun banyak juga terdapat warga pendatang yang kemudian menetap di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian corak budaya masyarakat di kabupaten itu relatif heterogen.

Dari sembilan lapangan usaha utama yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yaitu 74,39 % dan diikuti sektor perdagangan 11,07 %. Berikut ini adalah uraian banyaknya tenaga kerja yang dapat diserap oleh lapangan usaha yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

TABEL III.7
BANYAKNYA TENAGA KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DAN PROPINSI RIAU TAHUN 2000

No.	Lapangan Usaha	Tenaga Kerja	
		Indragiri Hilir	Riau
1	Pertanian	158.600	792.967
2	Pertambangan	400	41.060
3	Industri Pengolahan	7.280	130.914
4	Listrik/Gas	200	1.359
5	Bangunan	1.800	55.298
6	Perdagangan	23.600	332.935
7	Angkutan	8.000	99.638
8	Keuangan	200	14.125
9	Jasa-Jasa	13.120	180.793
	Jumlah	213.200	1.649.089

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka dan Riau Dalam Angka, 2000

Dari data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan mata pencaharian utama di Kabupaten Indragiri Hilir. Diikuti oleh sektor perdagangan yang berkembang pesat salah satunya akibat semakin berkembangnya Pelabuhan Kuala Enok sebagai pelabuhan ekspor di kabupaten tersebut.

3.3.4 Tinjauan Sektor Ekonomi

Kondisi perekonomian khususnya sektor ekonomi potensial di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III.8
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000-2002

No.	Lapangan Usaha	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002
1	Pertanian	6,36	6,82	6,77
2	Pertambangan	5,58	9,11	10,33
3	Industri Pengolahan	3,96	3,90	5,17
4	Listrik dan Air Minum	2,63	6,01	5,56
5	Bangunan	7,34	7,65	6,83
6	Perdagangan	2,27	6,48	6,80
7	Angkutan dan Komunikasi	4,44	7,04	6,98
8	Keuangan	(9,82)	(10,80)	(39,85)
9	Jasa-jasa	2,32	4,16	5,57
	Indragiri Hilir	2,89	4,16	2,05
	Riau	10,24	5,05	5,59

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2002

Dari tabel tersebut terlihat bahwa laju pertumbuhan Kabupaten Indragiri Hilir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Namun yang perlu dicermati adalah sektor industri pengolahan dan perdagangan. Kedua sektor ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal itu dipengaruhi oleh keberadaan Pelabuhan Kuala Enok yang sedikit banyak telah merangsang aktivitas perdagangan, terutama ekspor serta memudahkan dalam proses distribusi bahan baku dan pemasaran produk industri. Sementara untuk sektor pertanian cenderung tidak berkembang/stagnan. Hal itu dimungkinkan karena daya dukung lahan yang semakin menurun akibat terjadinya intrusi laut. padahal potensi pertanian dan

perkebunan kabupaten ini relatif besar, mengingat lahan yang dapat diusahakan pada sektor tersebut masih cukup luas.

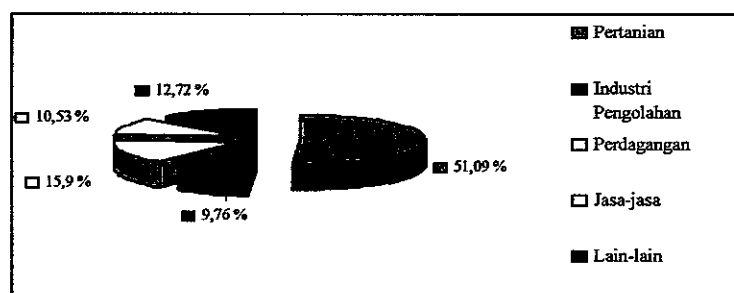
Selama periode 2000-2002, sektor pertanian masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Indragiri Hilir, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat hingga 51,09 % pada tahun 2002. Selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 15,90 %, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

TABEL III.9
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000-2002

No.	Lapangan Usaha	2000	2001	2002
1	Pertanian	48,10	49,73	51,09
2	Pertambangan	1,03	1,11	1,17
3	Industri Pengolahan	10,15	9,45	9,76
4	Listrik dan Air Minum	0,15	0,16	0,16
5	Bangunan	3,67	3,93	4,10
6	Perdagangan	14,58	15,19	15,90
7	Angkutan dan Komunikasi	3,03	3,20	3,33
8	Keuangan	9,41	7,19	3,96
9	Jasa-jasa	9,88	10,04	10,53
	Indragiri Hilir	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2002

Untuk mengetahui dominasi kontribusi yang diberikan oleh sektor utama tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :



GAMBAR 3.4
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2002

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2002

3.3.5 Tinjauan Sektor Pertanian dan Perkebunan

Komoditi yang dikembangkan di Kabupaten Indragiri Hilir terutama adalah padi, bahkan kabupaten ini seringkali dikatakan sebagai “lumbung padi Riau”. Namun sektor ini sulit untuk berkembang seiring dengan semakin menyusutnya luas areal panennya akibat terjadinya alih fungsi lahan. Sektor ini dikhawatirkan akan semakin tertinggal karena para investor rupanya lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada sektor perkebunan. Namun demikian sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian daerah, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

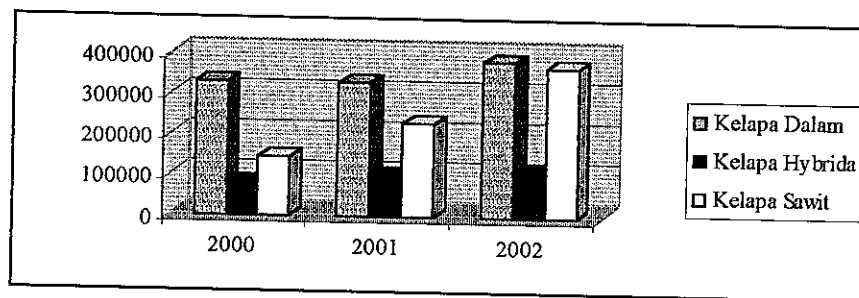
TABEL III.10
PERKEMBANGAN PRODUKSI PADI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2000-2002

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
2000	33.880	121.797,40
2001	35.152	126.764,90
2002	35.431	133.125,85

Sumber : Laporan Tahunan Distan Kab. Indragiri Hilir, 2000 - 2002

Bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, maka produksi padi di tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 5,02 %. Meskipun peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar, tetapi hal itu menunjukkan bahwa sektor pertanian masih potensial untuk terus dikembangkan lebih lanjut.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah potensial untuk pengembangan perkebunan. Hingga tahun 2002, subsektor perkebunan berkembang pesat, terutama pada komoditas kelapa dan kelapa sawit. Berikut ini adalah perkembangan komoditas kelapa dan kelapa sawit periode tahun 2000-2002 :



GAMBAR 3.5
PENINGKATAN PRODUKSI KARET DAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2001-2002

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2000-2002

Dari data tersebut terlihat bahwa peningkatan produksi kelapa sawit sangat pesat. Dengan demikian, kelapa sawit memiliki prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai komoditas unggulan. Hal itu perlu ditunjang dengan penanganan yang optimal dan profesional, seperti pengembangan agroindustri pada sektor tersebut, sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir.

3.3.6 Tinjauan Sektor Sarana dan Prasarana Transportasi

Sistem transportasi Kabupaten Indragiri Hilir dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem transportasi darat dan sistem transportasi air. Sistem transportasi barang dan penumpang yang terjadi di kabupaten ini terhadap daerah lain (Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu/dan sebaliknya) pada saat ini hanya dapat melalui :

- Pelalawan – Indragiri Hilir melalui 1 jalur :

Jalur sorek Satu – Ukui – Japura – Rengat – Kuala Cinaku – Rumbai Jaya – Sungai Salak – Tempuling - Tembilahan

- Indragiri Hulu – Indragiri Hilir melalui 1 jalur :

Jalur Rengat – Kuala Cinaku – Rumbai Jaya – Sungai Salak – Tempuling - Tembilahan

Di kabupaten itu juga terdapat Pelabuhan Kuala Enok, yang keberadaannya sangat strategis karena dapat mendukung aktivitas Agroindustri Kuala Enok. Fungsionalisasi pelabuhan tersebut dan juga jalur darat yang ada (Bagan Jaya – Enok – Kuala Enok) memudahkan bagi industri dalam mengakses bahan baku dan zona pemasaran.

3.4 Karakteristik Kabupaten Pelalawan

3.4.1 Kondisi Fisik Dasar

Kabupaten Pelalawan merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Kampar, dengan luas wilayah 12.490,42 km², atau 13,21 % dari luas wilayah Propinsi Riau. Kabupaten ini sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis, sebelah selatan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan-Singingi, sebelah barat dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, dan sebelah timur dengan Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang paling dekat dengan Ibukota Propinsi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di wilayah Riau Bagian Selatan, dengan ketinggian antara 5 – 40 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Pelalawan mencakup wilayah daratan dan sebagian lautan dengan topografi datar, bergelombang dan berbukit. Di kabupaten ini juga melintas sebuah sungai besar yakni Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km² dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 m.

3.4.2 Pemanfaatan Lahan

Dengan kondisi fisik alam yang cukup mendukung, maka Kabupaten Pelalawan sangat potensial untuk pengembangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sejauh ini lahan di wilayah itu sebagian besar diusahakan untuk pertanian dan

perkebunan. Berdasarkan data Distan Kabupaten Pelalawan tahun 2002, lahan sawah yang diusahakan di wilayah tersebut adalah 39.115 Ha dan lahan kering seluas 95.690,5 Ha. Selain pertanian dan perkebunan, di kabupaten ini juga berkembang kawasan industri baik besar maupun kecil yang relatif pesat.

Untuk usaha pertanian di kabupaten Pelalawan, didominasi oleh subsektor perkebunan, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

TABEL III.11
PENGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2002

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Negara	386.989	30,98
2	Perkebunan	214.841	17,20
3	Persawahan	38.706	3,10
4	Tanaman Pangan dan Hortikultura	46.463	3,72
5	Fasilitas Umum	563.043	45,00
	JUMLAH	1.249.042	100,00

Sumber : Laporan Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan, 2002

Luas areal perkebunan pada tahun 2002 mencapai 214.814 Ha dengan 4 jenis komoditi utama yaitu karet, kelapa sawit, kelapa, dan tanaman lainnya..

3.4.3 Penduduk dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2002 penduduk Kabupaten Pelalawan berjumlah 193.786 jiwa yang terdiri dari laki-laki 101.917 jiwa dan perempuan 91.868 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 16 jiwa per km². Berikut ini akan diuraikan tentang banyaknya penduduk Kabupaten Pelalawan :

TABEL III.12
BANYAKNYA PENDUDUK KABUPATEN PELALAWAN PERIODE
TAHUN 2000 – 2002

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2000	80.530	72.419	152.949
2001	88.983	79.754	168.737
2002	101.917	91.868	193.786

Sumber : Pelalawan Dalam Angka, 2002

Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Pelalawan mengalami pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 8,2 % per tahun. Pertumbuhan penduduk yang besar tersebut belum menjadi masalah yang berarti, mengingat kepadatan penduduknya yang masih jarang. Kualitas sumberdaya manusia di kabupaten tersebut tergolong sedang. Sumberdaya manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam mengembangkan aktivitas industri yang ada.

Dengan dibukanya industri, baik industri besar maupun kecil, maka kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan terbuka luas. Walaupun kenyataannya kesempatan tersebut lebih banyak diisi oleh kaum pendatang dari luar daerah. Sejauh ini konsentrasi terbesar masih berada pada bidang pertanian (termasuk perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan) yaitu sekitar 65 % dari tenaga kerja yang ada.

3.4.4 Tinjauan Sektor Ekonomi

Sebagai kabupaten pemekaran, Kabupaten Pelalawan telah mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat, terlebih lagi dengan adanya dukungan dua sektor ekonomi andalan yaitu sektor pertanian khususnya perkebunan dan sektor industri.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

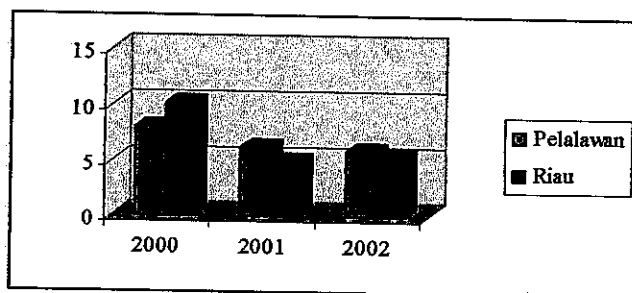
TABEL III.13
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN PELALAWAN
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000-2002

No.	Lapangan Usaha	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002
1	Pertanian	10,18	5,32	5,05
2	Pertambangan	5,71	11,87	10,89
3	Industri Pengolahan	9,72	7,53	5,90
4	Listrik dan Air Minum	2,32	6,31	5,76
5	Bangunan	8,87	8,64	8,65
6	Perdagangan	2,75	5,19	6,26
7	Angkutan dan komunikasi	5,33	3,49	4,42
8	Keuangan	-1,32	8,38	9,65
9	Jasa-jasa	3,20	2,58	4,32
	Pelalawan	8,03	6,18	5,84
	Riau	10,24	5,05	5,59

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan, 2002

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan selama periode 2000-2002 selalu memperlihatkan angka pertumbuhan yang positif, meskipun dari tahun ke tahun mengalami perlambatan. Melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan adanya beberapa sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan, diantaranya adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan lebih baik dari tahun sebelumnya salah satunya adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa.

Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan dengan Propinsi Riau adalah berikut ini :



GAMBAR 3.6
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN PELALAWAN DAN
PROPINSI RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2000-2002

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan, 2002

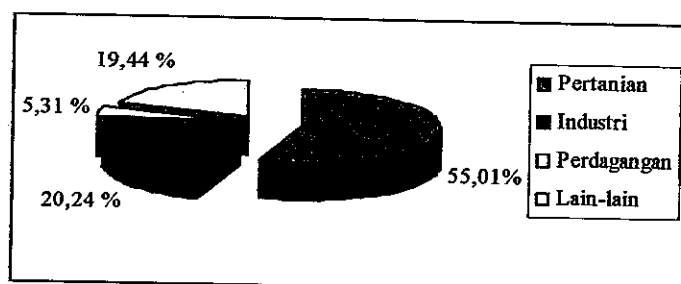
Selama periode tahun 2000-2002, tidak terjadi pergeseran antar sektor yang berarti dalam struktur perekonomian, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut ini :

TABEL III.14
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN PELALAWAN
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000-2002

No.	Lapangan Usaha	2000	2001	2002
1	Pertanian	54,62	55,75	55,01
2	Pertambangan	0,31	0,34	0,35
3	Industri Pengolahan	20,97	19,44	20,24
4	Listrik dan Air Minum	0,34	0,35	0,35
5	Bangunan	4,05	4,32	4,40
6	Perdagangan	5,27	5,32	5,31
7	Angkutan dan Komunikasi	2,82	2,83	2,86
8	Keuangan	4,86	5,05	5,06
9	Jasa-jasa	6,76	6,62	6,42
	Pelalawan	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan, 2002

Sektor pertanian dalam arti luas yang selama ini menjadi *leading sector* disamping sektor industri, peranannya terhadap PDRB kabupaten mengalami peningkatan, namun tidak begitu besar, seperti halnya sektor industri. Untuk mengetahui dominasi kontribusi yang diberikan oleh sektor utama tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :



GAMBAR 3.7
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN PELALAWAN
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2002

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan, 2002

Kontribusi terbesar masih diberikan oleh sektor pertanian, diikuti oleh industri pengolahan. Sementara kontribusi sektor lainnya bervariasi dari 0,35 % – 6,42 %.

Diantara beberapa kabupaten hasil pemekaran, Kabupaten Pelalawan termasuk salah satu kabupaten yang cepat berkembang. Banyak investor yang menanamkan modalnya di wilayah itu, khususnya sektor perkebunan dan industri pengolahan. Proses industrialisasi yang terjadi di wilayah ini berdampak positif terhadap berkembangnya sektor perdagangan, pertanian, jasa, dan lainnya. Ditunjang dengan letaknya yang strategis, diantara dua propinsi dan dilalui jalan lintas pulau maupun kabupaten. Dengan demikian, kabupaten ini terbuka dari semua jalur dan dapat berfungsi sebagai pintu gerbang Riau Bagian Selatan terhadap Ibukota Propinsi. Secara ekonomis, kabupaten ini potensial sebagai lokasi industri.

3.4.5 Tinjauan Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian dan perkebunan memang masih memegang peranan penting terhadap perekonomian Kabupaten Pelalawan. Namun saat ini sektor tersebut lebih berfungsi sebagai penyokong industri yang ada, khususnya agroindustri (industri perkebunan). Letak geografis Kabupaten Pelalawan yang berada di poros jalan lintas timur Sumatera sangat strategis, ditunjang dengan areal perkebunan kelapa, kelapa sawit, dan karet, memungkinkan untuk landasan pengembangan industri, terutama agroindustri.

Tanaman perkebunan lebih diminati untuk diusahakan dan hasilnya merupakan komoditi unggulan untuk diperdagangkan hingga daerah lain (ekspor), khususnya tanaman perkebunan kelapa sawit. Namun demikian komoditi terbesar masih disumbangkan oleh tanaman kelapa yaitu sebesar 91 %.

Pengembangan usaha perkebunan itu dilaksanakan melalui 2 bentuk usaha yaitu usaha Perkebunan Rakyat dan usaha Perkebunan Besar. Sementara untuk industri pengelolaan hasil perkebunan itu masih ditangani sepenuhnya oleh pihak swasta, namun untuk saat ini keberadaan industri tersebut masih cukup memadai. Industri pengolahan hasil perkebunan umumnya difokuskan pada pengolahan kelapa sawit.

3.4.6 Tinjauan Sektor Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu komponen penting bagi bergeraknya roda pemerintahan dan pembangunan. Sarana dan prasarana transportasi yang terdapat di Kabupaten Pelalawan terdiri dari dua jenis, yaitu transportasi darat dan air (sungai). Sejak dibukanya Jalan Raya Lintas Timur Sumatera, kabupaten ini mulai terbuka dari isolasi. Saat ini sarana jalan yang ada di kabupaten ini meliputi jalan negara \pm 150 km, jalan provinsi \pm 75 km, dan jalan kabupaten \pm 236 km.

Saat ini telah mulai dirintis pembangunan jaringan jalan Sorek – Sei Guntung (Pelalawan – Indragiri Hilir) dalam rangka mengantisipasi pesatnya perkembangan di wilayah timur yang membutuhkan pelayanan sistem transportasi. Jaringan jalan ini akan menjadi penghubung antara pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun daerah yang dilewati adalah Sorek, Pangkalan Panduk, Teluk Meranti, Teluk Air (Pulau Muda), Labuhan Bilik, Batas Indragiri Hilir. Daerah-daerah yang dilewati tersebut merupakan potensi pengembangan wilayah nantinya karena didukung oleh keberadaan perkebunan, baik yang dikelola oleh swasta maupun oleh masyarakat.

Selain itu, dengan keadaan geografisnya, di daerah ini terdapat sarana jalan sungai/laut yang sudah tersedia sejak dulu, terutama melalui Sungai Kampar dan anak-anak sungainya dan laut/selat di sekitar Kualakampar. Jaringan Sungai Kampar itu selain sebagai prasarana utama, seringkali juga dimanfaatkan untuk mendukung produksi CPO di Kabupaten Pelalawan. Transportasi sungai itu juga didukung dengan keberadaan pelabuhan dan dermaga.

3.5 Karakteristik Kabupaten Kuantan-Singingi

3.5.1 Kondisi Fisik Dasar

Kuantan-Singingi merupakan kabupaten pecahan dari Kabupaten Indragiri Hulu. Nama Kuantan-Singingi diambil dari nama dua buah sungai, yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Luas wilayah kabupaten ini $\pm 7.656,03 \text{ km}^2$ dengan ketinggian 25 – 30 meter di atas permukaan laut. Di wilayah ini terdapat bukit-bukit yang merupakan rangkaian Pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari utara ke selatan Pulau Sumatera. Kabupaten ini sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten

Pelalawan, sebelah selatan dengan Propinsi Jambi, sebelah barat dengan Propinsi Sumatera Barat, dan sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Secara geografis Kabupaten Kuantan-Singingi memiliki letak yang kurang menguntungkan terutama jika dikaitkan dengan kemampuan ekspor terhadap produk unggulan daerah. Untuk menjual berbagai komoditas ke luar negeri harus melewati beberapa wilayah kabupaten lainnya. Hanya saja dalam skala propinsi, kabupaten ini mampu menjadi penghubung perekonomian antara Propinsi Riau dengan Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Barat dengan wilayah Indragiri Hulu di Propinsi Riau.

Secara umum karakteristik fisik dan sumberdaya alam Kabupaten Kuantan-Singingi hampir sama dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten induknya tersebut, Kabupaten Kuantan-Singingi lebih potensial dan prospektif.

3.5.2 Pemanfaatan Lahan

Lahan yang terdapat di Kabupaten Kuantan-Singingi secara dominan diusahakan untuk pertanian dan perkebunan, yang mana selama ini sektor tersebut merupakan penopang perekonomian masyarakat. Selain itu juga terdapat aktivitas industri, pertambangan, dan pariwisata yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut.

Kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Kuantan-Singingi adalah persoalan transportasi, yang hingga saat ini aksesibilitas baik ke luar maupun ke dalam wilayah ini masih relatif sulit. Dengan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki, kendala tersebut akan dapat menghambat proses pembangunan daerah. Dengan demikian perlu adanya upaya untuk “membuka” wilayah itu dari keterisolasian.

3.5.3 Penduduk dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2002 penduduk Kabupaten Kuantan-Singingi berjumlah 226.665 jiwa yang terdiri dari laki-laki 114.334 jiwa dan perempuan 112.220 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 28 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,2 % per tahun. Pertumbuhan tersebut relatif rendah jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani, sedangkan yang bekerja di sektor industri relatif kecil, yakni 2 % dari total penduduk.

Masalah penduduk di kabupaten Kuantan-Singingi sama halnya dengan permasalahan penduduk di daerah lainnya yaitu bagaimana untuk mencapai manusia yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang terkendali.

Dalam hal ketenagakerjaan, jenis lapangan usaha paling besar menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, yaitu 82,51 %. Berikut ini adalah uraian banyaknya tenaga kerja yang dapat diserap oleh lapangan usaha yang ada di Kabupaten Kuantan-Singingi.

TABEL III.15
BANYAKNYA TENAGA KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA
DI KABUPATEN KUANTAN-SINGINGI DAN PROPINSI RIAU TAHUN 2000

No.	Lapangan Usaha	Tenaga Kerja	
		Kuantan-Singingi	Riau
1	Pertanian	144.654	792.967
2	Pertambangan	211	41.060
3	Industri Pengolahan	4.155	130.914
4	Listrik/Gas	88	1.359
5	Bangunan	3.331	55.298
6	Perdagangan	7.416	332.935
7	Angkutan	3.243	99.638
8	Keuangan	141	14.125
9	Jasa-Jasa	12.237	180.793
	Jumlah	175.476	1.649.089

Sumber : Kuantan-Singingi Dalam Angka dan Riau Dalam Angka, 2000

Masih dominannya sektor pertanian dalam kehidupan masyarakat Kuantan-Singingi perlu didukung dengan aspek pemasaran yang baik. Mengingat hingga saat ini

kesejahteraan petani di wilayah tersebut masih relatif rendah, salah satunya akibat kendala dalam pemasaran hasil pertanian.

3.5.4 Tinjauan Sektor Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diamati dari pertumbuhan PDRB-nya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuantan-Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL III.16
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KUANTAN-SINGINGI
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2001-2002

No.	Lapangan Usaha	Tahun 2001	Tahun 2002
1	Pertanian	4,22	4,10
2	Pertambangan	7,41	6,12
3	Industri Pengolahan	6,68	5,45
4	Listrik dan Air Minum	4,47	4,98
5	Bangunan	8,59	5,08
6	Perdagangan	4,87	6,13
7	Angkutan dan Komunikasi	9,08	6,92
8	Keuangan	7,14	5,91
9	Jasa-jasa	5,13	6,06
	Kuantan-Singingi	5,43	4,93
	Riau	5,05	5,59

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan-Singingi, 2002

Dari tabel tersebut terlihat bahwa hampir semua sektor mengalami penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2002. Hanya sektor perdagangan yang pertumbuhannya mampu tumbuh sebesar 6,13 % lebih tinggi dibanding pada tahun 2001. Tidak terkelolanya sumberdaya alam secara optimal, boleh jadi menyebabkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut masih relatif kecil. Untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, maka perlu dilakukan pembenahan pada berbagai aspek, diantaranya memperbaiki kinerja pemerintahan serta membuka daerah-daerah yang masih terisolasi.

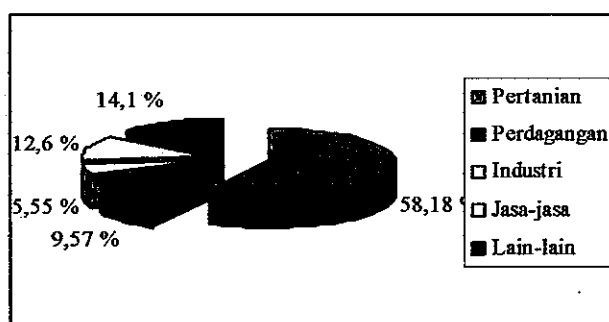
Selama periode tersebut, sektor yang memberikan kontribusi relatif besar terhadap perekonomian daerah adalah sektor pertanian, sekalipun mengalami penurunan dari 59,26 % menjadi 58,19 %, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut ini :

TABEL III.17
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN KUANTAN-SINGINGI
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000-2002

No.	Lapangan Usaha	2000	2001	2002
1	Pertanian	59,61	59,26	58,18
2	Pertambangan	1,91	1,96	2,06
3	Industri Pengolahan	5,60	5,40	5,55
4	Listrik dan Air Minum	0,35	0,35	0,35
5	Bangunan	6,04	6,34	6,45
6	Perdagangan	9,60	9,57	9,57
7	Angkutan dan Komunikasi	2,12	2,21	2,29
8	Keuangan	2,86	2,92	2,95
9	Jasa-jasa	11,91	11,99	12,60
	Kuantan-Singingi	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan-Singingi, 2002

Sementara itu kontribusi terbesar kedua diberikan oleh sektor perdagangan dan jasa-jasa. Untuk mengetahui dominasi kontribusi yang diberikan oleh sektor utama tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :



GAMBAR 3.8
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN KUANTAN-SINGINGI
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2002

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2002

Kontribusi terbesar masih diberikan oleh sektor pertanian, meskipun sektor tersebut mengalami penurunan di tahun 2002. Sementara sektor lainnya umumnya memberikan kontribusi yang relatif kecil.

3.5.5 Tinjauan Sektor Pertanian dan Perkebunan

Karakteristik pertanian Kabupaten Kuantan Singingi secara umum hampir sama dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Produk unggulan yang dihasilkan berupa tanaman padi, sedangkan di bidang perkebunan adalah tanaman karet, kelapa, dan kelapa sawit.

Hasil produksi pertanian mengalami peningkatan cukup pesat dari tahun ke tahun. Produksi padi pada tahun 2000 sebesar 70.056,74 ton gabah kering (naik 16,27 %) dibandingkan dengan tahun 1999, yang terdiri dari produksi padi sawah 60.312,91 ton gabah kering (21,56 %) dan padi gogo sebesar 9.743,83 ton gabah (-8,25 %). Produksi palawija tahun 2000 adalah sebesar 18.483,50 ton, hortikultura pada tahun 2000 sebesar 4.729,25 ton sedangkan pada tahun 1999 sebesar 3.103,80 ton atau meningkat sebesar 52,37%. Walaupun terjadi peningkatan dari hasil produk tersebut, namun masih belum bisa memenuhi kebutuhan di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga untuk pemenuhannya sebagian besar masih didatangkan dari Propinsi Sumatera barat.

3.5.6 Tinjauan Sektor Sarana dan Prasarana Transportasi

Sistem transportasi di Kabupaten Kuantan-Singingi umumnya adalah sistem transportasi darat. Meskipun secara ekonomi letak kabupaten ini kurang menguntungkan, karena untuk mengekspor produk lokal mereka harus melalui wilayah lain, tetapi kabupaten ini mempunyai potensi sebagai penghubung antar kabupaten bahkan antar propinsi.

Infrastruktur yang menghubungkan Kabupaten Kuantan-Singingi dengan wilayah lain hingga saat ini cukup memadai. Hubungan ke sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan ke sebelah barat dengan Propinsi Sumatera Barat cukup baik untuk mendukung lalu lintas uang dan barang. Tetapi untuk meningkatkan intensitasnya, maka perlu dibuka jalur baru terutama untuk daerah-daerah penghasil komoditi unggulan.

3.6 Variabel Perekat Regionalisasi

Dari uraian karakteristik tiap kabupaten tersebut di atas, maka terlihat bahwa setiap kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka keempat kabupaten tersebut dapat melaksanakan mekanisme pembangunan dengan berbasis “kebersamaan” salah satunya dengan kerjasama antar daerah. Namun untuk mewujudkan hal itu, harus ada aspek interdependensi dan interkoneksi antar kabupaten yang selanjutnya dapat mengarah pada penyatuan kepentingan.

Dalam membentuk kerjasama diperlukan beberapa motivasi yang kuat, tidak hanya tujuan bersama saja. Namun juga faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan perlunya kerjasama. Berdasarkan rumusan teori dan dibandingkan dengan karakteristik wilayah Riau Bagian Selatan, maka faktor-faktor perlunya kerjasama di wilayah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL III.18
FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KERJASAMA DI WILAYAH
RIAU BAGIAN SELATAN

No	Faktor Pendorong Kerjasama	Uraian
1	Sistem ekonomi wilayah yang saling menguntungkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem ekonomi wilayah Riau bagian Selatan adalah sistem ekonomi agraris dengan komoditi unggulan padi, kelapa sawit, kelapa, dan karet ▪ Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan di keempat kabupaten yang dapat diperkuat dengan dijalinnya interaksi antar pusat-pusat pertumbuhan tersebut dengan membuka jaringan transportasi ▪ Adanya dukungan segitiga perdagangan IMS-GT dan merupakan bagian dari Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok (Rencana Strategis Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok,2001)
2	Kedekatan wilayah secara geografis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saling berbatasan satu sama lain dan dipengaruhi oleh iklim, topografi, dan kondisi ekologis yang hampir sama. ▪ Berada pada daerah pengaliran sungai yang sama (keterkaitan hulu-hilir) (Riau Abad 21)
3	Komitmen bersama antara pemerintah	Kesepakatan Bersama Lintas Kabupaten wilayah Riau Bagian Selatan 14 Desember 2002

4	Koordinasi kebijakan antar pemerintah	Koordinasi dalam pembangunan jaringan jalan khususnya untuk daerah perbatasan (kuisisioner Dinas Perhubungan, Bappeda)
5	Ketersediaan prasarana fisik dan komersial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan sarana dan prasarana transportasi air yang dilengkapi pelabuhan sepanjang sungai, dengan Pelabuhan Kuala Enok sebagai pelabuhan ekspor utama ▪ Sarana dan prasarana transportasi darat masih belum memadai dengan terbatasnya akses ke kantong-kantong produksi dan akses antar kabupaten (Riau Abad 21)
6	Dukungan sektor swasta	Semakin meningkatnya investasi swasta di sektor <i>agro based industry</i> , di satu sisi menguntungkan wilayah tersebut, namun di sisi lain menuntut adanya dukungan infrastruktur dari pemerintah keempat kabupaten, terutama prasarana transportasi (Riau Abad 21)
7	Realisasi ekspor yang menguntungkan	Komoditi unggulan dari sektor perkebunan kelapa sawit yang sangat diminati oleh pasar luar negeri (Riau Abad 21)
8	Sosial budaya dan historis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan adanya kedekatan geografis, maka secara otomatis berpengaruh pada kondisi sosial budaya masyarakat setempat, yang mana keempat kabupaten tersebut umumnya terdiri dari suku Melayu yang sering disebut "Melayu Riau" ▪ Secara historis, keempat daerah tersebut tidak dapat dipisahkan, mengingat dahulu tiga diantaranya merupakan satu wilayah administratif sebelum akhirnya dimekarkan, sehingga unsur saling ketergantungan belum dapat dihilangkan (Riau Abad 21).
9	Potensi sumber daya alam	Adanya potensi sumber daya alam yang hampir sama, yaitu pertanian dan perkebunan (padi dan kelapa sawit). Namun terdapat kendala dalam hal pemasaran dan distribusinya. Untuk memecahkan permasalahan tersebut perlu koordinasi dalam suatu mekanisme kerjasama untuk mendukung kelancaran dan efisiensi dalam upaya peningkatan potensi tersebut (Riau Abad 21)
10	Aspek Pembiayaan pembangunan	Dengan adanya <i>sharing</i> dana antar kabupaten dalam melaksanakan pembangunan, maka beban pembiayaan pembangunan bagi masing-masing kabupaten menjadi lebih ringan (Kesepakatan Bersama Pembangunan Lintas Kabupaten Riau Bag. Selatan, 2002)

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dalam melaksanakan pembangunan ini setiap daerah tidaklah mungkin lepas dari masalah yang harus dihadapi dan harus dipecahkan sendiri baik masalah intern maupun ekstern baik menyangkut kepentingan daerah sendiri maupun kepentingan bersama dengan daerah lain yang saling berkaitan dan ketergantungan. Dengan pertimbangan tersebut dan ditunjang kondisi wilayah yang dimiliki, maka kemungkinan untuk kerjasama di wilayah Riau bagian Selatan telah terbuka.



**MAGISTER PERENCANAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TESIS

PETA

ADMINISTRASI RIAU BAGIAN SELATAN

**POTENSI KERJASAMA REGIONAL RIAU
BAGIAN SELATAN SEBAGAI UPAYA
PEMBANGUNAN WILAYAH**

Legenda :

- Batas Propinsi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Sungai
- Pelabuhan Samudera
- Rencana Jaringan Jalan
- Kabupaten Indragiri Hulu
- Kabupaten Kuantan Singingi
- Kabupaten Indragiri Hilir
- Kabupaten Pelalawan

Utara



SKALA

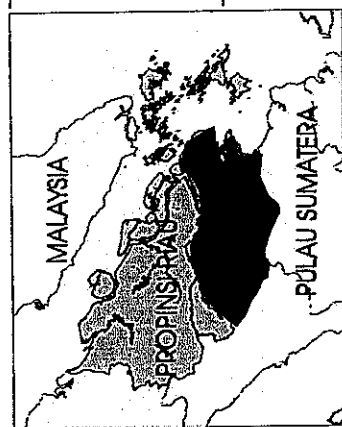
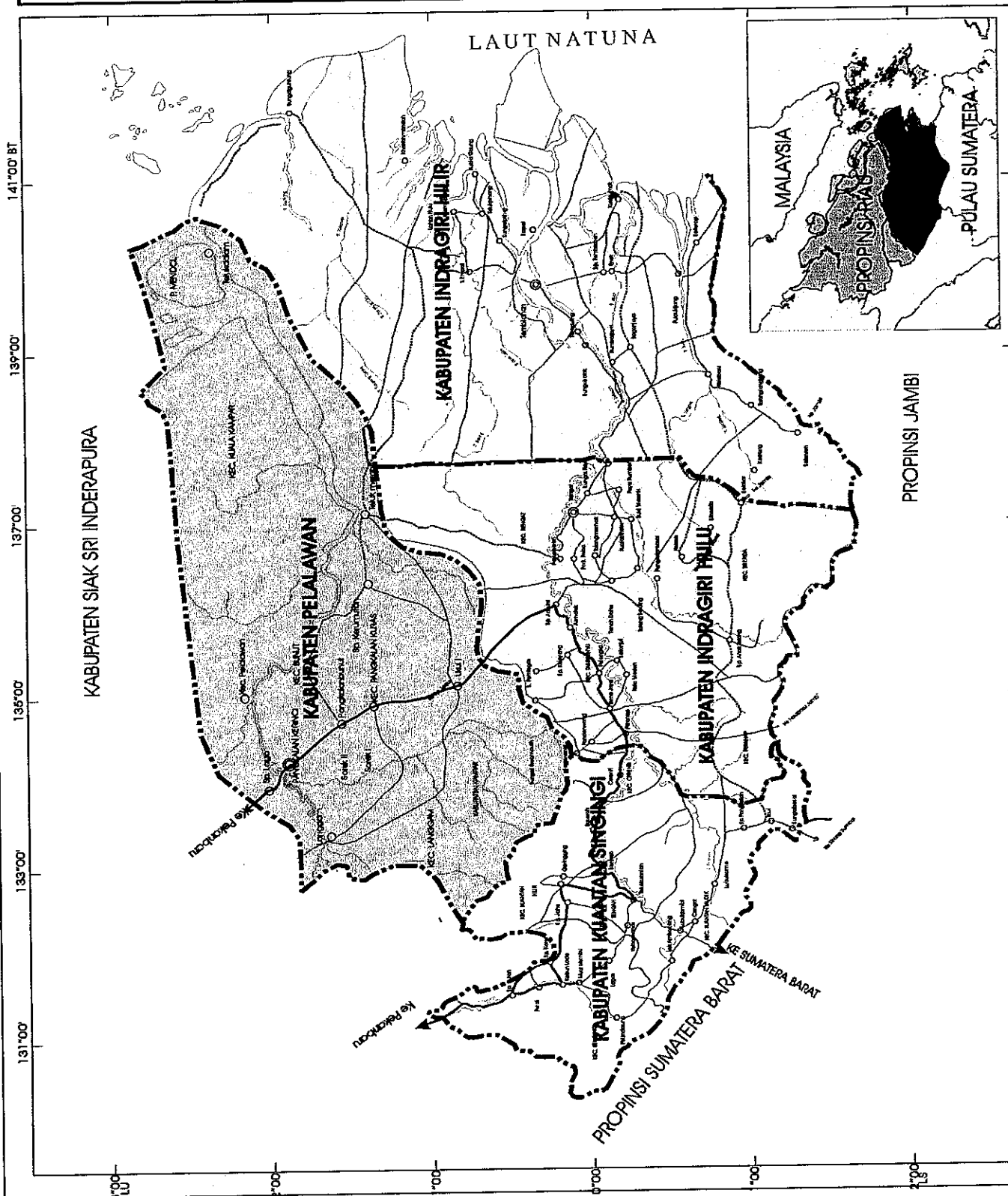


No. Peta

3.1 hml. 100

Sumber :

DINAS KIMPASMI PROVINSI RIAU





**MAGISTER PERENCANAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TESIS

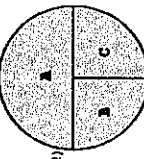
PETA

KEPADATAN PENDUDUK RIAU BAGIAN SELATAN

**POTENSI KERJASAMA REGIONAL RIAU
BAGIAN SELATAN SEBAGAI UPAYA
PEMBANGUNAN WILAYAH**

Legenda :

- Batas Propinsi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Sungai
- Pelabuhan Samudera
- Rencana Jaringan Jalan



A = Jumlah Penduduk
B = Juas Daerah (km²)
C = Kepadatan Penduduk (Rsd)

Ujara



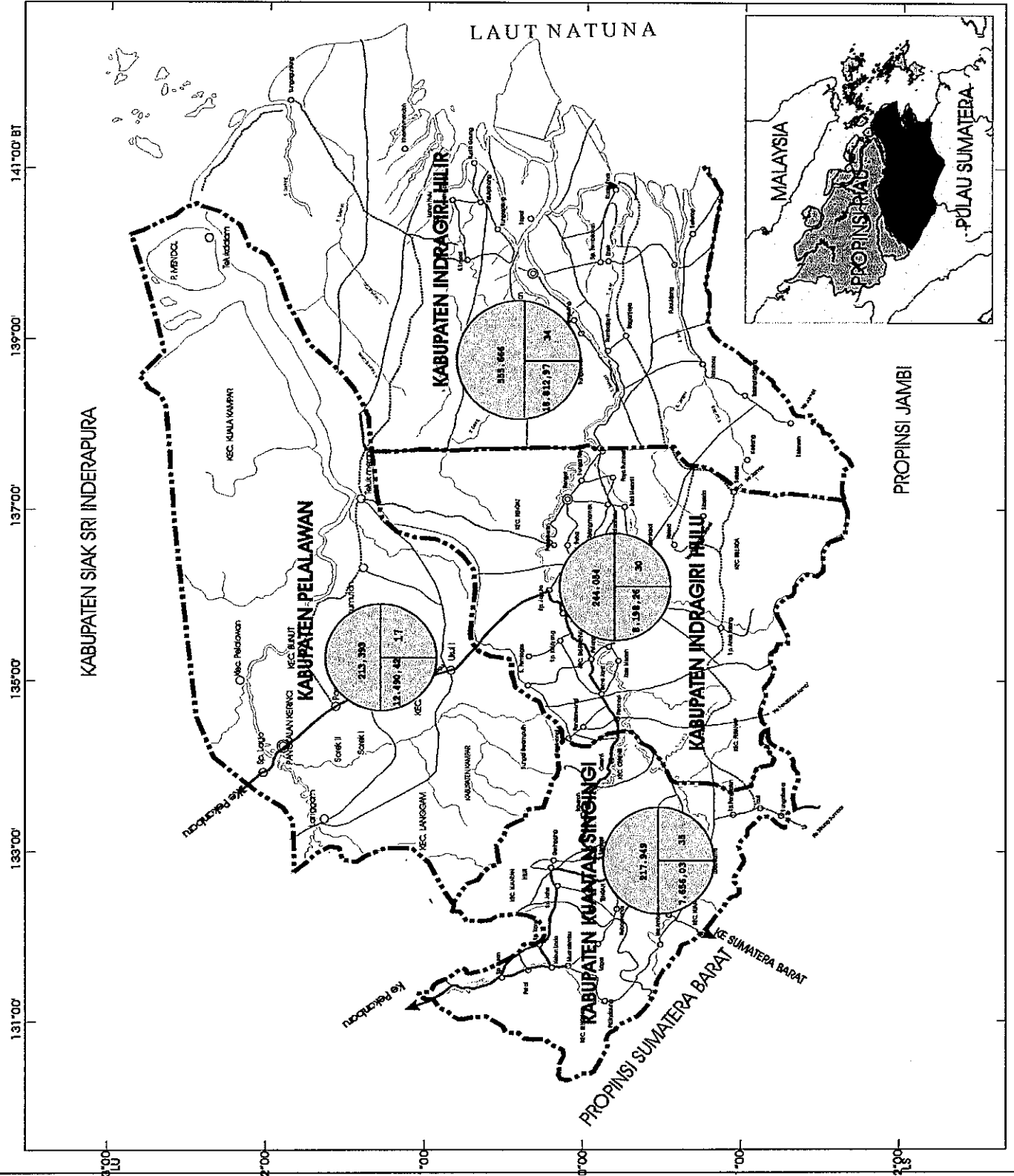
SKALA



No. Peta
3.3 Iml. 102

Sumber :

DINAS KIMPRASMIT PROPINSI RIAU





**MAGISTER PERENCANAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TESIS

PELA

**PROPORSI PEMANFAATAN LAHAN
PERYANIAN DAN PERKEBUNAN**

**POTENSI KERJASAMA REGIONAL RIAU
BAGIAN SELATAN SEBAGAI UPAYA
PEMBANGUNAN WILAYAH**

Legenda :

- Batas Propinsi.
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Sungai
- Pelabuhan Samudera
- Rencana Jaziringan Jalan
- Kabupaten Indragiri Hulu
- Kabupaten Kuantan Singingi
- Kabupaten Indragiri Hilir
- Kabupaten Pelalawan

Utara



SKALA

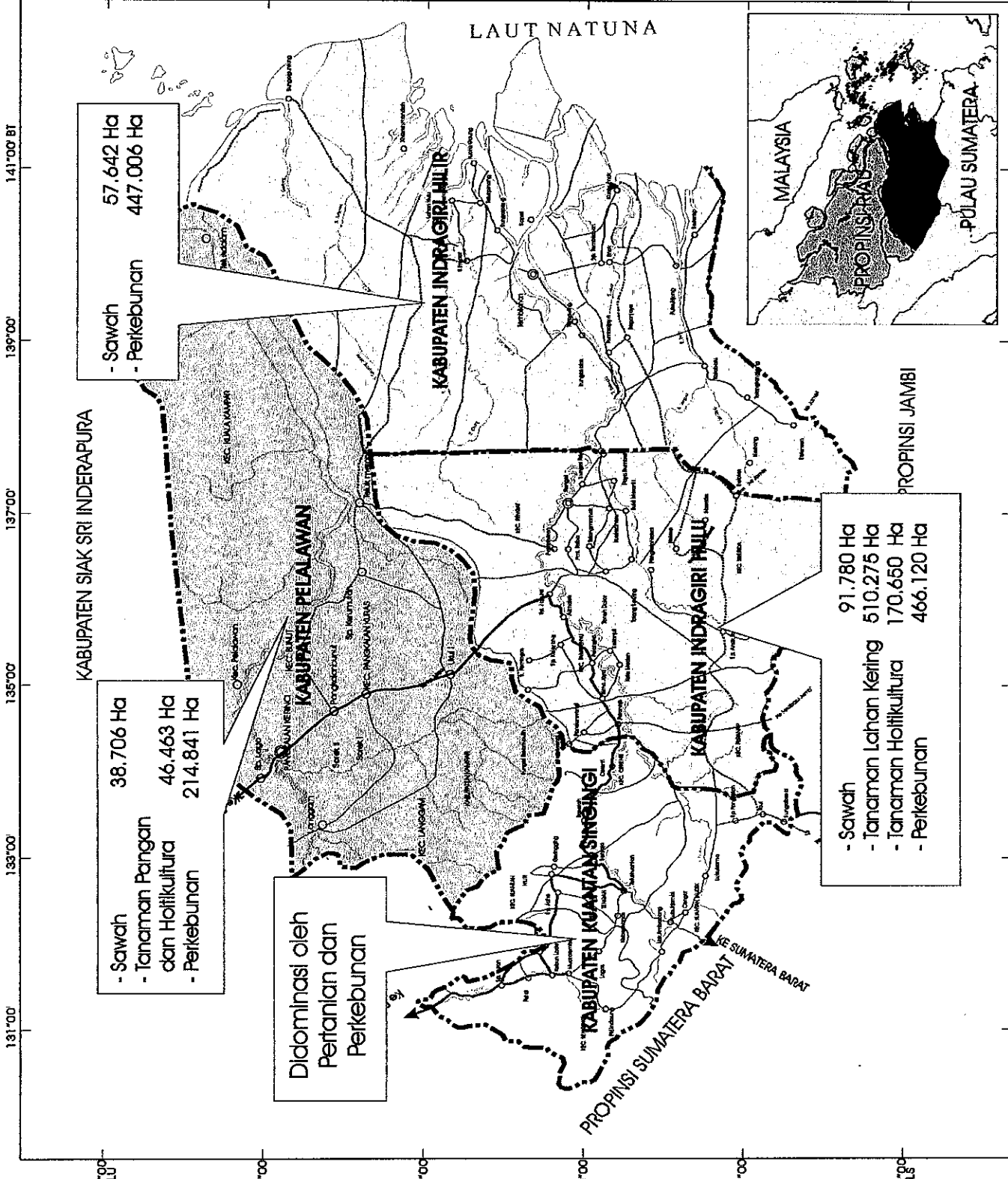


No. PeLa

3.4 hal. 103

Sumber :

DINAS KIMPRASWIL PROPINSI RIAU

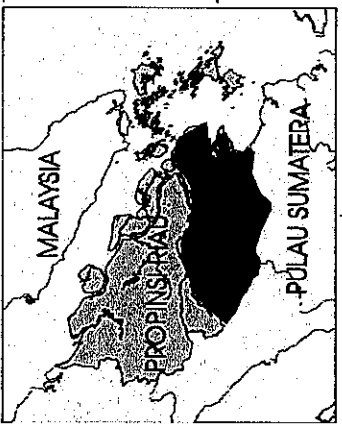


- Sawah 57.642 Ha
- Perkebunan 447.006 Ha

- Sawah 38.706 Ha
- Tanaman Pangan dan Hortikultura 46.463 Ha
- Perkebunan 214.841 Ha

Didominasi oleh Pertanian dan Perkebunan

- Sawah 91.780 Ha
- Tanaman Lahan Kering 510.275 Ha
- Tanaman Hortikultura 170.650 Ha
- Perkebunan 466.120 Ha



131°00' 133°00' 135°00' 137°00' 139°00' 141°00' BT

KABUPATEN SIAK SRI INDERAPURA

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PROPINSI JAMBI

PROPINSI SUMATERA BARAT

LAUT NATUNA

MALAYSIA

PROPINSI RIAU

PULAU SUMATERA

4°00' 2°00' 0°00' 0°00' 0°00' 0°00' 0°00' 2°00' 4°00'

BAB IV
ANALISIS POTENSI KERJASAMA ANTAR DAERAH
SEBAGAI PERWUJUDAN KONSEP REGIONALISASI
DI WILAYAH RIAU BAGIAN SELATAN

4.1 Analisis Penentuan Sektor-sektor Ekonomi Unggulan di Wilayah Riau Bagian Selatan

Perencanaan ekonomi di tiap-tiap wilayah dapat dicapai melalui pemanfaatan sektor-sektor ekonomi unggulan wilayah. Sektor ekonomi unggulan adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi sebagai tumpuan harapan pembangunan (Simatupang dalam Riyadi, 2003).

Dalam studi kajian potensi kerjasama antar daerah di wilayah Riau Bagian Selatan, terlebih dahulu ditentukan sektor ekonomi yang unggul (sektor basis) dari seluruh sektor atau lapangan usaha yang ada pada setiap kabupaten di wilayah tersebut. Sektor unggulan tersebut dapat menimbulkan efek berganda, yang artinya sektor tersebut dikembangkan akan menimbulkan atau akan dapat mengakibatkan munculnya atau berkembangnya kegiatan ekonomi lainnya. Berdasarkan perhitungan dengan metode LQ, maka sektor basis untuk masing-masing kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV.1
NILAI LQ BERDASARKAN PENDEKATAN PDRB
DI WILAYAH RIAU BAGIAN SELATAN TAHUN 2000

No.	Lapangan Usaha	Nilai LQ Kabupaten			
		Inhu	Inhil	Pelalawan	Kuansing
1	Pertanian	3.488	4.890	5.552	6.060
2	Pertambangan	0.229	0.019	0.006	0.035
3	Industri Pengolahan	1.060	0.638	1.319	0.352
4	Listrik dan Air Bersih	1.246	0.391	0.911	0.937
5	Bangunan	2.664	1.571	1.726	2.573
6	Perdagangan	1.376	1.858	0.671	1.223
7	Transportasi	1.531	1.126	1.046	0.786
8	Keuangan	1.056	2.912	1.504	0.886
9	Jasa-jasa	2.965	2.565	1.755	3.093

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sektor yang memiliki skor yang paling tinggi pada keempat kabupaten adalah sektor pertanian. Hal itu tidaklah mengherankan, mengingat selama ini pengembangan sektor pertanian mempunyai arti penting yang lain, baik dalam lingkup kabupaten maupun regional. Peran sektor pertanian, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan, juga sebagai penyokong aktivitas lain yang membutuhkan produk pertanian sebagai bahan bakunya. Sektor pertanian dalam hal ini juga mencakup sub sektor perkebunan sebagai bagian di dalamnya.

Berdasarkan sektor basis tersebut, maka dapat dibuat suatu arahan pengembangan perekonomian wilayah Riau Bagian Selatan, yang selanjutnya sebagai alternatif sektor yang strategis untuk dikerjasamakan.

TABEL IV.2
ARAHAN SEKTOR STRATEGIS SEBAGAI PENDORONG KEGIATAN
EKONOMI WILAYAH RIAU BAGIAN SELATAN

No.	Kabupaten	Sektor Strategis
1	Indragiri Hulu	a. Pertanian, termasuk subsektor perkebunan (LQ : 3,488) b. Transportasi (LQ : 1,531) c. Industri pengolahan (LQ : 1,060)
2	Indragiri Hilir	a. Pertanian termasuk perkebunan (LQ : 4,89) b. Transportasi (LQ : 1,126)
3	Pelalawan	a. Pertanian termasuk perkebunan (LQ : 5,552) b. Industri Pengolahan (LQ : 1,319) c. Transportasi (LQ : 1,046)
4	Kuantan-Singingi	a. Pertanian termasuk perkebunan (LQ : 6,060) b. Transportasi (LQ : 0,786)*

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Pada sektor yang diberi tanda (*) bukanlah sektor basis. Namun sektor tersebut dianggap strategis untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan demikian sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor yang prospektif untuk menjadi sektor basis, terutama jika didukung dengan pengelolaan yang profesional dan penambahan investasi. Sektor tersebut berperan dalam memantapkan sektor lainnya, sebagai contoh adalah pengembangan industri pengolahan yang berbasis pertanian (agroindustri) untuk lebih memacu sektor

pertanian yang selama ini cenderung mengalami penurunan. Begitu juga dengan sektor transportasi sebagai penunjang aktivitas ekonomi yang terjadi, yang berupa aktivitas memperoleh bahan baku, produksi, dan distribusi/pemasaran.

Dalam sektor pertanian, komoditi yang diunggulkan adalah tanaman padi sebagai makanan pokok masyarakat di Riau Bagian Selatan khususnya, dan Propinsi Riau umumnya. Sementara pada sub sektor perkebunan, komoditi yang menjadi unggulan adalah kelapa sawit karena komoditi tersebut selain yang paling dominan diantara komoditi lainnya, juga karena komoditi tersebut mengalami pertumbuhan yang positif secara signifikan dari tahun ke tahun. Terlebih lagi dengan semakin banyak dibukanya industri-industri yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit di wilayah Riau Bagian Selatan, khususnya Kabupaten Pelalawan.

Sektor industri juga dianggap sebagai sektor yang prospektif untuk dikembangkan, khususnya industri pengolahan produk pertanian dan perkebunan. Ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan lokasi yang strategis sehingga memudahkan dalam aksesibilitas dalam aktivitas industri. Pengembangan industri ini akan memberikan nilai positif bagi perkembangan sektor pertanian dan perkebunan, karena akan terjadi peningkatan permintaan bahan baku untuk industri. Permintaan bahan baku ini akan berdampak pada peningkatan permintaan produk pertanian dan perkebunan, yang selanjutnya akan merangsang sektor pertanian untuk meningkatkan produksinya.

Dasar penentuan sektor tersebut menjadi unggulan, selain dari hasil perhitungan nilai LQ, juga dengan membandingkan dengan kriteria komoditi unggulan berdasarkan literatur, yaitu sebagai berikut :

1. Menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian

Hingga saat ini, sektor pertanian dan perkebunan menjadi penggerak utama perekonomian wilayah Riau Bagian Selatan. Hal itu ditunjukkan dengan besarnya kontribusi yang diberikan sektor ini terhadap pendapatan daerah. Selama periode tahun 2000-2002, aktivitas sektor ini relatif meningkat. Khususnya untuk sub sektor perkebunan dengan kontribusi berkisar antara 39-60 %.

2. Mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang

Sektor industri di wilayah Riau Bagian Selatan menitikberatkan pada industri berbasis pertanian dan perkebunan, yang mana yang paling berkembang adalah industri CPO (*Crude Palm Oil*). Dengan demikian, terdapat *linkages* yang kuat dengan sektor pertanian sebagai penyedia bahan bakunya. *Linkages* tersebut akan diperkuat dengan pelayanan infrastruktur transportasi yang memadai.

3. Mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain

Sektor pertanian sebagai sektor unggulan hingga saat ini relatif mampu bersaing dengan wilayah lain. Terbukti dengan dijadikannya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai “lumbung padi” bagi Propinsi Riau. Selain itu, terdapat komoditi kelapa sawit yang sangat diminati oleh pasar luar negeri (Singapura).

4. Memiliki keterkaitan dengan daerah lain (komplementaritas)

Komplementaritas yang terbentuk yaitu antara aktivitas perkebunan dengan aktivitas industri. Aktivitas industri strategis berada di Kecamatan Tanah Merah Indragiri Hilir yang lokasinya berdekatan dengan Pelabuhan Kuala Enok dan di Kabupaten Pelalawan. Aktivitas industri ini berbasis pada komoditi pertanian sebagai bahan baku utamanya. Sementara bahan bakunya didapatkan dari kantong-kantong produksi yang tersebar di keempat kabupaten. Keberadaan industri ini

dapat meningkatkan nilai tambah komoditi unggulan yang dihasilkan oleh kantong-kantong produksi tersebut. Keterkaitan sektor pertanian dan industri tersebut perlu ditunjang dengan sistem pelayanan transportasi dalam pergerakan faktor-faktor produksi dan pemasaran.

5. Memiliki status teknologi yang terus meningkat

Pemanfaatan teknologi tepat guna sangat diperlukan, tidak hanya bagi aktivitas industri, tetapi juga bagi peningkatan produksi pertanian. Melalui inovasi teknologi, kualitas produk dapat ditingkatkan agar tetap memiliki daya saing terhadap produk sejenis di wilayah lain. Saat ini pemerintah daerah di keempat kabupaten sedang berusaha mengembangkan pola diversifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan kualitas produk pertanian.

6. Mampu menyerap tenaga kerja

Sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan prosentase antara 59 % hingga mencapai 83 %. Hal itu menunjukkan bahwa penyebaran mata pencaharian penduduk di wilayah tersebut belum seimbang. Namun hal itu dapat diantisipasi dengan meningkatkan profesionalisme masyarakat dalam menjalankan profesi tersebut. Diantaranya dengan penerapan teknologi tepat guna, dan pembentukan lembaga perekonomian masyarakat untuk memberdayakan masyarakat tersebut.

7. Mampu bertahan dalam jangka waktu tertentu

Sektor pertanian dan perkebunan tetap merupakan sektor unggulan di wilayah Riau Bagian Selatan dari tahun ke tahun, dan masih belum tergantikan oleh sektor lainnya. Sementara sektor industri masih relatif baru berkembang, namun terus

mengalami peningkatan yang signifikan. Sektor transportasi juga terus meningkat seiring dengan meningkatnya upaya pembangunan di wilayah tersebut.

8. Tidak rentan terhadap gejolak internal dan eksternal

Sektor-sektor unggulan yang terpilih tersebut dapat berkembang relatif stabil meskipun terjadi berbagai perubahan kondisi dan tatanan pembangunan, mulai dari terjadinya krisis ekonomi, globalisasi, hingga otonomi daerah yang berujung pada pemekaran wilayah.

9. Mendapatkan berbagai bentuk dukungan

Untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut, maka perlu adanya dukungan dari komponen lainnya, seperti keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, insentif/disinsentif, dan lain-lain.

10. Berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan

Pengembangan sektor-sektor pertanian dan industri di wilayah Riau Bagian Selatan menitikberatkan pada pendayagunaan sumberdaya lokal, sekaligus mengamankannya dari degradasi akibat tindakan-tindakan seperti alih fungsi lahan dan pencemaran.

Berdasarkan analisis LQ yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sektor unggulan yang terdapat di keempat kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan hampir sama, yaitu terdiri dari sektor pertanian, sektor industri, dan sektor transportasi. Meskipun sektor industri menjadi sektor basis hanya di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan. Namun perkembangan yang terjadi menunjukkan bahwa sektor tersebut prospektif di masa yang akan datang.

Dari analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor yang strategis untuk dikembangkan di wilayah Riau Bagian Selatan adalah sektor pertanian termasuk sub sektor

perkebunan, industri pengolahan produk pertanian, dan transportasi. Dalam hal ini sektor-sektor itu merupakan sektor basis yang sekaligus sektor prospektif untuk lebih berkembang, dengan saling menunjang satu sama lain. Keberadaan sektor-sektor tersebut diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya.

Sektor pertanian dipecah menjadi dua, yaitu sektor pertanian dan sektor perkebunan. Alasannya adalah sektor perkebunan memberikan kontribusi terbesar pada sektor tersebut serta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan pada saat sektor pertanian mengalami penurunan, sektor perkebunan justru mengalami peningkatan pesat. Untuk lebih memantapkan hasil dari analisis LQ, maka hasil dari analisis IQ tersebut dianalisis lebih lanjut dengan kriteria komoditi/sektor unggulan. Hasil dari analisis ini akan digunakan sebagai input dalam analisis SWOT.

4.2 Analisis Sektor-sektor yang Strategis untuk Dikerjasamakan

Analisis sektor unggulan tersebut merupakan langkah awal dalam merumuskan arah pembangunan selanjutnya. Masing-masing sektor unggulan tersebut kemudian dipetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi. Dengan demikian, dapat ditentukan strategi pembangunan secara lebih tepat, yang dalam hal ini diarahkan pada kerjasama antar daerah.

Analisis SWOT dilakukan dengan mengukur kekuatan, kelemahan pada sektor-sektor unggulan, sekaligus mengukur peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Setelah diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pada masing-masing sektor maka dapat ditentukan sektor yang paling unggul dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal ini sebagai masukan dalam menentukan sektor yang paling strategis untuk dikerjasamakan di wilayah Riau Bagian Selatan. Selain itu juga dapat dibuat strategi untuk meningkatkan kekuatan dan peluang sekaligus upaya untuk mengurangi kelemahan dan

tantangan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan bentuk kerjasama antar kabupaten berdasarkan sektor yang terpilih. Dalam analisis ini digunakan responden sebanyak 20 responden yang mewakili dinas-dinas yang terkait dengan aktivitas sektor unggulan, sehingga relatif memahami dan menguasai permasalahan yang dibahas.

Dalam menentukan sektor-sektor yang strategis untuk dikerjasamakan, maka diukur dari kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor unggulan dalam wilayah Riau Bagian Selatan serta peluang dan tantangan dari luar wilayah tersebut. Oleh karena itu digunakan metode analisis SWOT. Untuk mencapai optimalisasi analisis SWOT tersebut, maka pendekatan bahasan dilakukan dengan membahas sektor yang didapatkan dari hasil analisis sebelumnya, yang kemudian akan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada masing-masing kabupaten, kebijaksanaan wilayah Riau Bagian Selatan, serta komponen eksternal lain yang mempengaruhinya. Cara-cara penentuan faktor-faktor strategi internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

- Faktor strategi internal

1. Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan sektor unggulan dalam kolom 1
2. Memberi bobot masing-masing faktor dengan skala mulai dari 1 (sangat tidak penting) sampai 5 (sangat penting), berdasarkan pentingnya faktor tersebut terhadap posisi strategis sektor (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00)
3. Menghitung rating untuk masing-masing faktor dengan skala mulai dari 4 hingga 1 berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap sektor. Variabel kekuatan diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkan satu sektor terhadap sektor yang lain

4. Mengalikan bobot dan rating untuk mendapatkan skor pembobotan
 5. Menjumlahkan skor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan pada sektor tersebut
- Faktor strategi eksternal
 1. Menentukan peluang dan ancaman yang mempengaruhi sektor
 2. Memberi bobot masing-masing faktor mulai dari 1 (sangat tidak penting) sampai 5 (sangat penting) dengan dasarnya adalah dampak terhadap sektor
 3. Menghitung rating untuk masing-masing faktor dengan skala mulai dari 4 sampai 1 berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap sektor. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang yang semakin besar diberi rating +4 dan yang peluangnya kecil diberi rating +1. Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya.
 4. Mengalikan bobot dengan rating untuk memperoleh skor pembobotan
 5. Menjumlahkan skor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan (Rangkuti, 2001)

Sebagai langkah pertama dalam analisis ini, maka terlebih dahulu ditentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan sektor-sektor strategis yang telah ditentukan pada analisis sebelumnya (faktor internal) dan faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan bagi sektor tersebut (faktor eksternal), sebagai potensi kerjasama di wilayah Riau Bagian Selatan.

- Faktor internal

Kekuatan

1. Ketersediaan lahan, SDM yang memadai, inovasi teknologi tepat guna, dan dukungan swasta

2. Lokasi yang strategis dan infrastruktur pendukung
3. Tingginya perkembangan/kemajuan sektor selama 3 tahun terakhir
4. Merupakan salah satu agenda dalam Kesepakatan Bersama Pembangunan Lintas Kabupaten wilayah Riau Bagian Selatan

Kelemahan

1. Kondisi lahan yang kurang mendukung, berupa rawa, tanah bergambut dan rawan banjir
 2. Akses terhadap kantong-kantong produksi, terhadap pasar, dan antar kabupaten masih sangat terbatas
 3. Keterbatasan penyediaan dana dari pemerintah kabupaten
 4. Penguasaan teknologi yang masih kurang
- Faktor eksternal

Peluang

1. Kedekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan IMS-GT, Batam, dan Natuna
2. Permintaan pasar terhadap komoditi unggulan semakin meningkat
3. Peluang investasi yang besar
4. Terbukanya akses terhadap pasar luar negeri/ekspor

Tantangan

1. Persaingan dalam memperoleh pasar
2. Stabilitas politik dan ekonomi yang rendah
3. Kurangnya informasi terhadap pasar luar negeri
4. Dampak kebijakan otonomi daerah dan pemekaran wilayah yang menuntut kesiapan kabupaten yang bersangkutan

Matriks untuk proses analisis kali ini menggunakan matriks profil kompetitif untuk mengetahui posisi relatif sektor yang dianalisis dibandingkan sektor lainnya. Sektor tersebut diberi rating yang berbeda yang tergantung pada kondisi relatif sektor tersebut.

Adapun nilai rating untuk sector tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL IV.3
POSISI KOMPETITIF RELATIF SEKTOR

Rating	Keterangan
1	Sektor tersebut sangat lemah dibandingkan sektor yang lain
2	Sektor tersebut sedikit lebih lemah dibandingkan sektor yang lain
3	Sektor tersebut sedikit lebih kuat dibandingkan sektor yang lain
4	Sektor tersebut paling kuat dibandingkan sektor yang lain

Sumber : Rangkuti, 2001

Faktor-faktor tersebut kemudian dijabarkan dalam matriks sebagai berikut :

TABEL IV.4
FAKTOR STRATEGI INTERNAL

Faktor Strategis	Bobot	Pertanian		Perkebunan		Industri		Transportasi	
		Rating	Skor	Rating	Skor	Rating	Skor	Rating	Skor
S : Ketersediaan lahan, SDM yang memadai, inovasi teknologi tepat guna, dan dukungan swasta	0,14	4	0,56	4	0,56	4	0,56	4	0,56
S : Lokasi yang strategis dan infrastruktur pendukung	0,14	3	0,42	3	0,42	4	0,56	4	0,56
S : Tingginya perkembangan /kemajuan sektor selama 3 tahun terakhir	0,13	4	0,52	4	0,52	3	0,39	3	0,39
S : Merupakan salah satu agenda dalam Kesepakatan Bersama Pembangunan Lintas Kabupaten wilayah Riau Bagian Selatan	0,13	3	0,39	3	0,39	3	0,39	4	0,52
Total Skor S			1,89		1,89		1,90		2,03
W : Kondisi lahan yang berupa rawa, tanah bergambut dan rawan banjir	0,12	4	0,48	3	0,36	3	0,36	3	0,36

W : Akses terhadap kantong-kantong produksi, terhadap pasar, dan antar kabupaten masih sangat terbatas	0,13	4	0,52	4	0,52	4	0,52	3	0,39
W : Keterbatasan penyediaan dana dari pemerintah kabupaten	0,12	3	0,36	3	0,36	3	0,36	4	0,48
W : Penguasaan teknologi yang masih kurang	0,09	3	0,27	3	0,27	4	0,36	3	0,27
Total Skor W			1,63		1,51		1,60		1,50
S - W			0,26		0,38		0,30		0,53

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Semakin besar skor S yang dimiliki sektor menunjukkan bahwa kekuatan sektor tersebut juga semakin besar. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kekuatan terbesar dimiliki oleh sektor transportasi, kemudian diikuti sektor industri, pertanian dan perkebunan. Kekuatan sektor tersebut terletak pada adanya persamaan persepsi pemerintah kabupaten-kabupaten di Riau Bagian Selatan akan pentingnya sektor tersebut dalam upaya pembangunan wilayah Riau Bagian Selatan dan dalam rangka memacu pertumbuhan sektor-sektor lainnya, yang tercermin dalam Kesepakatan Bersama Pembangunan Lintas Kabupaten di Riau Bagian Selatan.

Kelemahan terbesar dimiliki oleh sektor pertanian, seperti terlihat pada skor W sektor pertanian bernilai paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya produksi pertanian, khususnya tanaman padi di wilayah tersebut. Penyebabnya karena pengelolaan sektor ini masih kurang optimal dan profesional, yaitu karena keterbatasan inovasi teknologi dan sumber daya manusia. Di sisi lain, secara geografis terdapat kendala dimana kondisi tanah di wilayah tersebut umumnya berupa rawa dan lahan bergambut terutama di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Sedangkan di Kabupaten Indragiri Hilir kondisi tanahnya rawan terhadap intrusi air laut. Hal ini tentu saja dapat menghambat upaya peningkatan produksi pertanian.

Hasil tersebut kemudian akan dipadukan dengan komponen faktor eksternal sebagai berikut :

TABEL IV.5
FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL

Faktor Strategis	Bobot	Pertanian		Perkebunan		Industri		Transportasi	
		Rating	Skor	Rating	Skor	Rating	Skor	Rating	Skor
O : Kedekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan IMS-GT, Batam, dan Natuna	0,16	2	0,32	4	0,64	4	0,64	4	0,64
O : Permintaan pasar terhadap komoditi unggulan semakin meningkat	0,16	4	0,64	4	0,64	3	0,48	4	0,64
O : Peluang investasi yang besar	0,16	2	0,32	4	0,64	4	0,64	3	0,48
O : Terbukanya akses terhadap pasar luar negeri/ekspor	0,16	2	0,32	3	0,48	4	0,64	3	0,48
Total Skor O			1,60		2,40		2,40		2,24
T : Persaingan dalam memperoleh pasar	0,09	2	0,18	3	0,27	4	0,36	2	0,18
T : Stabilitas politik dan ekonomi yang rendah	0,10	2	0,20	2	0,20	3	0,30	2	0,20
T : Kurangnya informasi terhadap pasar luar negeri	0,09	1	0,09	3	0,27	3	0,27	2	0,18
T : Dampak kebijakan otonomi daerah dan pemekaran wilayah yang menuntut kesiapan kabupaten yang bersangkutan	0,08	2	0,16	2	0,16	2	0,16	3	0,24
Total Skor T			0,63		0,90		1,09		0,80
O - T			0,97		1,50		1,31		1,44

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Peluang terbesar dimiliki oleh dua sektor, yaitu sektor perkebunan dan sektor industri. Munculnya peluang tersebut dipengaruhi oleh letak wilayah yang strategis karena dikelilingi pusat-pusat pertumbuhan Natuna dan Batam serta segitiga Perdagangan Sijori. Ditambah lagi permintaan pasar akan komoditi perkebunan dan produk industri olahan yang tinggi. Dengan demikian, perlu upaya tindak lanjut dalam rangka memanfaatkan

peluang yang ada. Diantaranya dengan memperbaiki kinerja jaringan distribusi hasil perkebunan dan akses ke sumber bahan baku dan daerah pemasaran bagi industri.

Adapun tantangan yang terbesar dihadapi oleh sektor industri, yang mana tingkat persaingan semakin besar, sementara iklim dunia usaha yang relatif kurang stabil dan informasi mengenai pasar yang masih terbatas. Untuk mengantisipasi hal itu, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan, diantaranya dengan meminimalkan pengaruh eksternal yang bersifat negatif, terutama bagi sektor industri. Misalnya dengan memanfaatkan sumber daya lokal dalam kegiatan industri, yang selanjutnya dapat membentuk suatu keterkaitan aktivitas ekonomi (*demand-supply*) untuk menciptakan pertumbuhan wilayah yang lebih optimal.

Skor yang terdapat pada masing-masing sektor, merupakan hasil perbandingan antara tingkat kekuatan dengan kelemahan yang dimiliki. Apabila nilai $S - W$ yang dihasilkan semakin besar, maka potensi yang dimiliki oleh sektor untuk dikembangkan juga semakin besar. Demikian pula jika nilai $O - T$ semakin besar, maka kesempatan bagi sektor itu untuk berkembang juga semakin terbuka. Adapun skor total dari faktor internal dan eksternal yang didapat sebagai berikut :

$(S - W) + (O - T) :$

Sektor Pertanian : $0,26 + 0,97 = 1,23$

Sektor Perkebunan : $0,38 + 1,50 = 1,88$

Sektor Industri : $0,30 + 1,31 = 1,61$

Sektor Transportasi : $0,53 + 1,44 = 1,97$

Berdasarkan skor total yang dihasilkan, maka tampak bahwa posisi teratas diduduki oleh sektor transportasi, di bawahnya menyusul sektor perkebunan, pertanian, dan terakhir industri. Kelebihan sektor transportasi dibandingkan yang lainnya adalah sektor tersebut

merupakan komponen yang paling diperlukan untuk menghubungkan aktivitas sektor-sektor lainnya, misalnya antara kantong-kantong produksi pertanian dan perkebunan dengan aktivitas industri maupun langsung ke daerah pemasaran. Oleh karena itu, sektor transportasi menjadi agenda utama dalam Kesepakatan Bersama Pembangunan Lintas Kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan.

Kelebihan sektor perkebunan terletak pada tingginya peluang yang dimiliki, terutama pada semakin meningkatnya permintaan pasar terhadap komoditi sektor tersebut serta peluang investasi yang besar, khususnya dari pihak swasta. Namun untuk menjalankan aktivitasnya, sektor perkebunan, termasuk juga sektor lainnya (pertanian dan industri) sangat memerlukan dukungan dari sektor transportasi, yang memiliki kekuatan pada tingginya kebutuhan kabupaten untuk mengakses wilayah lain maupun kantong-kantong produksi dan daerah pemasaran bagi industri. Mengingat hingga saat ini pelayanan transportasi yang tersedia, khususnya transportasi darat masih relatif terbatas. Padahal sektor tersebut memegang peranan penting dalam menunjang sektor lainnya, terutama dalam proses distribusi bahan baku dan pemasaran bagi komoditi pertanian dan perkebunan maupun produk industri.

Sektor pertanian masih dominan sebagai lapangan usaha masyarakat. Namun produksinya yang cenderung semakin menurun dari tahun ke tahun merupakan indikasi bahwa permasalahan perubahan fungsi lahan yang terjadi harus segera ditangani. Sementara sektor industri lebih menitikberatkan pada industri berbasis pada pertanian dan perkebunan, salah satunya adalah industri CPO. Sektor industri mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, karena ditunjang oleh masuknya investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Perkembangan industri paling pesat berada di Kabupaten Pelalawan. Kabupaten tersebut memiliki keunggulan lokasi, yaitu sebagai pintu gerbang

ibukota propinsi, kondisi lahan yang memungkinkan, serta jaringan transportasi air dan pelabuhan yang cukup memadai, jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di wilayah Riau Bagian Selatan. Untuk masa mendatang sektor ini masih potensial untuk terus berkembang dengan adanya dukungan faktor-faktor produksi yang optimal.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disusun suatu strategi yang dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL IV.6
PENENTUAN STRATEGI

Strategi SO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor Pertanian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi pertanian dengan program intensifikasi dan diversifikasi ▪ Meningkatkan kualitas produk pertanian ▪ Meningkatkan peran kelembagaan dalam program pengembangan pertanian (seperti : penyuluhan, penelitian, pengembangan bibit unggul, dll) ▪ Mengembangkan pertanian dengan orientasi ekspor 2. Sektor Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan perkebunan sebagai bahan baku industri (<i>agro based industry</i>) ▪ Pengembangan perkebunan dengan orientasi ekspor ▪ Meningkatkan peran swasta dalam investasi maupun pengelolaan perkebunan 3. Sektor Industri <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan industri sesuai dengan potensi yang ada (khususnya <i>agro based industry</i>) ▪ Peningkatan aktivitas industri untuk menjangkau wilayah pasar yang lebih luas ▪ Pemusatan industri pada lokasi-lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan bahan baku, daerah pemasaran, dan mudah untuk diakses (berdasarkan nilai LQ, industri yang potensial berkembang adalah industri di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan) ▪ Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendukung aktivitas industri 4. Sektor Transportasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pelayanan jaringan jalan antar kabupaten ▪ Meningkatkan aksesibilitas ke kantong-kantong produksi pertanian dan perkebunan ▪ Meningkatkan aksesibilitas untuk mendukung aktivitas industri (memperoleh bahan baku dan memasarkan produk) ▪ Meningkatkan peran pelabuhan sebagai pelabuhan ekspor dengan mensinergikan jaringan transportasi darat dan air
Strategi ST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor Pertanian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi pertanian untuk memenuhi permintaan luar daerah (ekspor) ▪ Meningkatkan aktivitas pertanian secara kualitas dan kuantitas dengan memanfaatkan potensi yang ada ▪ Meningkatkan peran pemerintah di sektor pertanian, misalnya dalam

	<p>penetapan harga dasar, penyediaan bibit unggul, dll)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sektor Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi perkebunan untuk mencukupi kebutuhan bahan baku industri ▪ Meningkatkan aktivitas perkebunan dengan orientasi ekspor ▪ Meningkatkan peran serta swasta dalam pengelolaan perkebunan 3. Sektor Industri <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas industri dengan menitikberatkan pada pemanfaatan potensi lokal, seperti tanaman pertanian dan perkebunan ▪ Meningkatkan kualitas produk industri untuk bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain ▪ Meningkatkan campur tangan pemerintah dalam rangka menarik investasi di sektor industri ▪ Mengusahakan pengembangan dan pelatihan SDM 4. Sektor Transportasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan infrastruktur transportasi dengan melibatkan koordinasi kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan ▪ Meningkatkan fungsi Pelabuhan Kuala Enok sebagai pelabuhan ekspor dengan membuka jalur hubungan darat (keterkaitan jalur darat dan air) ▪ Meningkatkan kondisi jalan lokal yang menghubungkan kantong produksi dengan jalur utama ▪ Meningkatkan dan pemeliharaan kondisi aksesibilitas jalur jalan utama untuk mengakomodasi pergerakan komoditi unggulan pertanian dan perkebunan
Strategi WO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor Pertanian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi pertanian melalui perbaikan sistem penanaman, penyuluhan, dll ▪ Memperbaiki sistem pemasaran produk pertanian dengan menghindari sistem ijon maupun tengkulak yang merugikan petani 2. Sektor Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperbaiki sistem penanaman yang disesuaikan dengan daya dukung lahannya ▪ Meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan dengan industri (<i>agro based industry</i>) ▪ Meningkatkan peran swasta di sektor perkebunan 3. Sektor Industri <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas dan produktivitas industri sebagai upaya untuk menarik investasi ▪ Memperluas pangsa pasar dengan melibatkan koordinasi antar kabupaten 4. Sektor Transportasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan aksesibilitas antar kabupaten ▪ Membuka daerah-daerah yang masih terisolasi dengan membuat jalur jalan darat (jaringan jalan baru) ▪ Meningkatkan aksesibilitas terhadap kantong-kantong produksi maupun terhadap wilayah pasar
Strategi WT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor Pertanian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat sistem/pola tanam secara rotasi untuk mempertahankan daya dukung lahan ▪ Menghindari sistem pemasaran melalui tengkulak dan ijon yang merugikan petani 2. Sektor Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan perkebunan

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna di bidang perkebunan ▪ Meningkatkan campur tangan pemerintah dalam pemasaran komoditi perkebunan <p>3. Sektor Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan teknologi produksi ▪ Meningkatkan campur tangan pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi ▪ Menggalang kerjasama antara industri dan pertanian/perkebunan dalam hal pengadaan bahan baku <p>4. Sektor Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuka jalur penghubung antar kabupaten ▪ Meningkatkan pelayanan pelabuhan dengan menambah infrastruktur pendukungnya
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Analisis, 2004

Dari tabel tersebut terdapat sektor-sektor yang penanganannya memerlukan koordinasi dari tiap kabupaten yang terkait, karena sektor unggulan tiap kabupaten relatif sama dan permasalahan yang dihadapi juga sama. Terlebih lagi, aktivitas sektor-sektor tersebut bersifat dinamis dengan adanya pergerakan komoditi baik antar kabupaten maupun dengan wilayah luarnya. Dalam hal ini terjadi pemanfaatan infrastruktur secara bersama. Hasil dari analisis SWOT tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan bentuk kerjasama antar kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan.

Jika dikaitkan dengan faktor-faktor pendorong kerjasama, maka keempat sektor tersebut strategis untuk dikerjasamakan. Dasarnya, bahwa terdapat potensi pertanian dan perkebunan yang hampir seragam di keempat kabupaten, sehingga tiap kabupaten juga mempunyai kepentingan yang sama untuk menjual potensi tersebut terutama ke pangsa pasar luar negeri. Hal itu tentunya dapat memunculkan potensi konflik antar kabupaten karena bersaing dalam memperoleh pasar. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi lebih lanjut untuk mensinergikan potensi yang ada sehingga potensi konflik antar kabupaten dapat dihindari sekaligus dapat meningkatkan daya saing kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan.

Sektor industri juga merupakan sektor yang strategis untuk dikerjasamakan, karena memiliki keterkaitan/*linkages* sebagai industri hilir bagi hasil-hasil pertanian dan

perkebunan. Potensi industri di wilayah Riau Bagian Selatan yang berkembang saat ini adalah di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu. Sementara di Kabupaten Indragiri Hilir sedang dikembangkan dengan pusatnya di Kawasan Industri Kuala Enok. Kawasan tersebut memanfaatkan letaknya yang strategis karena dekat dengan pelabuhan Kuala Enok. Sedangkan untuk Kabupaten Kuantan Singingi, perkembangan industri masih relatif kecil.

Upaya pengembangan ketiga sektor tersebut perlu didukung dengan infrastruktur yang handal, salah satunya adalah transportasi. Mengingat hingga saat ini aksesibilitas antar kabupaten masih relatif terbatas, sebagai contoh belum adanya jalur darat utama yang menghubungkan Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir. Hal itu tentu saja dapat menghambat upaya pembangunan kabupaten yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam Kesepakatan Bersama Pembangunan Lintas Kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan, sektor transportasi merupakan salah satu bidang yang diagendakan untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama antar daerah.

4.3 Analisis Penentuan Sektor Paling Strategis untuk Dikerjasamakan

4.3.1 Analisis Kriteria dan Alternatif Sektor yang Strategis untuk Dikerjasamakan

Sebelum menentukan sektor yang paling strategis untuk dikerjasamakan di Riau Bagian Selatan dengan metode AHP, maka sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria sektor yang strategis untuk dikerjasamakan. Kriteria yang dihasilkan ini merupakan sintesis dari teori faktor penentu lahirnya kerjasama oleh Lee Shaw Yuan yang kemudian diintegrasikan dengan konsep regionalisasi dan karakteristik Kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- Keberadaan yang saling mengisi di bidang ekonomi

Sistem ekonomi wilayah Riau Bagian Selatan bersifat agraris dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai aktivitas utamanya. Namun demikian sektor tersebut juga perlu ditunjang dengan sektor lain sehingga membentuk *backward* dan *forward linkages*, yang mana satu dengan yang lainnya saling menunjang. Jika dikaitkan dengan konsep regionalisasi, maka sektor ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan wilayah haruslah memenuhi kriteria berikut ini :

1. Merupakan sektor unggulan
 2. Mengalami perkembangan pesat dan relatif stabil dari tahun ke tahun
 3. Mampu menciptakan keterkaitan ke depan dan ke belakang (*backward and forward linkages*)
 4. Merupakan daya tarik/diminati oleh pangsa pasar baik dalam maupun luar negeri
- Komitmen politik dari daerah-daerah anggota sebagai jaminan kepada investor
- Komitmen tersebut telah ditunjukkan dengan adanya Kesepakatan Bersama Pembangunan Lintas Kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan. Kesepakatan tersebut mengagendakan sektor-sektor pembangunan yang memerlukan koordinasi antar kabupaten. Selain itu, dengan adanya komitmen politik tersebut maka permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas interaksi antar wilayah seperti perdagangan, mobilitas penduduk, arus investasi, serta pengembangan infrastruktur khususnya di wilayah perbatasan dapat dikurangi resiko terjadinya konflik antar daerah.

- Integrasi yang didorong oleh investasi swasta

Dalam mewujudkan integasi antar daerah, melibatkan adanya interaksi antar daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, perlu adanya dukungan sistem pelayanan yang hierarkis terhadap wilayah lain. Selain itu integrasi perlu didukung dengan investasi swasta. Untuk menarik masuknya investasi swasta tersebut, maka pemerintah daerah harus dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sektor yang strategis untuk dikerjasamakan di wilayah Riau Bagian Selatan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan sektor unggulan
2. Mengalami perkembangan pesat dan relatif stabil dari tahun ke tahun
3. Mampu menciptakan keterkaitan ke depan dan ke belakang (*backward and forward linkages*)
4. Merupakan daya tarik/diminati oleh pangsa pasar baik dalam maupun luar negeri
5. Memerlukan dukungan sistem pelayanan yang hierarkis terhadap wilayah lain
6. Merupakan bagian/diagendakan dalam Kesepakatan Bersama Pembangunan Lintas Kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan
7. Menciptakan peluang investasi swasta

4.3.2 Penentuan Sektor Strategis untuk Dikerjasamakan dengan Metode AHP

Dalam analisis ini terdapat 3 tahapan analisis yang harus dilalui, yaitu :

Level 1

Level ini adalah tujuan penelitian yaitu penentuan sektor yang strategis untuk dikerjasamakan oleh empat kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan

Level 2

Level 2 adalah variabel-variabel yang berupa kriteria-kriteria sektor yang strategis untuk dikerjasamakan, yang dihasilkan dari sintesis teori faktor penentu lahirnya kerjasama dan konsep regionalisasi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang bersangkutan.

Kriteria tersebut meliputi :

- A1 : Merupakan sektor unggulan
- A2 : Mengalami perkembangan pesat dan relatif stabil dari tahun ke tahun
- A3 : Mampu menciptakan keterkaitan ke depan dan ke belakang (*backward and forward linkages*)
- A4 : Memerlukan dukungan sistem pelayanan yang hierarkis terhadap wilayah lain
- A5 : Merupakan bagian/diagendakan dalam Kesepakatan Bersama Pembangunan Lintas Kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan
- A6 : Menciptakan peluang investasi swasta
- A7 : Merupakan daya tarik/diminati oleh pangsa pasar baik dalam maupun luar negeri

Level 3

Level 3 adalah penentuan sektor yang strategis untuk dikerjasamakan di wilayah Riau Bagian Selatan. Tingkatan ini merupakan alternatif sektor yang akan dipertimbangkan dalam penentuan sektor strategis untuk dikerjasamakan di wilayah studi. Alternatif-alternatif sektor ini mengacu pada sektor yang dihasilkan oleh proses analisis sebelumnya, yang meliputi :

- B1 : Sektor Pertanian
- B2 : Sektor Perkebunan
- B3 : Sektor Industri
- B4 : Sektor Transportasi

Adapun jenis responden yang digunakan adalah pihak-pihak yang nantinya terlibat secara langsung dalam kerjasama antar kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan yaitu pihak Bapeda dari empat kabupaten, yang masing-masing kabupaten diwakili oleh 1 responden. Dengan demikian total responden dalam analisis AHP ini adalah 4 responden.

Penilaian berdasarkan metode AHP ini dapat dijelaskan berikut ini :

1. Kriteria penentuan sektor yang strategis untuk dikerjasamakan

Terdapat tujuh kriteria penentuan sektor yang strategis untuk dikerjasamakan yaitu merupakan sektor unggulan, mengalami perkembangan pesat dan relatif stabil dari tahun ke tahun, mampu menciptakan keterkaitan ke depan dan ke belakang, memerlukan dukungan sistem pelayanan yang hierarkis terhadap wilayah lain, merupakan agenda dalam Kesepakatan Bersama Pembangunan Lintas Kabupaten, mampu menciptakan peluang investasi swasta, dan menjadi daya tarik/diminati pangsa pasar luar negeri dan dalam negeri. Bobot masing-masing kriteria berbeda sesuai dengan hasil kuisisioner yang diisi oleh para responden (para ahli yang berkompeten). Hasil penilaian responden terhadap kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABELIV.7
KRITERIA PENENTUAN SEKTOR STRATEGIS UNTUK DIKERJASAMAKAN
DI WILAYAH RIAU BAGIAN SELATAN

Kriteria	Responden			
	Inhu	Inhil	Pelalawan	Kuan-Sing
Merupakan sektor unggulan	0,92	0,127	0,174	0,166
Mengalami perkembangan pesat dan relatif stabil dari tahun ke tahun	0,115	0,076	0,078	0,093
Mampu menciptakan keterkaitan ke depan dan ke belakang	0,170	0,101	0,084	0,127
Memerlukan dukungan sistem pelayanan yang hierarkis terhadap wilayah lain	0,255	0,288	0,270	0,274
Merupakan agenda dalam Kesepakatan Bersama Pembangunan Lintas Kabupaten	0,227	0,198	0,195	0,167
Mampu menciptakan peluang investasi swasta	0,088	0,134	0,128	0,089
Diminati pangsa pasar luar negeri dan dalam negeri	0,053	0,076	0,071	0,084
IK	0,07	0,09	0,08	0,07

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kriteria yang berpengaruh atau diperhatikan pada penentuan sektor strategis untuk dikerjasamakan di wilayah Riau Bagian Selatan adalah kriteria perlunya dukungan sistem pelayanan yang hierarkis terhadap wilayah lain. Meskipun bobot masing-masing responden terhadap kriteria ini berbeda-beda tetapi kriteria ini sangat perlu diperhatikan dalam penentuan sektor strategis. Kriteria lain yang juga diperhatikan dalam penentuan sektor strategis adalah menjadi bagian/agenda dalam Kesepakatan Bersama Pembangunan Lintas Kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan.

Dalam menentukan sektor strategis untuk dikerjasamakan, maka kriteria yang menjadi pertimbangan utama diambil dari kriteria pada urutan pertama dan kedua yang dipilih oleh responden (pada tabel, kriteria terpilih tercetak tebal) . Dalam hal ini, kriteria yang dimaksud adalah kriteria perlunya dukungan sistem pelayanan yang hierarkis terhadap wilayah lain yang selanjutnya disebut sebagai Kriteria I dan kriteria menjadi bagian/agenda dalam Kesepakatan Bersama Pembangunan Lintas

Kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan sebagai Kriteria II.

Adanya dukungan sistem pelayanan hierarkis terhadap wilayah lain sangat diperlukan dalam menjalin kerjasama antar daerah. Mengingat dalam kerjasama melibatkan interaksi antar daerah tersebut. Dengan demikian, perlu adanya pola pelayanan yang berkelanjutan antar daerah. Begitu pula dalam menentukan sektor strategis untuk dikerjasamakan, dimana dalam pola aktivitas sektor itu pergerakannya akan sangat terbantu atau justru terhambat oleh baik buruknya sistem pelayanan antar daerah. Oleh karena itu, sistem pelayanan bagi pergerakan sektor tersebut diusahakan bersifat hierarkis.

Kriteria II, yaitu sektor yang strategis merupakan bagian dari Kesepakatan Bersama pembangunan Lintas Kabupaten. Kesepakatan tersebut merupakan komitmen awal yang menjadi dasar terbentuknya kerjasama antar daerah sekaligus sebagai mekanisme penyelesaian masalah antar daerah.

2. Alternatif Sektor yang Strategis untuk Dikerjasamakan di Wilayah Riau Bagian Selatan

Berdasarkan dua kriteria terpilih di atas, maka empat alternatif sektor menurut responden Bappeda empat kabupaten, yaitu sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor industri, dan transportasi mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan hasil kuisisioner yang diisi oleh para responden (para ahli yang berkompeten). Hasil penilaian responden berdasarkan Kriteria I adalah sebagai berikut :

TABEL IV.8
ALTERNATIF SEKTOR STRATEGIS UNTUK DIKERJASAMAKAN
BERDASARKAN KRITERIA I

Alternatif	Responden			
	Inhu	Inhil	Pelalawan	Kuan-Sing
Sektor Pertanian	0,075	0,095	0,082	0,114
Sektor Perkebunan	0,151	0,225	0,242	0,136
Sektor Industri	0,508	0,345	0,308	0,280
Sektor Transportasi	0,265	0,336	0,368	0,470
IK	0,07	0,04	0,02	0,01

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir memberikan skor prioritas tertinggi pada sektor perkebunan, sedangkan Bappeda Kabupaten Pelalawan dan Kuantan Singingi memberikan skor tertinggi pada sektor transportasi. Jika ditinjau dari konsep regionalisasi, sektor transportasi merupakan komponen penting yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar wilayah, yang mana interaksi tersebut merupakan titik awal tercetusnya kerjasama antar daerah. Sedangkan berdasarkan Kriteria II, maka alternatif sektor strategis untuk dikerjasamakan adalah sebagai berikut :

TABEL IV.9
ALTERNATIF SEKTOR STRATEGIS UNTUK DIKERJASAMAKAN
BERDASARKAN KRITERIA II

Alternatif	Responden			
	Inhu	Inhil	Pelalawan	Kuan-Sing
Sektor Pertanian	0,099	0,100	0,104	0,111
Sektor Perkebunan	0,085	0,133	0,159	0,121
Sektor Industri	0,120	0,200	0,226	0,304
Sektor Transportasi	0,696	0,567	0,510	0,464
IK	0,02	0,04	0,03	0,02

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan tabel tersebut di atas, keempat kabupaten menyepakati bahwa sektor transportasi menjadi sektor yang diprioritaskan untuk dikerjasamakan di wilayah Riau Bagian Selatan, meskipun skor yang dihasilkan berbeda-beda. Hal itu menunjukkan bahwa pada dasarnya sudah terdapat persamaan persepsi pada

masing-masing pemerintah daerah mengenai pentingnya melakukan koordinasi dalam pembangunan sektor transportasi. Prioritas sektor transportasi didasari pertimbangan bahwa dalam aksesibilitas antar kabupaten masih relatif rendah. Dengan adanya keterbatasan akses tersebut, maka pergerakan aktivitas industri dan pemasaran produk pertanian dan perkebunan menjadi tidak efektif. Padahal aksesibilitas dapat berfungsi sebagai daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Di samping itu, permasalahan antar kabupaten umumnya terkait dengan sarana dan prasarana transportasi, khususnya di wilayah perbatasan.

Analisis AHP dilakukan untuk menentukan sektor yang paling strategis untuk dikerjasamakan. Dalam analisis ini digunakan 4 responden yang mewakili pihak Bappeda masing-masing kabupaten yang terkait secara langsung dalam upaya mewujudkan kerjasama antar daerah, sehingga dianggap cukup berkompeten dalam memahami permasalahan yang sedang dibahas. Hasil yang didapatkan dari analisis ini adalah sektor transportasi sebagai sektor yang paling strategis untuk dikerjasamakan di wilayah Riau Bagian Selatan. Secara akumulatif, nilai/skor prioritas yang didapatkan sektor transportasi cukup besar. Ditambah lagi, terlihat kesamaan persepsi pada pemerintah di masing-masing kabupaten bahwa sektor transportasi merupakan sektor yang paling memerlukan penanganan melalui kerjasama antar kabupaten.

4.4 Analisis Bentuk Kerjasama Antar Kabupaten di Wilayah Riau Bagian Selatan

Dalam era otonomi daerah ini, masing-masing daerah berupaya memajukan perkembangan daerahnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan tersebut umumnya dititikberatkan pada sektor ekonomi sebagai kegiatan primer, disamping sektor lainnya sebagai kegiatan penunjang. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari masalah yang dihadapi, baik intern maupun terkait dengan wilayah lain

terutama yang berbatasan. Untuk memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan bersama, maka muncul pemikiran untuk mengadakan kerjasama antar daerah..

Wilayah Riau Bagian Selatan yang mengalami pemekaran sebagai dampak dari diberlakukannya otonomi daerah, mau tidak mau harus bekerja lebih keras dalam membangun wilayahnya sekaligus mengejar ketinggalannya dari daerah lain. Sementara itu, rasa keterikatan dan ketergantungan antar daerah masih terjalin dengan kuat karena masih dipengaruhi aspek sosial budaya dan historis daerah setempat yang dulunya merupakan satu kesatuan wilayah administrasi (kecuali Kabupaten Pelalawan).

Ditinjau dari aspek spasialnya, keempat kabupaten menjadi bagian dari Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok sebagai satu kesatuan kutub pertumbuhan. Kabupaten-kabupaten tersebut ada yang berfungsi sebagai daerah inti dan pendukung. Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu berpotensi untuk menjadi generator bagi peningkatan aktivitas lokal maupun regional. Kabupaten tersebut dapat difungsikan sebagai kawasan industri berbasis pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang berasal dari sektor tersebut. Sementara sebagai kawasan pendukung, selain dari internal Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, juga dari dua kabupaten lainnya dengan menyediakan bahan baku bagi aktivitas industri selain sebagai pintu gerbang ekspor (Kuantan Singingi sebagai pintu gerbang menuju Propinsi Jambi, Indragiri Hilir menyediakan Pelabuhan Samudera Kuala Enok sebagai pelabuhan ekspor ke luar wilayah).

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu ditunjang oleh jalur transportasi yang ada, dimana terdapat beberapa jalur lalu lintas utama sebagai pintu gerbang menuju kota-kota lainnya serta pergerakan barang-barang produksi dengan orientasi ekspor. Jalur lalu lintas yang tersedia yaitu sebagai berikut :

- Pelalawan – Indragiri Hulu (sebaliknya) melalui jalur Pangkalan Kerinci - Sorek Satu – Ukui – Japura – Rengat
- Kuantan Singingi – Indragiri Hulu (sebaliknya) melalui jalur Taluk Kuantan – Baserah – Cerenti – Peranap – Air Molek – Japura – Rengat
- Pelalawan – Indragiri Hulu – Indragiri Hilir (sebaliknya) melalui Pangkalan Kerinci – Sorek Satu – Ukui – Japura – Rengat – Kuala Cinaku – Rumbai Raya – Sungai Salak – Tempuling – Tembilahan
- Kuantan Singingi – Indragiri Hulu – Indragiri Hilir (sebaliknya) melalui jalur Taluk Kuantan – Baserah – Peranap – Air Molek – Japura – Rengat - Kuala Cinaku – Rumbai Raya – Sungai Salak – Tempuling – Tembilahan

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta terlampir.

Dari jalur transportasi utama di wilayah Riau Bagian Selatan tersebut terlihat bahwa saat ini jalur Pelalawan langsung menuju Indragiri Hilir belum terlayani, sehingga pergerakannya harus melalui Kabupaten Indragiri Hulu terlebih dahulu. Hal ini tentu saja menjadi tidak efektif, terutama bagi lalu lintas perdagangan antar kabupaten maupun secara regional. Oleh karena itu, perlu dibuka jalur baru sebagai alternatif jalur yang sudah ada. Manfaat dibukanya jalur baru tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi pergerakan sekaligus membuka daerah-daerah yang masih terisolasi. Selain itu, adanya bangkitan-bangkitan lalu lintas yang terjadi pada jalur yang baru tersebut dimungkinkan dapat menyebabkan pertumbuhan wilayah sepanjang jalur tersebut (berbentuk linier).

Sektor transportasi sangat penting dalam menunjang keterkaitan aktivitas industri dengan pemanfaatan sumber daya lokal berupa komoditi pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa, dan karet, yang telah terjalin kuat. Secara internal, transportasi

sebagai wadah pergerakan *supply – demand* komoditi unggulan antar kabupaten maupun antar kantong-kantong produksi dengan lokasi industri. Sedangkan secara eksternal dapat

Berpangkal tolak dari hal tersebut di atas, maka muncul pemikiran untuk mewujudkan kerjasama antar kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan sebagai upaya untuk memecahkan masalah bersama, sekaligus untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi. Mengingat kabupaten kabupaten tersebut saling berbatasan. Kerjasama yang akan diwujudkan antara Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil analisis yang dilakukan, maka potensi kerjasama yang dapat dilaksanakan adalah kerjasama di sektor transportasi. Berdasarkan Bersama yang telah dilakukan pada tanggal 14 Desember 2002, kerjasama yang dilakukan dapat diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jalan, khususnya jalan penghubung antar kabupaten maupun jalan untuk mendukung aktivitas ekonomi regional dan akses terhadap daerah pemasaran, serta peningkatan fungsi Pelabuhan Kuala Enok. Mengingat hingga saat ini pelayanan yang diberikan infrastruktur tersebut masih relatif terbatas. Dengan demikian diharapkan pembangunan di sektor ini dapat berjalan lebih baik, sehingga membawa efek positif pada aktivitas perekonomian daerah. Potensi kerjasama yang terdapat pada kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan tersebut kemudian dapat ditindaklanjuti ke dalam format kerjasama yang lebih formal. Kerjasama tersebut kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut :

TABEL IV.10
USULAN KERJASAMA ANTAR KABUPATEN DI WILAYAH
RIAU BAGIAN SELATAN

Jenis Kegiatan	Pemda Terkait	Deskripsi Peran
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jalan lintas utara Sorek – Sei Guntung ▪ Jalan tembus alternatif Rengat – Teluk Meranti 	Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu ▪ Menjalankan pengelolaan dan proses peningkatan jalan, mulai dari perencanaan, konstruksi, sampai dengan pemeliharaan, terutama pada jalur Sorek hingga batas Inhil ▪ Melakukan <i>sharing</i> dana pembangunan dengan kabupaten terkait
	Kabupaten Indragiri Hilir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu ▪ Menjalankan pengelolaan dan proses peningkatan jalan, mulai dari perencanaan, konstruksi, sampai dengan pemeliharaan, terutama pada jalur Teluk Meranti atau batas Inhil hingga Sei Guntung ▪ Melakukan <i>sharing</i> dana pembangunan dengan kabupaten terkait
	Kabupaten Indragiri Hulu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir ▪ Menjalankan pengelolaan dan proses peningkatan jalan, mulai dari perencanaan, konstruksi, sampai dengan pemeliharaan, terutama pada jalur Rengat – Teluk Meranti ▪ Melakukan <i>sharing</i> dana pembangunan dengan kabupaten terkait
	Propinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kerjasama ▪ Melakukan <i>sharing</i> dana pembangunan dengan kabupaten terkait
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Jalan Simpang IFA – IBUL – Kuala Kilan – Pangkalan Kasai – Sei Akar – Kuala Enok 	Kabupaten Kuantan Singingi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir ▪ Menjalankan pengelolaan dan proses peningkatan jalan, mulai dari perencanaan, konstruksi, sampai dengan pemeliharaan jalan ▪ Melakukan <i>sharing</i> dana pembangunan dengan kabupaten terkait

	Kabupaten Indragiri Hulu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hilir ▪ Sebagai penyedia sarana pendukung jaringan jalan ▪ Melakukan <i>sharing</i> dana pembangunan dengan kabupaten terkait
	Kabupaten Indragiri Hilir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi ▪ Menjalankan pengelolaan dan proses peningkatan jalan, mulai dari perencanaan, konstruksi, sampai dengan pemeliharaan jalan ▪ Melakukan <i>sharing</i> dana pembangunan dengan kabupaten terkait
	Propinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kerjasama ▪ Melakukan <i>sharing</i> dana pembangunan dengan kabupaten terkait

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dalam kerjasama tersebut, bertindak sebagai inisiator kerjasama sekaligus aktornya adalah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara pihak pemerintah propinsi bertindak sebagai fasilitator yang turut berperan dalam menjembatani negosiasi yang dilakukan kabupaten yang akan bekerjasama. Selain itu juga memberikan masukan bagi masing-masing pihak yang bekerjasama, berkaitan dengan pengambilan keputusan, lingkup kegiatan yang akan dilakukan, serta kemungkinan dampak yang akan terjadi.

Mengingat sektor yang akan dikerjasamakan terkait dengan pembangunan infrastruktur, maka bentuk kerjasamanya dapat berupa *inter-jurisdictional agreement*, mengingat kondisi kabupaten tersebut yang saling berdekatan. Dalam hal ini pemerintah daerah terkait mengadakan perjanjian dalam bentuk kerjasama untuk menyelesaikan masalah transportasi. Kerjasama tersebut bersifat *sustainable* (berkelanjutan). Jadi apabila satu sektor kerjasama yang disepakati telah selesai dilaksanakan, maka dimungkinkan

dapat dilakukan tindak lanjut kerjasama pada sektor lainnya yang dapat mendukung tercapainya visi pembangunan Riau Bagian Selatan.

Berkaitan dengan masalah pembiayaan pembangunan, maka dilakukan *sharing* dana antara kabupaten pelaksana kerjasama yang juga dibantu oleh pihak propinsi. Sementara itu pihak swasta dan masyarakat dapat turut berpartisipasi dengan berperan sebagai penyedia fasilitas untuk mendukung pergerakan pada jaringan jalan yang direncanakan dibangun tersebut.

4.5 Analisis Implikasi Bentuk Kerjasama yang Diusulkan

Kerjasama yang akan dilakukan oleh kabupaten-kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan akan dapat berjalan secara efektif apabila didukung dengan kinerja institusi yang baik dan peraturan perundangan yang tegas. Efektif dalam hal ini berarti tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai secara optimal. Namun tidak hanya sekedar tujuan yang tercapai, kerjasama juga seharusnya mampu meningkatkan kualitas output yang dihasilkan.

Kerjasama merupakan bentuk upaya solusi permasalahan di wilayah Riau Bagian Selatan saat ini. Permasalahan saat ini, sistem transportasi yang ada belum mampu melayani segala aktivitas ekonomi yang berlangsung. Jalur yang melayani hanyalah jalur Pangkalan Kerinci – Sorek Satu – Ukui – Japura – Rengat – Kuala Cinaku – Rumbai Raya – Sungai Salak – Tempuling – Tembilihan (untuk lalu lintas antar Kabupaten Pelalawan – Indragiri Hulu – Indragiri Hilir) dan jalur Taluk Kuantan – Baserah – Peranap – Air Molek – Japura – Rengat - Kuala Cinaku – Rumbai Raya – Sungai Salak – Tempuling – Tembilihan (untuk lalu lintas Kabupaten Kuantan Singingi – Indragiri Hulu – Indragiri Hilir). Akibatnya, pergerakan aktivitas ekonomi menjadi tidak efektif, karena jika terjadi kerusakan jalan atau banjir, maka lalu lintas antar kabupaten menjadi terputus. Selain itu, perkembangan wilayah pada daerah –daerah tertentu yang masih terisolasi menjadi lebih

lamban (sebagai contoh di wilayah timur Kabupaten Pelalawan, kecamatan Bunut dan Teluk Meranti). Padahal di daerah tersebut terdapat potensi seperti luas lahan dan sumber daya alam untuk dikembangkan. Oleh karena itu perlu dibangun jaringan jalan baru sebagai strategi untuk mengantisipasi terjadinya “booming” pada ruas jalan yang ada saat ini serta untuk mengantisipasi pertumbuhan sektor-sektor lainnya yang membutuhkan pelayanan sistem transportasi.

Ruas jalan baru yang diusulkan yaitu pada koridor Sorek – Sei Guntung yang bercabang ke arah Kabupaten Indragiri Hulu melalui jalur Rengat – Teluk Meranti serta ruas jalan yang melalui Simpang IFA – IBUL – Kuala Kilan – Pangkalan Kasai – Sei Akar – Kuala Enok. Berdasarkan kondisi di wilayah yang bersangkutan, ruas jalan baru tersebut dapat membuka keterisolasian daerah-daerah potensial, serta melancarkan aksesibilitas dan mobilitas kegiatan industri, perkebunan, dan pertanian, bahkan dapat merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi baru di sepanjang koridor jalan tersebut, salah satunya pada koridor Sorek – Sei Guntung dimana terdapat perkebunan kelapa dan kelapa sawit yang dikelola oleh swasta maupun masyarakat. Manfaat yang dapat diperoleh dari dibangunnya ruas jalan baru adalah sebagai berikut :

- Manfaat bagi keempat kabupaten
 1. Memperlancar arus lalu lintas transportasi darat untuk pengangkutan penumpang, dan arus barang antar daerah
 2. Memperlancar arus komoditi berskala ekspor dari wilayah Riau Bagian Selatan, yang nantinya melalui Pelabuhan Samudera Kuala Enok sebagai pelabuhan ekspor potensial di wilayah tersebut

- Manfaat bagi Kabupaten Indragiri Hulu
 1. Sebagai daerah yang menghubungkan Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hilir, maka dengan dibukanya akses jaringan jalan yang melalui kabupaten tersebut diharapkan dapat memicu pertumbuhan kabupaten terutama pada kawasan sepanjang jalan lintas kabupaten tersebut, dimana Kabupaten Indragiri Hulu dapat berfungsi sebagai daerah transit
 2. Memperlancar arus komoditi produk unggulan, khususnya komoditi ekspor yang akan dijual baik melalui pelabuhan samudera maupun untuk dijual ke Propinsi Sumatera Barat dan Jambi
- Manfaat bagi Kabupaten Indragiri Hilir
 1. Dibangunnya jaringan transportasi darat antar kabupaten dapat mendukung pengembangan Pelabuhan Samudera Kuala Enok
 2. Meningkatkan aksesibilitas dengan Kabupaten Pelalawan sebagai penghubung dengan ibukota propinsi sekaligus dapat memperpendek jarak dengan ibukota propinsi
- Manfaat bagi Kabupaten Pelalawan
 1. Memperlancar aktivitas industri, terutama untuk mendapatkan bahan baku dari luar daerah serta memasarkan produk ke luar negeri melalui pelabuhan samudera
 2. Meningkatkan fungsi Kabupaten Pelalawan sebagai penghubung ketiga kabupaten lainnya dengan ibukota propinsi (daerah transit)
- Manfaat bagi Kabupaten Kuantan Singingi
 1. Membuka keterisolasian kabupaten tersebut dari daerah lain
 2. Membuka pangsa pasar yang lebih luas

3. Meningkatkan fungsinya sebagai penghubung wilayah Riau Bagian Selatan dengan propinsi lain

Namun demikian, masih terdapat kendala dalam mengimplementasikan hal tersebut. Kendala yang muncul terkait dengan masalah finansial, yang mana untuk membangun infrastruktur transportasi diperlukan dana yang cukup besar. Sementara dengan adanya pemekaran wilayah dan otonomi daerah, membawa konsekuensi bahwa sumber dana dan subsidi bagi pemerintah daerah menjadi berkurang. Di samping itu, untuk membangun ruas jalan tersebut perlu adanya koordinasi antar kabupaten yang berbatasan untuk lebih mensinergikan pembangunan. Untuk itulah, maka perlu dilakukan kerjasama dalam pembangunan sektor transportasi demi kepentingan bersama.

Format kerjasama yang dibuat dapat dengan membentuk lembaga bersama yang merupakan kolaborasi dari keempat kabupaten. Lembaga tersebut perlu diperkuat dengan landasan hukum berupa peraturan yang dibuat dan disepakati bersama yang dituangkan dalam Keputusan Bersama. Dalam lembaga tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa tim yang mempunyai tugas dan wewenang berbeda, diantaranya tim perencanaan yang bertugas merencanakan pembangunan yang akan dilakukan, tim pelaksanaan teknis yang bertanggung jawab penuh di lapangan dalam kegiatan pelaksanaan rencana, tim pengelolaan yang bertugas menjalankan kegiatan operasi teknis dan pemeliharaan jalan, dan tim monitoring yang bertanggung jawab memonitoring pengelolaan jalan dan memastikan bahwa segala sesuatu seperti rencana anggaran, kegiatan operasi pemeliharaan dan investasi yang dilakukan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tim tersebut beranggotakan instansi-instansi terkait yang mewakili pihak-pihak yang bekerjasama. Sementara pembiayaan untuk realisasi kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan *sharing* pendanaan oleh empat kabupaten yang bekerjasama dengan dibantu pula

oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Di samping itu, pemerintah pusat dan propinsi dapat bertindak sebagai penasehat dan penengah bagi pihak-pihak yang bekerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh keempat kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan dapat menciptakan suatu kekuatan ekonomi dengan berlandaskan pada kekuatan regionalisasi. Karena dengan platform regionalisasi tersebut, maka potensi yang ada dapat dimaksimalkan sekaligus mengeliminir kelemahan yang ada.

4.6 Potensi Kerjasama Antar Daerah sebagai Perwujudan Konsep Regionalisasi di Wilayah Riau Bagian Selatan

Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah Riau Bagian Selatan merupakan wilayah yang sangat potensial karena kekayaan sumberdaya alam dan letaknya yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan dunia. Pemekaran wilayah membuka kesempatan bagi kabupaten di wilayah tersebut untuk memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Namun karena adanya keterbatasan dana dan prasarana pendukung, maka hal tersebut belum dapat sepenuhnya dilakukan. Di samping itu, masing-masing kabupaten masih memiliki rasa ketergantungan satu sama lain yang cukup tinggi, mengingat dulunya merupakan satu kabupaten sebelum akhirnya dimekarkan.

Kerjasama merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan masalah yang ada saat ini. Sebelum melaksanakan kerjasama tersebut, maka terlebih dahulu perlu dilakukan penentuan sektor yang akan dikerjakamkan. Selanjutnya dari sector tersebut dapat dibentuk format kerjasama yang diinginkan oleh keempat kabupaten.

4.6.1 Sektor Strategis untuk Dikerjasamakan di Wilayah Riau Bagian Selatan

Untuk menentukan sektor yang strategis untuk dikerjasamakan, digunakan pertimbangan ekonomi. Ekonomi umumnya menjadi tolok ukur utama untuk mengetahui pertumbuhan wilayah. Sementara pertumbuhan wilayah merupakan salah satu indikator bahwa wilayah tersebut mengalami perkembangan. Oleh karena itu digunakan alat analisis LQ untuk menentukan sektor-sektor basis/unggulan, mengingat kerjasama yang dilakukan haruslah dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi kabupaten yang bersangkutan.

Dari analisis LQ dirumuskan sektor basis di wilayah itu adalah sektor pertanian, sektor industri, dan sektor transportasi. Sektor pertanian kemudian dipecah lagi, yang mana sektor perkebunan menjadi sektor unggulan tersendiri. Alasannya adalah sektor perkebunan juga merupakan kontributor utama bagi PAD kabupaten bahkan kecenderungannya mengungguli sektor pertanian tanaman pangan itu sendiri.

Analisis yang dilakukan selanjutnya adalah analisis SWOT untuk mengetahui potensi dan permasalahan masing-masing sektor, untuk selanjutnya diarahkan menuju kerjasama antar daerah. Hal ini penting, sebagai langkah antisipasi untuk mengeliminir kendala-kendala yang mungkin terjadi sekaligus memaksimalkan implikasi positif hasil kerjasama. Dari analisis tersebut, sektor yang memiliki skor tertinggi adalah sektor transportasi disusul kemudian oleh sektor transportasi. Pertimbangan adalah tingkat kekuatan dan peluang yang relatif besar dan kelemahan dan tantangan eksternal yang relatif kecil atau dengan kata lain kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan tersebut menjadi tolok ukur tingkat kestrategisan sektor untuk diarahkan dalam bentuk kerjasama.

Keempat sektor unggulan tersebut kemudian dianalisis dengan analisis AHP untuk menentukan sektor yang paling strategis untuk dikerjsamakan berdasarkan persepsi pemerintah daerah setempat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka sektor yang paling strategis untuk dikerjsamakan adalah sektor transportasi. Hal itu juga diperkuat dengan kondisi sistem transportasi di wilayah tersebut saat ini yang mendesak untuk segera dilakukan perbaikan dan pembukaan jalur baru bagi kawasan-kawasan potensial yang masih belum dapat diakses secara memadai. Sektor tersebut merupakan stimulan terhadap perkembangan wilayah. Sementara berkaitan dengan upaya regionalisasi, maka sistem transportasi merupakan penghubung pusat-pusat pertumbuhan yang saat ini belum terlayani, antara lain Pangkalan Kerinci – Sungai Guntung, Tembilahan – Sungai Guntung, Teluk Kuantan – Kuala Enok, dan Sungai Guntung – Kuala Enok. Nilai tambah lainnya bagi sektor transportasi adalah bahwa sektor tersebut telah menjadi agenda utama dalam Rapat Kesepakatan Bersama Pembangunan Lintas Kabupaten di Wilayah Riau Bagian Selatan. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa terdapat persamaan pemikiran keempat pemerintah daerah mengenai perlunya sektor transportasi untuk dikerjsamakan.

4.6.2 Bentuk Kerjasama Regional di Wilayah Riau Bagian Selatan

Kerjasama di bidang transportasi di Wilayah Riau Bagian Selatan dapat dilakukan dalam bentuk *Inter-Jurisdictional Agreement*, yang mana kerjasama tersebut sebagai upaya pemecahan masalah bersama dalam hal infrastruktur, khususnya transportasi. Mengingat sektor tersebut merupakan suatu jaringan dan bersifat lintas batas antar wilayah, maka dalam pembangunan seharusnya berkelanjutan dan memerlukan koordinasi antara kabupaten yang terkait. Dalam lembaga tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa tim yang mempunyai tugas dan wewenang berbeda, diantaranya tim perencanaan yang

bertugas merencanakan pembangunan yang akan dilakukan, tim pelaksanaan teknis yang bertanggung jawab penuh di lapangan dalam kegiatan pelaksanaan rencana, tim pengelolaan yang bertugas menjalankan kegiatan operasi teknis dan pemeliharaan jalan, dan tim monitoring yang bertanggung jawab memonitoring pengelolaan jalan dan memastikan bahwa segala sesuatu seperti rencana anggaran, kegiatan operasi pemeliharaan dan investasi yang dilakukan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku

Kerjasama tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk lembaga yang diformalkan dengan suatu Peraturan Daerah. Lembaga tersebut merupakan perwakilan keempat kabupaten yang menjadi pelaksana kerjasama. Dalam lembaga tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa tim yang mempunyai tugas dan wewenang berbeda, diantaranya tim perencanaan yang bertugas merencanakan pembangunan yang akan dilakukan, tim pelaksanaan teknis yang bertanggung jawab penuh di lapangan dalam kegiatan pelaksanaan rencana, tim pengelolaan yang bertugas menjalankan kegiatan operasi teknis dan pemeliharaan jalan, dan tim monitoring yang bertanggung jawab memonitoring pengelolaan jalan dan memastikan bahwa segala sesuatu seperti rencana anggaran, kegiatan operasi pemeliharaan dan investasi yang dilakukan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sementara masalah pendanaan perlu dibicarakan lebih lanjut oleh keempat kabupaten dengan propinsi untuk menentukan bentuk *sharing* yang paling adil dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kabupaten.



**MAGISTER PERENCANAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TESIS

PETA

SEKTOR UNGGULAN DI WILAYAH RIAU BAGIAN SELATAN

**POTENSI KERJASAMA REGIONAL RIAU
BAGIAN SELATAN SEBAGAI UPAYA
PEMBANGUNAN WILAYAH**

Legenda :

- Batas Propinsi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Sungai
- Pelabuhan Samudera
- Rencana Jaringan Jalan

-Potensial -Belum Potensial Pembangunan	-Unggulan -Potensi Pembangunan
-Unggulan -Belum Potensial Pembangunan	-Potensial -Potensial Pembangunan

Utara



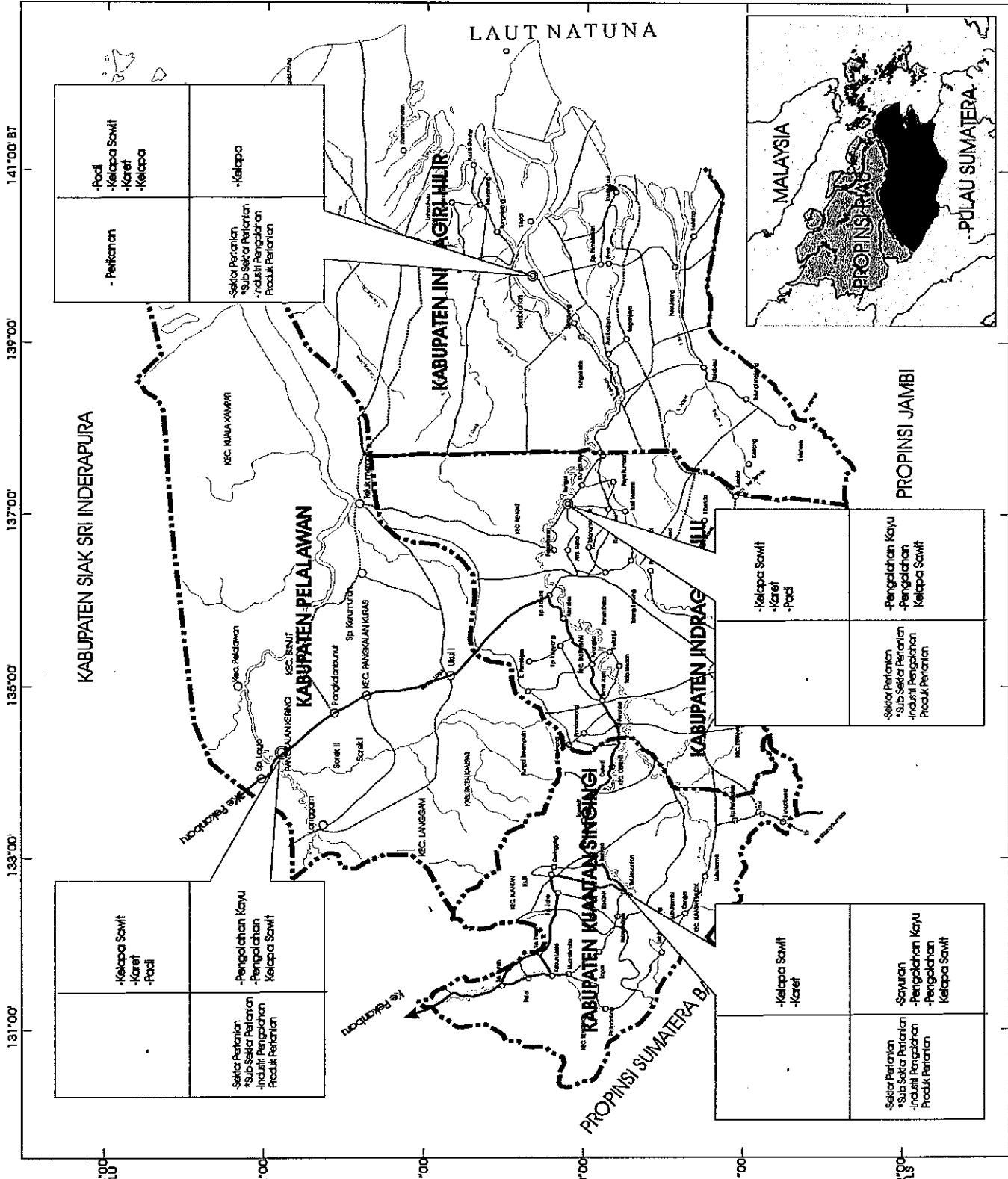
SKALA



No. Peta
4.1 Hal. 144

Sumber :

DINAS KEMPRASWIL PROPINSI RIAU

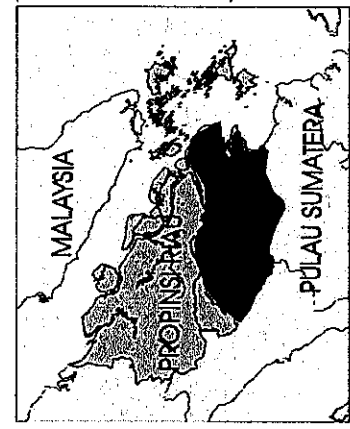


-Perikanan	-Padi -Kelapa Sawit -Karet -Kelapa
Sektor Perikanan -Sub Sektor Perikanan -Industri Pengolahan Produk Perikanan	-Kelapa

-Kelapa Sawit -Karet -Padi	-Penggalaan Kayu -Penggalaan Kelapa Sawit
Sektor Perikanan -Sub Sektor Perikanan -Industri Pengolahan Produk Perikanan	-Penggalaan Kayu -Penggalaan Kelapa Sawit

-Kelapa Sawit -Karet -Padi	-Penggalaan Kayu -Penggalaan Kelapa Sawit
Sektor Perikanan -Sub Sektor Perikanan -Industri Pengolahan Produk Perikanan	-Penggalaan Kayu -Penggalaan Kelapa Sawit

-Kelapa Sawit -Karet	-Sawit -Penggalaan Kayu -Penggalaan Kelapa Sawit
Sektor Perikanan -Sub Sektor Perikanan -Industri Pengolahan Produk Perikanan	-Sawit -Penggalaan Kayu -Penggalaan Kelapa Sawit



BAB V PENUTUP

5.1 Temuan Studi

Dalam penelitian ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

- Kerjasama antar wilayah merupakan salah satu bentuk upaya regionalisasi yang diperkuat oleh keinginan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memenuhi kebutuhan wilayahnya, menghindari konflik antar wilayah yang mungkin terjadi, sekaligus meningkatkan daya saing wilayah.
- Penentuan sektor strategis untuk dikerjasamakan didasarkan pada kriteria-kriteria yang merupakan hasil sintesis teori faktor penentu lahirnya kerjasama dan konsep regionalisasi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang bersangkutan, sehingga didapatkan kriteria berikut ini :

Sektor yang strategis untuk dikerjasamakan harus memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Merupakan sektor unggulan
- b. Mengalami perkembangan pesat dan relatif stabil dari tahun ke tahun
- c. Mampu menciptakan keterkaitan ke depan dan ke belakang (*backward and forward linkages*)
- d. Memerlukan dukungan sistem pelayanan yang hierarkis terhadap wilayah lain
- e. Merupakan bagian/diagen\kan dalam Kesepakatan Bersama Pembangunan Lintas Kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan
- f. Menciptakan peluang investasi swasta
- g. Merupakan daya tarik/diminati oleh pangsa pasar baik dalam maupun luar negeri

Sedangkan alternatif sektor strategis yang dihasilkan dari analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sektor pertanian
2. Sektor Perkebunan
3. Sektor Industri
4. Sektor Transportasi

- Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka sektor yang strategis untuk dikerjasamakan di wilayah Riau Bagian Selatan adalah sektor transportasi. Adapun usulan kerjasamanya adalah pembangunan ruas jalan baru pada koridor Sorek – Sei Guntung yang bercabang ke arah Kabupaten Indragiri Hulu melalui jalur Rengat – Teluk Meranti serta ruas jalan yang melalui Simpang IFA – IBUL – Kuala Kilan – Pangkalan Kasai – Sei Akar – Kuala Enok. Format kerjasama yang dibuat dapat dengan membentuk lembaga bersama yang merupakan kolaborasi dari keempat kabupaten.

5.2 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Pemekaran wilayah sebagai implementasi otonomi daerah telah memaksa Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kuantan Singingi bekerja lebih keras membangun daerahnya dengan usaha sendiri. Hal itu memicu munculnya egoisme daerah yang dapat berakibat terjadinya konflik antar daerah. Namun di lain pihak, terdapat keterbatasan potensi lokal pada masing-masing daerah sehingga perlu adanya hubungan dengan daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhannya.

- Adanya kedekatan geografis, persamaan historis dan sosial budaya daerah yang bersangkutan menimbulkan rasa saling ketergantungan antar wilayah. hal itu menjadi pondasi terbentuknya regionalisasi di wilayah Riau Bagian Selatan. Regionalisasi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dalam rangka meningkatkan daya saingnya terhadap wilayah lain. Potensi regionalisasi perlu ditunjang dengan interaksi yang baik antar daerah, yang mana membutuhkan dukungan sistem pelayanan transportasi yang lancar dan memadai.
- Konsep regionalisasi terbentuk oleh adanya pusat-pusat pertumbuhan yang ditunjang dengan lokasi yang strategis, keberadaan sektor ekonomi basis, dan keterkaitan hubungan sosial budaya masyarakat setempat. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut saling berinteraksi dalam aktivitasnya hingga terjadi hubungan saling terkait dan ketergantungan.
- Untuk mewujudkan kekuatan regionalisasi, terdapat berbagai kendala yang bersifat internal antara lain keterbatasan potensi sumber daya alam, manusia dan kinerja institusi pemerintah daerah, serta keterbatasan dana untuk melaksanakan pembangunan. Sementara kendala eksternal antara lain kurangnya dukungan dari pihak pemerintah propinsi dan pusat, terutama dukungan finansial dalam mengimplementasikan regionalisasi. Oleh karena itu muncul pemikiran untuk mengadakan kerjasama antar daerah sebagai upaya memecahkan masalah bersama sekaligus menghindari terjadinya konflik antar daerah yang dapat melemahkan upaya regionalisasi.
- Potensi kerjasama di wilayah Riau Bagian Selatan yang terbesar adalah dalam sektor transportasi. Dasar penentuannya adalah dari nilai LQ yang dihasilkan, yang mana sektor tersebut merupakan salah satu sektor yang menjadi unggulan di empat

kabupaten di wilayah Riau Bagian Selatan, skor SWOT yang menunjukkan bahwa sektor transportasi memiliki kekuatan dan peluang yang relatif lebih besar dibandingkan sektor lainnya, sekaligus kelemahan dan tantangan yang relatif lebih kecil. Selanjutnya diperkuat dengan analisis AHP yang menyatakan bahwa persepsi keempat kabupaten relatif sama, yang mana sektor yang menjadi prioritas untuk dikerjasamakan adalah sektor transportasi.

- Sektor transportasi menjadi prioritas untuk dikerjasamakan karena didasari pertimbangan bahwa dalam aksesibilitas antar kabupaten masih relatif rendah, menunjang keterkaitan aktivitas industri dengan pemanfaatan sumber daya lokal berupa komoditi pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa, dan karet, yang telah terjalin kuat, serta membuka daerah-daerah yang masih terisolasi.
- Dengan adanya kerjasama pada sektor transportasi dimungkinkan memberi manfaat bagi pertumbuhan masing-masing kabupaten maupun secara regional, antara lain memperlancar arus lalu lintas transportasi darat untuk pengangkutan penumpang, dan arus barang antar daerah, memperlancar arus komoditi berskala ekspor dari wilayah Riau Bagian Selatan, yang nantinya melalui Pelabuhan Samudera Kuala Enok sebagai pelabuhan ekspor potensial di wilayah tersebut, serta mendorong munculnya pusat-pusat kegiatan baru pada kawasan yang dilalui jalur transportasi yang akan dibangun.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi ini ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan kerjasama di wilayah Riau Bagian Selatan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah bahwa bidang kerjasama yang paling strategis untuk dilakukan adalah

kerjasama di bidang transportasi. Adapun alternatif bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

TABEL V.1
USULAN KERJASAMA ANTAR KABUPATEN
DI WILAYAH RIAU BAGIAN SELATAN

Jenis Kegiatan	Pemda Terkait	Deskripsi Peran
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jalan lintas utara Sorek – Sei Guntung ▪ Jalan tembus alternatif Rengat – Teluk Meranti 	Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu ▪ Menjalankan pengelolaan dan proses peningkatan jalan, mulai dari perencanaan, konstruksi, sampai dengan pemeliharaan, terutama pada jalur Sorek hingga batas Inhil ▪ Melakukan sharing dana pembangunan dengan kabupaten terkait
	Kabupaten Indragiri Hilir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu ▪ Menjalankan pengelolaan dan proses peningkatan jalan, mulai dari perencanaan, konstruksi, sampai dengan pemeliharaan, terutama pada jalur Teluk Meranti atau batas Inhil hingga Sei Guntung ▪ Melakukan sharing dana pembangunan dengan kabupaten terkait
	Kabupaten Indragiri Hulu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir ▪ Menjalankan pengelolaan dan proses peningkatan jalan, mulai dari perencanaan, konstruksi, sampai dengan pemeliharaan, terutama pada jalur Rengat – Teluk Meranti ▪ Melakukan sharing dana pembangunan dengan kabupaten terkait

Jenis Kegiatan	PemdaTerkait	Deskripsi Peran
	Propinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kerjasama ▪ Melakukan sharing dana pembangunan dengan kabupaten terkait
Pembangunan Jalan Simpang IFA - IBUL - Kuala Kilan - Pangkalan Kasai -Sei Akar - Kuala Enok	Kabupaten Kuantan Singingi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir ▪ Menjalankan pengelolaan dan proses peningkatan jalan, mulai dari perencanaan, konstruksi, sampai dengan pemeliharaan jala ▪ Melakukan <i>sharing</i> dana pembangunan dengan kabupaten terkait
	Kabupaten Indragiri Hulu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hilir ▪ Sebagai penyedia sarana pendukung jaringan jalan ▪ Melakukan <i>sharing</i> dana pembangunan dengan kabupaten terkait
	Kabupaten Indragiri Hilir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi ▪ Menjalankan pengelolaan dan proses peningkatan jalan, mulai dari perencanaan, konstruksi, sampai dengan pemeliharaan jalan ▪ Melakukan <i>sharing</i> dana pembangunan dengan kabupaten terkait
	Propinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kerjasama ▪ Melakukan <i>sharing</i> dana pembangunan dengan kabupaten terkait

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Format kerjasama secara lebih terperinci dapat dilakukan dengan membentuk lembaga bersama yang merupakan kolaborasi dari Pemda terkait. Dalam format kerjasama yang dibentuk haruslah memuat hak dan kewajiban yang seimbang dan telah disepakati

bersama. Lembaga tersebut perlu diperkuat dengan landasan hukum berupa peraturan yang dibuat dan disepakati bersama yang dituangkan dalam Keputusan Bersama. Dalam lembaga tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa tim yang mempunyai tugas dan wewenang berbeda, diantaranya tim perencanaan yang bertugas merencanakan pembangunan yang akan dilakukan, tim pelaksanaan teknis yang bertanggung jawab penuh di lapangan dalam kegiatan pelaksanaan rencana, tim pengelolaan yang bertugas menjalankan kegiatan operasi teknis dan pemeliharaan jalan, dan tim monitoring yang bertanggung jawab memonitoring pengelolaan jalan dan memastikan bahwa segala sesuatu seperti rencana anggaran, kegiatan operasi pemeliharaan dan investasi yang dilakukan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sedangkan masalah aspek pembiayaan pembangunan dapat dipecahkan dengan mengadakan *sharing* dana antara kabupaten pelaksana kerjasama yang juga dibantu oleh pihak propinsi. Pihak swasta dan masyarakat juga dapat turut berpartisipasi dengan berperan sebagai penyedia fasilitas untuk mendukung pergerakan pada jaringan jalan yang direncanakan dibangun tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alkadri (et al),1999, *Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah*, Jakarta : BPPT
- Alkadri (et al),1999, *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah : Sumberdaya Alam Sumberdaya Manusia Teknologi*, Jakarta : BPPT
- Ambardi dan Socia Prihawantoro, Urbanus M.,2002, *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah : Kajian Konsep dan Pengembangan*, Jakarta : BPPT
- Arsyad, Lincoln, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : BP – STIE - YKPN
- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta
- Bintarto, R., 1979, *Metode Analisa Geografi*, Jakarta : LP3ES
- Daldjoeni, N. 1997, *Geografi Baru : Organisasi Keruangan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Alumni
- Djojodipuro, Marsudi, 1992, *Teori Lokasi*, Jakarta : UI Press
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Perkembangan*, Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia
- Glasson, Jhon, 1983, *An Introduction to Regional Planning*, London : Hutchinson
- Glasson, Jhon, 1990, *Pengantar Perencanaan Regional*, Jakarta : LPFE UI
- Hadjisaroso, Purnomosidi. 1982. *Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Pekerjaan Umum.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta : Cides
- Koen, Agnes, dkk., 2003, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*, Jakarta : Kompas
- Koentjaraningrat, 1993, *Kebudayaan, mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia
- Kuncoro, Mudrajad, 1997, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta : UPP – AMP YKPN

- Kuncoro, Mudrajad, 2002, *Analisis Spasial dan Regional : Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, Yogyakarta : UPP-AMP YKPN
- Maharadja, Apul. D., 2003, *Membangun Indonesia : Studi Kasus Batam*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Munir, Badrul, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, NTB : BP Bappeda
- Nasution, S. 2001. *Metode Reseach {Penelitian Ilmiah}*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Paelinck, Jean. H. P. dan Nijkamp, Peter, 1975, *Operational Theory and Method in Regional Economics*, Great Britain : Saxon House
- Pamudji, S., 1985, *Kerja Sama Antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah*, Jakarta : Bina Aksara
- Permadi, Bambang, 1992, *AHP*, Jakarta : PAU – EK – UI
- Rangkuti, Freddy, 2001, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rapoport, Amos, 1969, *House Form and Culture*, London : Prentice Hall
- Richardson, Harry, W. 1979. *Regional Economic*, London : University of Illinois Press.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriady, 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Rondinelli, Denis, A dan Kenneth Ruddle. 1978. *Urbanization and Rural Development : A Spatial Policy for Equitable Growth*, New York : Preager Publishers.
- Saaty, Thomas, 1993, *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo
- Sarundajang, S.H., 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Warpani, Suwardjoko, 1980, *Analisa Kota dan Daerah*, Bandung, ITB
- Winarso, Haryo (et al), 2002, *Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia*, Bandung : ITB

TERBITAN TERBATAS

Hilhorst, Jos G. M., 1998, *Industrialization and Local / Regional Development Revisited "Development and Change"*, Vol. 29, pp 1 – 26

Jurnal ASPI, *Pengelolaan Infrastruktur Kota Melalui Mekanisme Kerjasama Antar Daerah*, Edisi Oktober 2002

Webster, Douglas dan Muller, Larissa, 17 Juli 2000, *Urban Competitiveness Assessment in Developing Country Urban Regions : The Road Forward*, Paper dalam Urban Group INFUD The World Bank

LAPORAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragirihulu, 2002, *Indragiri Hulu Dalam Angka 2001*, Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2002, *Indragiri Hilir Dalam Angka 2001*, Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2002, *Pelalawan Dalam Angka 2001*, Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2002, *Kuantan Singingi Dalam Angka 2001*, Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu, 2002, *Pendapatan Regional Indragiri Hulu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2002*, Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2002, *Pendapatan Regional Indragiri Hilir Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2002*, Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2002, *Pendapatan Regional Pelalawan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2002*, Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2002, *Pendapatan Regional Kuantan Singingi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2002*, Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, 2003, *Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Ekonomi Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu*

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002, *Laporan Akhir : Laporan Pekerjaan Identifikasi Kebijakan dan Strategi Lokal Propinsi Riau*

- Pemerintah Daerah Tingkat I Riau, 1999, *Riau Abad 21*, PWI Cabang Riau
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2001, Laporan Akhir : *Perumusan Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Andalan Rengat – Kuala Enok Propinsi Riau*
- Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu, *Laporan Tahunan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2003*
- Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan, 2003, *Deskripsi Perkebunan Kabupaten Pelalawan*
- Kesepakatan Bersama Lintas Kabupaten di Riau Bagian Selatan (Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kuantan-Singingi), tanggal 14 Desember 2002
- Pemerintah Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Propinsi Riau, 1992, *Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir*
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, 2002, *Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 – 2005*
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2002, *Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 – 2005*